

Edisi 127 TH. XLV, 2015



Parlementaria

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG KINERJA DPR



**EDISI
KHUSUS**

ISSN 1979-5912
9 771979 591288

Parlementaria

PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH:

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Achmad Djuned SH, M.Hum
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

Tatang Sutarsa, SH

(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si.
(Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Dadang Prayitna, S.IP. M.H.
(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),
Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

Sugeng Irianto, S.Sos
M. Ibnur Khalid
Iwan Armanias
Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos
Supriyanto
Agung Sulistiono, SH
Rahayu Setiowati
Muhammad Husen
Sofyan Efendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arinindya
Naefuroji
M. Andri Nurdriansyah
Yaserto Denus Saptoadji
Andi Muhamad Ilham
Jaka Nugraha

SEKRETARIAT REDAKSI:

I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH
Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,
Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350
Fax. (021) 5715536,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;
www.dpr.go.id/berita

 @dpr_ri



PENGANTAR REDAKSI

Parlementaria Edisi 127 merupakan edisi khusus menyambut HUT -70 DPR. Adapun tema pokok yang diangkat adalah Mengukur Kinerja DPR. Tema tersebut sengaja diangkat karena pada momen ulang tahun seperti ini sering dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan mengoreksi sejauhmana lembaga kita menjalankan fungsi dan tugasnya.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tidak bisa disamakan dengan kinerja pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, tidak ada kinerja dewan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Tidak ada pembangunan infrastruktur dikomandoi wakil rakyat, tidak ada pembangunan pasar, sekolah, irigasi yang terjadi karena perintah langsung dewan.

DPR, adalah lembaga politik tempat bertarungnya ide, gagasan serta kepentingan politik fraksi-fraksi. Demikian pula terkait tiga tugas pokok DPR yakni perumusan UU, penyusunan anggaran dan pengawasan, sangat terbatas dan tidak operasional. UU

baru dapat dioperasionalkan bila sudah regulasi turunan yaitu PP, Permen dan Pergub, begitu pula dengan penyusunan APBN yang sepenuhnya diusulkan pemerintah.

Mispersepsi lain adalah prestasi DPR dengan tolok ukur kuantitas produk legislasi bukan kualitas. Padahal jumlah produk legislasi bukan indikator capaian kerja. Di negara-negara maju, parlemennya tidak memproduksi regulasi yang banyak, tetapi efektif. Dengan uraian singkat ini diharapkan persepsi masyarakat terhadap lembaga perwakilan akan mendapatkan pencerahan sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Untuk memberi gambaran atas kiprah wakil rakyat berhubungan dengan konstituennya, disajikan aktifitas sejumlah anggota Dewan di dapil masing-masing. Ternyata kegiatan mereka cukup padat, berbaur di tengah-tengah masyarakat, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan demi masa depan yang lebih baik. Dirgahayu HUT-70 DPR-RI. (mp)



PIMPINAN, ANGGOTA DAN KELUARGA BESAR
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI MENGUCAPKAN

***SELAMAT HUT KEMERDEKAAN RI
DAN HUT DPR RI KE-70***

**Semoga Semakin Amanah
Dalam Mengemban Tugas**



DAFTAR ISI

PROLOG	
Takaran Yang Benar Untuk DPR	8
LAPORAN UTAMA	
Tidak Ingin Membiarkan Masyarakat Terus Salah Paham Pada DPR	10
SUMBANG SARAN	
Hansard dan Bill Digest Sumber Evaluasi Kinerja DPR	32
AKTIFITAS DAPIL	
Ketika “Sang Wakil” Kembali Ke Rakyat	35
RAKYAT BICARA	45
KIAT SEHAT	
Ini Dia Solusi Kesemutan	49
PROFIL	
Heri Gunawan Politisi yang Pembelajaran	51
KUNJUNGAN KERJA	57
POTRET KINERJA	65
SELEBRITIS	
Widyawati Prihatin dengan Bangsa Ini	69
PERNIK	
Museum DPR Perkuat Sejarah Kolektif DPR RI	72
PARLEMEN DUNIA	
Parlemen Korea Selatan dan Legislasi Nasional	75
POJOK PARLE	
Antara Surga dan Komodo	79



PROFIL 51

Kesabaran dan ketekunan telah mengantarnya ke puncak karir profesional dan politik. Inilah Heri Gunawan, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Kini, ia Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, BUMN, koperasi, dan UKM.



PROLOG 8

TAKARAN YANG BENAR UNTUK DPR

Menimbang tanpa takaran yang benar, bisa dipastikan hasil akhir tidak akan pernah memuaskan. Kondisi itu gambaran yang pas bagi pengamat politik yang menimbang kinerja DPR tidak dengan takaran seharusnya, misalnya menggunakan takaran pemerintah tentu hasil akhir tidak akan akurat. Publik kemudian terdorong menuntut hasil konkrit kerja DPR, fakta itu paling sering ditemui anggota dewan saat melakukan kunjungan kerja pada masa reses di daerah pemilihannya. Tidak jarang pengamat dan masyarakat menuding DPR bisanya *ngomong doang*.

LAPORAN UTAMA 15

AWASI IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS

Fadli berjanji, ke depannya, pihaknya akan semakin intensif dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Otsus. Jika memang ada permasalahan terkait UU-nya, maka pihaknya akan segera melakukan revisi.



PERNIK 72

MUSEUM DPR PERKUAT SEJARAH KOLEKTIF DPR RI



PERNYATAAN SIKAP BERSAMA NELAYAN PROBOLINGGO

Pernyataan Sikap Bersama dari Nelayan Kota Probolinggo, diwakili oleh H. M. Yusuf Susanto atas nama 3500 orang ABK (Anak Buah Kapal) dan Perempuan Dagang Ikan yang diterima oleh DPRD Kab. Probolinggo pada 26 Januari 2015, sebagai berikut:

1. Menolak atas penerbitan Per-

aturan Menteri KKP No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Alat Tangkap Ikan, sebelum ada solusi terbaik atas alat tangkap ikan masa depan bagi nelayan.

2. Aparat keamanan laut (Satpol Airud dan TNI AL) agar tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan di semua tingkatan tetap mengeluarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

*Agus Rudiyanto
Probolinggo*

PEJABAT DAN PEGAWAI PEMDA YANG TIDAK PERNAH DIAUDIT

Mewakili Masyarakat/Aktivis Anti Korupsi Kabupaten Jambi ditujukan kepada Ketua DPR RI, merekomendasikan/memberikan catatan khusus terkait maraknya tindak pidana korupsi oleh pejabat negara yang masih mengalami hambatan dalam pemberantasannya yang disebabkan karena lemahnya koordinasi intra dan antar lembaga, rendahnya kapasitas pelaksanaan produk perundang-undangan, serta masih lemah kualitas dan kuantitas penegak hukum. Karena itu, maka KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi) harus bertindak tegas dalam mengatasi permasalahan, yaitu dengan cara menjalankan Law Enforcement, meningkatkan hukuman yang lebih berat terhadap koruptor, serta pengawasan yang efektif. Jangan ada lagi mafia dan makelar proyek, budayakan nilai-nilai anti korupsi, canangkan resolusi Jambi Tanpa Korupsi.

Bahwa rekomendasi tersebut terkait dugaan kasus korupsi dan manipulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan DPRD Muaro Jambi dan Pemkab

Muara Jambi Tahun Anggaran 2009-2014 yang melibatkan oknum pejabat dan anggota DPRD yang tidak pernah diusut ataupun diaudit oleh BPKP di antaranya korupsi dana bansos, anggaran reses fiktif, korupsi dana alkes, dan lain-lain. Kasus perampok berdasar (koruptor) tersebut tidak pernah terungkap oleh penegak hukum meski telah kami laporkan, namun kasusnya selalu dipetieskan.

*Sulaiman Idris
Jambi*

PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM KELOMPOK TANI

Kami Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) Kampung Baru Sidomukti, Desa Panigoran, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, menyampaikan, bahwa pada 1969-1970, lahan kami, pengadu yang memohon perlindungan hukum atas tindakan tidak obyektif Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat

yang cenderung ingin melakukan

eksekusi atas lahan terkait putusan perkara No. 65/Pdt-G/2013/PN.RAP.

Bahwa terhadap tidak dilak-

sanakannya eksekusi putusan PK No. 09 PK/Pdt/2006 yang menyatakan bahwa pihak tergugat Pemerintah RI Cq. Menhankam Cq. Panglima ABRI Cq. KSU Cq. Komando Pangkalan Udara (Danlanud) I Medan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkaranya seluas 2.000 M2 kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa dihuni oleh siapapun.

Bahwa lahan tersebut dipinjam dari sebuah keluarga di Medan oleh Danlanud I Medan (sekarang Lanud Soewondo) pada 1963 untuk membangun Tower Antena Komunikasi/PHB keperluan TNI saat konfrontasi dengan Malaysia, namun tidak dikembalikan. Selanjutnya pada 1998 pemilik lahan menggugat pengembalian lahan ke pengadilan memenangkan pihak penggugat hingga tingkat PK di MA RI.

Bahwa pada 2013, pemilik lahan/penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang telah final tersebut, namun eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena ada upaya gugatan perlawanan terhadap penetapan eksekusi No. 64/Eks/2013/III/Pdt.G/1997/PN.Mdn dari pihak AURI Cq. Panglima Komando Operasi TNI AU I/Makoopsau Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menolak eksekusi tersebut.

Bahwa tindakan pihak AURI tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga kami mohon tindak lanjut atas permasalahan tersebut.

*Aan Sagita dkk
Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara*



PENGADUAN TERHADAP TINDAKAN TEBANG PILIH KPK

Kami adalah Advokat LBH Purna Bakti Polri memohon perlindungan hukum atas tindakan KPK dalam menindaklanjuti surat pengadu No.07/P/LBH-PBBJ/II/2015 tgl. 23 Januari 2015 perihal permohonan pengawasan dan monitoring proses peradilan perkara perdata No.587/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST terkait gugatan 234 masyarakat miskin terhadap 9 pengusaha besar terkait sengketa tanah E.V. 4926 a.n. Nyai Jasienta seluas 5,7 HA termasuk Kav. 126 seluas 19.140 M2 di Jl. KH. Mas Mansyur, Jakarta Pusat.

Kami menduga hakim menerima suap dalam memeriksa perkara tersebut dan berharap KPK dapat mengusut ada tidaknya praktek suap dalam perkara tersebut melalui pemeriksaan harta kekayaan hakim yang telah dilaporkan (melalui pemeriksaan harta kekayaan), namun permohonan pengadu langsung ditolak oleh Komisioner KPK dengan alasan hal tersebut bukan kewenangan KPK tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Bahwa dalam memutus perkara

tersebut, Majelis Hakim tidak memper-timbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari 9 tergugat hanya 2 yang hadir dalam persidangan dan para tergugat tidak mengajukan saksi serta alat bukti, tapi Majelis Hakim justru memenangkan pihak tergugat.

Kami memohon tindak lanjut atas tindakan Komisioner KPK tersebut.

P. Pali Allosarira
Jakarta Barat



PTPN II PERSERO SUMUT, BUMN YANG NYARIS TENGGELAM

Menyampaikan laporan mengenai kondisi PTPN II Tg. Morawa yang diduga akan melego 8.000 Ha areal HGU nya untuk dijadikan Kota Deli Megapolitan sehingga dapat melenyapkan keberadaan tembakau Deli dan laporan tentang keberadaan RS. Tembakau Deli.

Bahwa PTPN II yang dipimpin Dirut Batara Muda Nasution (BMN) sebenarnya bukan sebagai BUMN terbaik dengan laba fantastis sebagaimana diberitakan oleh media massa karena kekayaan yang dimiliki PTPN II lebih kecil dari hutangnya.

Bahwa RS. Tembakau Deli merupakan bangunan bersejarah (cagar budaya)

yang dilindungi oleh UU No.11 Tahun 2010 dan Perda Kota Medan No. 6 Tahun 1988 karena diambil alih melalui nasionalisasi sehingga menjadi milik negara sebagaimana terdaftar dalam Reg No. 34 dengan nama RS Perkebunan Negara. Dengan demikian rencana Dirut PTPN menjual RS tersebut kepada swasta telah dilaporkan ke Poldasu. Selain itu secara de facto rumah sakit tersebut milik Pemda karena sesudah 2 tahun habis masa HGU nya pihak PTPN tidak menggantinya dengan HGB sebagaimana diatur dalam PP 40/1996..

Bahwa keberadaan RS. Tembakau Deli yang luas dan asri semestinya dibuka

kembali dengan renovasi dan penambahan alat medis mutakhir dan dokter yang berkualitas agar dapat menyaingi rumah sakit di Penang dan Singapura sehingga warga Medan dan para pensiunan dapat berobat disana dengan menggunakan Kartu Sehat yang telah dicanangkan Presiden Jokowi. Sudah selayaknya RS Tembakau Deli tersebut dilestarikan dan dijadikan RS Buruh yang pertama di luar Jawa sesuai tujuan dibangunnya dahulu pada masa perkebunan Belanda.

H.M.Y.Sembiring
Medan, Sumatera Utara



TAKARAN YANG BENAR UNTUK DPR

Menimbang tanpa takaran yang benar, bisa dipastikan hasil akhir tidak akan pernah memuaskan. Kondisi itu gambaran yang pas bagi pengamat politik yang menimbang kinerja DPR tidak dengan takaran seharusnya, misalnya menggunakan takaran pemerintah tentu hasil akhir tidak akan akurat. Publik kemudian terdorong menuntut hasil konkrit kerja DPR, fakta itu paling sering ditemui anggota dewan saat melakukan kunjungan kerja pada masa reses di daerah pemilihannya. Tidak jarang pengamat dan masyarakat menuding DPR bisanya ngomong doang.

Bagi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bisa dikatakan tidak ada kinerja dewan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Tidak ada pembangunan infrastruktur dikomandoi wakil rakyat, tidak ada pembangunan pasar, sekolah, irigasi yang terjadi karena perintah langsung dewan. Lebih konkrit tidak pernah ada kenaikan *income* perkapita masyarakat karena dewan sering berkunjung ke daerah.

“Selama ini yang dinikmati masyarakat adalah kerjanya eksekutif, itu yang dilihat orang, dinikmati dan dibicarakan di mana-mana,” katanya saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu. Lantas sambil tersenyum ia juga mempertanyakan ketika ada pangamat yang membuat penilaian DPR bisanya hanya ngomong. *La iyalah* - kalau boleh meminjam bahasa gaul ABG, sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat tugas utamanya adalah bicara, bicara dan bicara. Jadi kalau ada anggota dewan yang tidak pernah bicara apalagi sepanjang masa tugasnya, itu adalah keganjilan yang nyata.

Belum lama ini ada peristiwa saling klaim kinerja ketika DPR bersama pemerintah usai membahas Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Menteri Agama bahkan Presiden Jokowi menyebut ini adalah upaya pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan haji kepada masyarakat. Tapi tunggu dulu, upaya ini sebenarnya bermula ketika DPR menjalankan fungsi pengawasannya

dengan optimal. Ada upaya sungguh-sungguh dari Komisi VIII yang membidangi masalah agama, untuk benar-benar menyisir dengan detail seluruh komponen biaya haji. Ini terlihat dari usulan awal penurunan biaya yang diajukan pemerintah yang hanya 24 dolar AS. Setelah para wakil rakyat nyinyir dan memaksa rapat sampai pukul 04.00 WIB - ini waktu mendekati shalat Subuh, akhirnya biaya pelaksanaan ibadah haji turun drastis sebesar 502 dolar AS atau setara Rp6,275 juta per jamaah dibanding tahun lalu. “Kami di Komisi VIII ingin membuktikan bahwa jika DPR sungguh-sungguh melakukan pengawasan maka BPIH bisa diturunkan secara signifikan,” kata Ketua Komisi Saleh Partaonan. Dengan nilai kurs dollar dalam APBNP sebesar Rp12,500 maka angka efisiensi yang berhasil dibuat mencapai Rp1 triliun. Luar biasa.

Dalam bidang legislasi Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengakui kinerja dibidang ini memang sedikit tersendat. Sejumlah upaya telah dilakukan diantaranya dengan menetapkan dua hari dalam

satu minggu sebagai waktu khusus membahas program legislasi. Ia juga menjelaskan terdapat sejumlah masalah yang menurutnya perlu dicarikan solusi. Menurutnya pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Baleg diberikan otoritas dalam penyusunan RUU. Namun pada UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI hal tersebut dianulir, penyusunan RUU tidak lagi menjadi otoritas Baleg, tapi pada komisi-komisi.

Dijelaskan Firman, jika semua penyusunan UU diserahkan kepada mekanisme di komisi, sementara komisi bebannya terlampau berat dalam kurun waktu yang relatif pendek. Ditambah lagi dengan masa reses yang setiap tahunnya cukup padat. “Anggota dewan yang duduk di komisi-komisi yang bisa fokus pada masalah RUU tidak banyak. Pembahasan RUU ini memang menjenuhkan karena kita bicara dengan masalah perdebatan substansi hukum, bahasa, dan sebagainya. Pembahasan memang tidak sesederhana itu,” papar anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini. Untuk mempercepat penyusunan RUU di DPR, Firman menegaskan harus ada terobosan baru, antara lain, mengembalikan lagi posisi penyusunan RUU kepada Badan Legislasi dan untuk penyusunan naskah akademis dikerjakan bersama dengan perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.

Fungsi DPR berikutnya yang tak kalah penting adalah fungsi anggaran. Dengan fungsi ini, DPR memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden. Tak dipungkiri, anggaran berbagai program yang menjadi kebijakan Pemerintah, harus melalui

“ Dalam bidang legislasi Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengakui kinerja dibidang ini memang sedikit tersendat. Sejumlah upaya telah dilakukan diantaranya dengan menetapkan dua hari dalam satu minggu sebagai waktu khusus membahas program legislasi. ”

palu persetujuan DPR.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengutarakan, setiap tahunnya pembahasan RAPBN sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang. Pos-pos mata anggaran juga sudah dibahas secara sistematis. Agus menekankan, perencanaan dalam APBN yang diajukan harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Apalagi, hal ini yang menyangkut kebijakan nasional dan hajat hidup orang banyak. Tak bisa dielakkan, kadang pembahasan anggaran berjalan cukup alot dan memeras otak.

Satu peran lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah diplomasi parlemen yang diamanatkan UU MD3. DPR telah berhasil menorehkan sejumlah keberhasilan dalam konteks organisasi parlemen regional dan dunia. Nurhayati Ali Assegaf yang sekarang menjabat Ketua BKSAP misalnya pernah menduduki *member of the Executive Committee* serta *President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians* di IPU. Begitu pula, Ketua DPR RI 2009–2014 Marzuki Alie pernah menjabat *President of SEAPAC, President of*

APA, serta *President of AIPA*. Di IPU, rekan-rekan anggota DPR pernah menduduki jabatan penting seperti Tantowi Yahya yang menjadi *Member of the Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn, and Child Health*; Arif Budimanta yang menduduki *Member of the Standing Committee on United Nations Affairs*; Herlini Amran diberi amanat sebagai *Member of the Committee on Middle East Questions*. “Terpilihnya anggota DPR, menunjukkan bangsa Indonesia mampu menjalankan diplomasi parlemen di kancah global. Kita harus mendukung setiap upaya perjuangan anak bangsa yang ingin menduduki jabatan di pelbagai organisasi internasional. Saya perlu tekankan, ini adalah salah satu wujud kesuksesan diplomasi DPR jika anggotanya sukses di forum internasional,” papar Nurhayati.

Terakhir tapi ini tidak kalah penting adalah upaya Pimpinan DPR untuk membangun satu kondisi dimana tercipta satu takaran yang pas antara anggota dewan dengan sistem pendukungnya yang akan mendorong hadirnya DPR yang didambakan. “DPR ini ada elemen yang permanen, ada elemen yang temporer. Saya ini disebut elemen temporer karena politisi itu datang dan pergi, kalau dapat mandat rakyat maka dia datang kesini. Kalau tidak dapat mandat dia tidak bisa ke sini, tidak punya kewenangan apa-apa. Elemen yang permanen itu sekarang jadi fokus kami supaya bisa diperkuat, sumber daya manusianya, sistem teknologi informasinya, kemudian sistem pendukungnya, perpustakaannya. Nah tentu ketika yang nonpermanen ini masuk DPR, dia harus diback up supaya kuat, sebab kita tidak bisa mengontrol pilihan rakyat. Yang punya kuasa mengontrol pilihan rakyat adalah reformasi parpol yang sudah berjalan dengan baik,” tekan dia. (tim parle) Foto: Andri/Parle/HR



WAWANCARA KHUSUS FAHRI HAMZAH

TIDAK INGIN MEMBIARKAN MASYARAKAT TERUS SALAH PAHAM PADA DPR

Membuat janji wawancara dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) memang perlu sabar. Agenda kegiatannya setiap hari cukup padat. Setelah sempat ditunda satu kali, akhirnya *Tim Parle* bersama salah seorang wartawan

dari media nasional berkesempatan mewawancarainya di ruang rapat yang berada di sebelah ruang kerjanya, Gedung Nusantara III lantai 2. Kenapa di ruang rapat, ternyata tiga tamu penting sudah terlanjut ‘menguasai’ ruang kerjanya dan menunggu untuk ditemui.

Fahri, wakil rakyat peraih suara terbanyak di Dapil NTB ini dengan lu-

gas menjawab pertanyaan yang diajukan mulai dari kinerja di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sampai kepada permasalahan terkait upaya memperbaiki pemahaman publik terhadap lembaga perwakilan ini. Politisi Fraksi PKS ini juga menjawab hasil sidik pendapat publik soal kinerja DPR yang diumumkan satu lembaga survey belum lama ini. Satu poin penting

yang ditekankan mantan aktivis mahasiswa ini adalah ia tidak ingin publik berlarut dalam kondisi salah paham pada DPR.

Ada survey yang melaporkan diantara lembaga negara kinerja DPR dinilai paling tidak memuaskan?

Nah itu perlu di-update cara berfikirnya itu bahwa ada perbedaan tugas antara lembaga-lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebetulnya kalau kita bicara kinerja, sepenuhnya ada di eksekutif. Kinerja itu harus kita kaitkan dengan hasil bagi rakyat yang dinikmati langsung oleh rakyat, nah itu kerjanya siapa sih.

Maksudnya kerja DPR tidak bisa dinikmati rakyat? Sebetulnya tidak bisa. Yang bisa dinikmati itu adalah kerjanya eksekutif, pertumbuhan ekonomi karena pembangunan mega infrastruktur. Kalau jalan makin banyak, mobil lewat makin banyak, transportasi barang dan jasa makin banyak skala perekonomian makin besar, orang yang terlibat dalam skala itu makin banyak, *income* perkapita masyarakat naik. Begitukan teorinya.

Jadi itu adanya di eksekutif? Iya itu adanya di eksekutif. Itu yang utama sebetulnya, yang dibicarakan orang di mana-mana.

Ruang bagi DPR atau legislatif dimana? Kalau kita lihat DPD misalnya, simbolik kerjanya. Tidak ada fungsi legislasinya hanya rekomendasi. Tugas DPR itu mari kita lihat, ada fungsi anggaran. Nah ini hanya satu kali. Begitu dia sudah menyetujui anggaran pemerintah ya sudah selesai. Fungsi anggaran itu pada dasarnya adalah menyetujui atau tidak menyetujui anggaran pemerintah.

DPR bisa kan mengatakan itu hasil upaya kita juga? Tidak bisa, katakanlah begini DPR misalnya

menyetujui anggaran pemerintah yang ternyata menurut orang itu jelek. Nah kemudian divonis itu karena DPRnya jelek, tidak bisa begitu sebenarnya karena itu terlalu kompleks. Anggaran itu terlalu banyak dan waktu atau kesempatan melibatkan DPR di dalamnya juga terbatas. Waktu pembahasannya dalam konstruksi ketatanegaraan kita tidak terlalu banyak.

Bagaimana dengan legislasi?

Dalam sistem ketatanegaraan kita, legislasi itu bukan fungsi tunggal DPR. Legislasi itu juga fungsi presiden. Sebagai contoh misalnya RUU KUHAP yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang. Itu drafnya datang dari pemerintah. Sekarang kalau ada pasal yang kontroversial seperti menghidupkan kembali pasal penghinaan kepada presiden itu sebetulnya kinerja siapa? Itu pemerintahan, wong yang memajukan usulan itu pemerintah.

Kalau ada yang mengatakan kinerja DPR jelek karena UU yang diselesaikan sedikit bagaimana?

Jangan lupa UU itu ada yang dibuat dan dibatalkan. Jadi jumlah itu tidak bisa relevan menjadi sebab dia bagus, padahal ada juga UU itu justru ditiadakan. Dalam pembuatan UU pasal-pasal itu ada yang disetujui ada yang tidak disetujui. Apakah karena pasalnya disetujui kinerjanya jadi baik kemudian apabila tidak disetujui kinerjanya buruk. Kan tidak begitu. Jadi mengukur kinerja dewan itu sebenarnya *absurd* sekali.

Baiklah itu soal legislasi, bagaimana dengan pengawasan?

Nah fungsi pengawasan dewan ini tidak bisa dibilang rendah karena DPR sekarang ini galak sekali. Dibalik itu, itulah sebabnya pimpinan dewan dan UU MD3 yang baru memandatkan agar kita memperkuat sistem pendukung pelaksanaan fungsi anggota DPR. Selama ini sistem pendukung yang ideal itu belum pernah ada se-

“ Nah fungsi pengawasan dewan ini tidak bisa dibilang rendah karena DPR sekarang ini galak sekali. Dibalik itu, itulah sebabnya pimpinan dewan dan UU MD3 yang baru memandatkan agar kita memperkuat sistem pendukung pelaksanaan fungsi anggota DPR.”

jak zaman Belanda lalu. Ini yang kita pikirkan sekarang ini lewat penguatan sistem pendukung supaya apa, karena DPR dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya inputnya adalah bahan ilmiah atau karya intelektual. Inilah yang kemudian harus disiapkan oleh sistem pendukung yang sekarang sedang kita perkuat seperti Pusat Kajian yang sudah keluar perpresnya. Ada Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Pengawasan, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Kita sedang menyiapkan perangkat yang dapat mendukung bukan hanya anggota tapi seluruh mereka yang terlibat dan bekerja, baik birokrasi, political appointees, tenaga ahli supaya mereka punya sumber untuk memperdalam. Sehingga betul-betul nanti anggota dewan punya dukungan dan sekaligus tim bisa diajak untuk berdiskusi. Seperti tadi saya bicara di depan wartawan (sebelum wawancara Fahri mengikuti konferensi pers di ruang wartawan - red), kalau saya tidak punya input yang baik pasti saya ngomongnya nggak bagus. Tetapi kalau input kuat, data kuat, statistik bagus pasti bagus, nah semua ini disiapkan oleh sistem pendukung.

Selama ini DPR banyak jadi sasaran tembak banyak pihak seperti pengamat atau pakar? Banyak juga pengamat dan pakar yang tidak mengerti fungsi DPR. Ada seorang ahli hukum - saya pernah dengar dalam satu dialog di radio, dia mengatakan anggota DPR ini terlalu banyak ngomong katanya. Itu ajaib kalimat itu karena anggota DPR ya kerjanya ngomong. Parlemen itu dari kata parle artinya bicara. Jadi anggota dewan tidak bisa masuk gorong-gorong, selokan kayak Jokowi karena itu bukan kerjaan dia.

“ Nah kalau mau negara demokrasi maka DPRnya harus ada dan kuat supaya proses *check and balances* diantara tiga pemangku kekuasaan - *trias politica* itu bisa berjalan dengan baik. ”

Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah

Apa yang bisa anda katakan kepada para pengamat ini? Iya sebagian memang mungkin begitu karena tidak paham. Nah itulah sebabnya kita terus perkuat lembaga legislatif ini karena tradisi berparlemen ini belum terlalu kuat di kita. Parlemen kita dulu pernah sangat aktif, orde lama terutama saat kita bereksperimen dengan sistem parlementarisme, demokrasi liberal dulu. Parlemennya aktif sekali, saking aktifnya dia menjatuhkan pemerintah setiap saat. Sejarah kita mencatat hal ini kan. Setelah itu orde baru, orang banyak mengkritik parlemennya dengan sebutan

4 D, datang, duduk, diam, dan duit.

DPR sekarang pasti bukan salah satu dari dua kelompok tadi? Pasca reformasi kita baru mulai berfikir bahwa bangsa ini perlu mempekuat parlemen. Orang yang tidak paham sering mengatakan buat apa mempekuat DPR tidak ada gunanya. Memang benar juga, DPR tidak ada gunanya kalau negara ini tidak ingin berdemokrasi. Karena kalau pemerintahan mau dikuatkan sendiri ya eksekutif bisa menjalankan semuanya, tidak perlu DPR.

Mahasiswa dan publik pada saat reformasi maunya negara demokrasi ya? Nah kalau mau negara demokrasi maka DPRnya harus ada dan kuat supaya proses *check and balances* diantara tiga pemangku kekuasaan - *trias politica* itu bisa berjalan dengan baik.

Jadi kalau para pengamat menyuarakan tidak perlu DPR berarti dia sedang mengusung negara otoriter ya? Iya kalau maunya otoriter ya DPR tidak perlu. Itu ada contohnya sekarang ini seperti negara di Asia Tengah ya, DPRnya embel-embel aja. Kayak kita di era masa lalu aja kan, anggota DPR diangkat presiden, anggota MPR juga diangkat presiden. Semua namanya dicoret-coret dulu sama presiden kemudian baru diajukan untuk ditetapkan. Sederhanakan.

Sebenarnya bisa tidak dikatakan kalau kerja DPR itu hanya soal image, bukan karena tidak kerja tapi image yang dibangun itu penting? Nah dulu itu memang ada asumsi yang dibangun dewan, yang berkembang pada saat itu, DPR tidak perlu image. Serahkan saja kepada masing-masing anggota dewan. Image dewan dianggap *image* dari 560 orang anggotanya, dengan fraksinya masing-masing. Nah sekarang kita tidak berfikir demikian, kita jangan terus membiarkan ma-





Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin Rapat Paripurna

syarakat salah paham terus dengan DPR. Kita akan memperbaiki itu, dimulai dari *image* itu.

Berarti sudah ada kesepakatan diantara fraksi-fraksi? Sudah ada, salah satunya dengan dibentuknya tim reformasi DPR, itu salah satu tugasnya. Sehingga nanti secara bertahap kita perbaiki mekanisme, komunikasi kepada publik. Kita sedang merintis juga, mendirikan semacam kantor pemberitaan di DPR, agar pola komunikasi meskipun dilakukan oleh aktor yang banyak tetapi selalu ada dalam paket pemahaman yang benar sehingga masyarakat juga menangkap makna kehadiran dewan itu secara baik.

Gambaran DPR ideal itu seperti apa ya? DPR itu menjadi ideal kalau dua sisinya menjadi kuat. Pertama sistem pendukungnya terdiri dari birokrasi dan *political appointee*-nya, infrastruktur fisik dan non-fisiknya, itu kuat. Karena di DPR ini ada elemen yang permanen, ada elemen yang temporer. Saya ini disebut elemen temporer karena politisi itu datang dan pergi, kalau dapat mandat rakyat maka dia datang kesini. Kalau tidak dapat mandat dia

tidak bisa ke sini, tidak punya kewenangan apa-apa.

Penguatan perlu prioritas dong, mana duluan? Elemen yang permanen itu sekarang jadi fokus kami supaya bisa diperkuat, sumber daya manusianya, sistem teknologi informasinya, kemudian sistem pendukungnya, perpustakaanannya. Kita melihat DPR sebagai heritage juga, karena gedung di sini ada yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Itu artinya masuk ke dalam cagar budaya, dan harus dijaga, agar memori publik, memori masyarakat, memori sejarah bisa terjaga. Ini yang kita perkuat sekarang. Membangun infrastruktur fisik dan nonfisik yang memungkinkannya sebagai institusi yang permanen.

Sisi nonpermanen bagaimana? Nah tentu ketika yang nonpermanen ini masuk DPR, dia harus *diback up* supaya kuat, sebab kita tidak bisa mengontrol pilihan rakyat. Yang punya kuasa mengontrol pilihan rakyat adalah bagaimana reformasi parpol dapat berjalan dengan baik. DPR tentu harus berupaya mendorong reformasi parpol melalui produk legislasi yang baik. Tapi be-

gitu dia menjadi anggota DPR dilantik di gedung ini, nah perlu kita olah dia dengan sistem pendukung yang kuat tadi dan pada akhirnya menjadi lebih baik.

Apa yang bisa dilakukan terutama pimpinan agar tidak terjadi kasus-kasus penyimpangan seperti masa lalu, seperti main mata dengan birokrasi? Kalau kita dalam posisi percaya pada birokrasi yang ada saat ini. Kita mencatat temuan BPK yaitu capaian audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sampai lima kali berturut-turut, itu jaminan bahwa proses birokrasi di dalam ini berjalan baik. Justru yang harus kita hindari di dalam ini adalah adanya pergeseran antara politisi dan birokrasi yang tidak proporsional. Itu yang perlu kita benahi, jangan sampai ada anggota dewan mencoba-coba, mengacak-acak fungsi dari Kuasa Pengguna Anggaran. Itu yang mesti kita hindari. Dan kami di pimpinan dewan sangat komit dalam menjaga itu, sehingga betul-betul Kuasa Pengguna Anggaran kita, birokrasi kita, bisa menjalankan proses itu tadi sesuai maksud dan tujuan awalnya. (iky) Foto: Andri/Parle/HR

DIPERMUDAH KEMAJUAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Fungsi pengawasan menjadi salah satu fungsi yang paling menonjol diantara ke dua fungsi DPR lainnya, yakni fungsi legislatif dan fungsi anggaran. Melalui fungsi ini, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun berbagai kebijakan Pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mengatakan, dalam kurun hampir setahun ini fungsi pengawasan DPR sudah berjalan cukup baik. Menu-

rutnya, saat ini sudah tidak ada sekat lagi dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif.

“Pimpinan DPR sudah menyampaikan kepada Pemerintah, DPR akan selalu mendukung kebijakan Pemerintah yang riil dan pro rakyat dan kepentingan nasional. Ini mesti kita dukung bersama-sama. Jangan diragukan lagi hal itu,” kata Taufik, saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, baru-baru ini.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Taufik memastikan DPR melakukan sikap kritis. Misalnya, terkait masalah penyerapan anggaran dalam APBN dan kondisi ekonomi nasional, sebagai Wakil Ketua DPR di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik berkali-kali mengingatkan Pemerintah soal permasalahan ekonomi saat ini.

“Pemerintah harus hati-hati. Sejak Februari lalu, kami sudah mengingatkan. Akan ada potensi terjadinya krisis jilid ke tiga. Manakala nilai tukar rupiah kita semakin terpuruk, dan fundamental ekonomi kita lemah,” jelas Politisi F-PAN itu.

“Ini kan bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah. Kita tidak bisa selalu

mengatakan ini diakibatkan pengaruh global. Tetapi kita tidak mawas diri terhadap sektor riil dan internal kita,” tegas Taufik.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Taufik menjelaskan pihaknya juga menjangkir aspirasi dari masyarakat. DPR membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun yang ingin mengadukan keluhan terkait kinerja Pemerintah lewat jalur formal maupun informal, sehingga, pengaduan dari masyarakat itu dapat segera ditindaklanjuti oleh DPR.

“Jika melalui jalur formal, aspirasi bisa disampaikan langsung kepada Anggota Dewan. Ketika masa reses, Anggota Dewan menjangkir aspirasi dari masyarakat di dapilnya. Misalnya menyangkut pembangunan di daerah, atau potensi penyimpangan di daerah, silahkan masyarakat menyampaikan kepada para wakil rakyatnya,” imbu politik asal Dapil Jawa Tengah ini.

Untuk penyampaian aspirasi melalui jalur informal, bisa disampaikan melalui berbagai media, seperti email, media sosial, SMS, atau telepon. Taufik menilai, kemajuan teknologi komunikasi ini sangat membantu DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Jika melalui jalur informal, kita syukuri teknologi komunikasi sudah semakin maju. Silahkan masyarakat sampaikan melalui media komunikasi. Pasti DPR melihat apa yang menjadi masukan masyarakat, baik dari jalur formal maupun non formal,” ujar Taufik.

Taufik memastikan, kehadiran kemajuan teknologi komunikasi ini mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR, sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR. (sf) Foto: Naefuroji/Parle/HR

Wakil Ketua DPR RI
Taufik Kurniawan



AWASI IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS



Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI juga membentuk Tim Pengawasan Otonomi Khusus (Otsus), yang bertugas memantau implementasi Undang-undang Otonomi Khusus. Saat ini, DPR membentuk Timwas Otsus untuk tiga daerah, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Timwas Otsus dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Ditemui di Gedung Nusantara III baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini mengatakan, selama ini Timwas Otsus sudah melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Daerah Papua Barat dan DI Yogyakarta. Namun, ia mengakui, belum melakukan pertemuan dengan Pimpinan Daerah secara langsung ketika kunjungan ke Aceh.

“Kami sudah melakukan kajian-kajian dan pengawasan untuk DI Yogyakarta, dengan bertemu langsung dengan Gubernur dan seluruh *stakeholder*. Untuk Papua, kita baru melakukan satu pertemuan dan diskusi di Papua Barat. Kami belum bisa ke Papua karena kita menunggu kondisi yang kondusif. Untuk kunjungan ke Aceh, sedang direncanakan masa sidang berikutnya,” jelas Fadli.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, untuk Aceh, pihaknya baru melakukan pemantauan terkait pengungsi Rohingya di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Pihaknya melihat berapa banyak jumlah pengungsi Rohingya, darimana datangnya, dan bagaimana sikap Indonesia kepada pengungsi Rohingya itu.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Sementara dari hasil kunjungan ke Papua Barat, Fadli mengatakan, hasil diskusi dengan pemerintah setempat dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh daerah tersebut dalam pelaksanaan UU Otsus di Papua Barat. Salah satunya masih kurang peraturan daerah khusus sebagai implementasi UU Otsus yang disebabkan belum adanya regulasi yang mengaturnya.

“Kurangnya regulasi peraturan daerah khusus tentunya dapat mengakibatkan pelaksanaan UU Otsus di Provinsi Papua Barat menjadi lambat. Masih ada sejumlah Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang belum jadi,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, lanjut Fadli, DPR RI akan memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat untuk duduk bersama membicarakan regulasi sebagai implementasi Otsus di Papua Barat. Selain itu, harapan dari pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat bahwa harus ada penambahan dana Otsus program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan harus pula dipikirkan.

“Anggaran untuk otsus Papua sudah cukup besar, justru yang perlu kita awasi adalah apakah anggaran ini sampai ke tempat yang tepat atau tidak? Kalau mengenai jumlah besaran nanti kita lihat dan kita kaji, tapi sejauh ini yang kita lihat banyak anggaran yang sudah disampaikan ke daerah itu dirasakan belum maksimal kepada tempat yang tepat,” papar Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Fadli berjanji, ke depannya, pihaknya akan semakin intensif dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Otsus. Jika memang ada permasalahan terkait UU-nya, maka pihaknya akan segera melakukan revisi. Selain Timwas Otsus, sebelumnya DPR juga pernah membentuk Timwas Haji, Timwas TKI, dan Timwas Century.

(sf) Foto: Andri/Parle/HR



MENGAWASI DEMI RAKYAT



Komisi, sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR, melakukan fungsi pengawasan kepada Pemerintah, terhadap pelaksanaan Undang-undang maupun implementasi program. Dalam menjalankan fungsi ini, Komisi dapat melakukan Rapat Kerja

dengan mitra kerja, maupun melakukan kunjungan spesifik atau kunjungan kerja. Berikut cuplikan fungsi pengawasan yang telah dilakukan Komisi, dalam kurun waktu hampir setahun ini, di mata Pimpinan Komisi.



Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais (F-PAN, Dapil DI Yogyakarta)

Komisi I menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja), yang juga dikaitkan dengan fungsi legislasi, yakni menyusun Undang-undang. Dengan adanya Panja ini, maka seluruh Anggota Komisi I akan melakukan pengawasan, baik pada Masa Persidangan maupun Masa Reses. Termasuk menyikapi beberapa hal yang sifatnya kontemporer.

Kami mengawasi Kementerian Luar Negeri, karena masih ada permasalahan perbatasan, buruh migran, maupun diplomasi. Kementerian Pertahanan, mengenai alutsista. Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait akan disusunnya UU Penyiaran, dan terakhir BIN, yang baru saja memilih Kepala yang baru. Keempat mitra kerja ini cukup menonjol, bahkan selalu menjadi sorotan. Pengawasan keempat mitra kerja ini lebih dominan. Dalam setahun ini, fungsi pengawasan oleh Komisi I sudah dilaksanakan secara maksimal.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria (F-Gerindra, Dapil Jabar III)

Hasil dari pengawasan Komisi II, masih banyak yang perlu ditingkatkan dari kinerja mitra Komisi II. Khususnya dalam persiapan Pilkada Serentak. Kami harapkan, kekurangan pada persiapan ini, dapat segera diperbaiki. Dan juga kita harapkan pelaksanaan Pilkada Serentak nanti, penyelenggara Pilkada dapat menyempurnakan berbagai tahapan dan proses dalam Pilkada Serentak ini. Ini merupakan momen penting, karena akan meningkatkan *grade* Indonesia dalam dimensi demokrasi Indonesia.

Kami juga terus melakukan pengawasan kepada mitra kerja, melalui kunspek atau kunker. Hasilnya sangat baik, karena kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Kedepannya, kami akan memperbanyak kerjasama dengan mitra kerja, dan memperketat pertemuan, sehingga banyak mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan. Kami juga akan menambah kunjungan ke daerah untuk memaksimalkan pengawasan.



Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (F-PDI Perjuangan, Dapil Sumut II)



Komisi III konsen dalam mengawasi aparat penegak hukum, dimana secara keseluruhan sudah cukup baik. Walaupun ada permasalahan yang agak mengganggu antara Kepolisian dengan KPK yang terjadi beberapa waktu lalu. Kami berharap keduanya dapat saling menghargai kinerja dan tupoksinya masing-masing. Setelah peristiwa itu, hubungan keduanya semakin baik.

Di luar itu, kami melihat Kepolisian sudah meningkat kinerjanya dalam memberantas korupsi. Begitu juga Kejaksaan Agung. Kami berharap kinerja kedua mitra kerja kami itu dapat mengimbangi kinerja KPK. Dalam menjalankan pengawasan daerah, kami masih melihat banyak permasalahan di daerah, terutama ketimpangan penegakan hukum antara pusat dan daerah yang berbeda.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam (F-PKB, Dapil Jatim VII)

Komisi IV dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah dilakukan melalui kunjungan spesifik maupun kunjungan kerja. Salah satunya memantau kinerja Bulog dalam penyerapan gabah. Kita temukan penyerapan gabah itu masih minim. Kita mendorong Pemerintah untuk menyerap gabah secara langsung dari petani, juga dari sentra-sentra pertanian.

Pengawasan komoditas sapi juga kami lakukan. Jika Pemerintah membuka ruang impor sapi hidup itu tidak bisa langsung di sembelih. Sebaiknya impor daging saja. Tapi impor dan operasi pasar harus dilakukan oleh Bulog. Bulog cukup mengambil keuntungan secara wajar. Sehingga, harga yang sampai di konsumen juga masih wajar.



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said (F-PG, Dapil Sulteng)

Komisi V setiap saat melakukan pengawasan terhadap mitra kerja, terutama serapan anggaran. Kami melihat, memang ada permasalahan di penyerapan anggaran mitra kerja kami, karena ada perubahan nomenklatur. Sampai saat ini yang menjadi sorotan kami adalah serapan anggaran di Kementerian Perhubungan.

Kami melihat kinerja mitra kerja kami semakin baik. Terkait arus mudik dan balik juga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan melalui kunspek dan kunker sangat efektif. Kami mengawasi pelaksanaan kinerja mitra kerja melalui kunspek dan kunker, dan di satu sisi banyak mendapat temuan di daerah, termasuk aspirasi dari masyarakat.

Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir (F-PAN, Dapil Sumsel I)

Sejak Panja Pengawasan Aset Negara di Komisi VI dibentuk pada periode lalu, dan dilanjutkan pada periode ini, semua aset negara sudah kita benahi. Kami telah melakukan pendataan aset negara yang diperjualbelikan atau area abu-abu. Hasil temuan, ada beberapa BUMN yang melaporkan aset tanahnya dimiliki pihak lain. Ini harus dibenahi.

Hasil pengawasan Komisi VI juga menemukan banyak anak perusahaan BUMN yang diperjualbelikan. Kami juga sedang mengawasi aset 'liquid', yakni aset yang mendatangkan keuntungan bagi negara, tidak perlu dijual. Kami juga sedang menyoroti kinerja Kementerian Perdagangan, yang mengurus ekspor impor.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha (F-PG, Dapil Jatim IX)



Salah satu bentuk pengawasan yang Komisi VII lakukan adalah mengamati ketersediaan BBM pada saat lebaran dan harga BBM yang berubah karena dari subsidi berganti menjadi subsidi langsung. Kami mengontrol bagaimana Pemerintah menghitung berapa harga BBM sebenarnya yang dibebankan kepada rakyat.

Kami juga mengawasi pelaksanaan UU Minerba, pada aktifitas pertambangan, baik batubara maupun mineral. Masalah yang kami lihat, terkait diizinkan atau tidaknya pertambangan mengeksport *raw mineral* atau tidak. Karena menurut UU, jika sampai akhir tahun 2014, maka tidak boleh ekspor *raw material*.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid (F-Gerindra, Dapil Jabar I)

Pengawasan Komisi VIII dilakukan melalui Rapat Kerja, maupun Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja, dan kunjungan spesifik dan kerja. Kami juga banyak menerima masukan dari masyarakat. Selama setahun ini, kami konsentrasi pada pelaksanaan haji, penjualan manusia dan kekerasan anak.

Selesai dari kunspek atau kunker, kami seperti memiliki amunisi baru, karena menemukan banyak permasalahan yang dapat kami sampaikan kepada mitra kerja. Banyak masalah di daerah, yang tidak kami temukan saat rapat dengan mitra kerja. Pengawasan kami juga melihat banyak permasalahan di seputar pelaksanaan haji.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena (F-PPP, Dapil NTB)

Saat ini, Komisi IX sedang fokus pada ketersediaan fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Kami sedang mencoba melihat hubungan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang tersedia. Dari pengamatan Komisi IX, masih diperlukan penambahan fasilitas kesehatan, oleh karena itu, kami mendesak pemerintah agar anggaran kesehatan dinaikan sampai 5 persen APBN.

Komisi IX juga sedang membentuk Panja BPJS untuk melakukan kajian secara paripurna tentang premi, pelaksanaan dan lain sebagainya. Komisi IX juga menyoroti ketenagakerjaan. Terkait dengan tenaga kerja luar negeri yang pulang ke tanah air, kami minta kepada pemerintah agar tidak membuka kantong-kantong pengangguran baru.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam (F-PG, Dapil Jatim V)

Komisi X kesulitan mengawasi perkembangan pendidikan karena anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN itu tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga. Seharusnya, pendidikan itu dipusatkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena penyelenggaraan pendidikan berada di bawah kementerian lain yang menjadi mitra kerja komisi lain di DPR, kami tidak bisa memantaunya.

Terkait sepakbolaan Indonesia yang akhirnya mendapat sanksi dari FIFA, Komisi X juga sudah memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan BOPI. Seharusnya, jika ada permasalahan di PSSI, cukup orang-orangnya saja yang dibenahi, bukan organisasinya yang dibubarkan. Kami juga menyoroti masalah ijazah palsu. Kami harap ini kedepannya tidak terjadi lagi.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan (F-PD, Dapil Lampung II)



Komisi XI melakukan rapat kerja dengan seluruh mitra kerja, untuk mengetahui bagaimana kinerja mitra kerja, minimal per triwulan sekali. Kalau ada isu strategis, kami melakukan kunjungan spesifik atau kunjungan kerja, untuk mengetahui bagaimana kondisi di daerah, selain tentunya mendengar dari pusat. Kami juga melihat laporan pemeriksaan BPK, temuan itu menjadi acuan kami untuk konfirmasi ke lembaga terkait.

Kunspek atau kunker itu sangat efektif dalam hal mendukung fungsi pengawasan. Kami jadi tahu kondisi real di lapangan, sehingga apa yang menjadi temuan di lapangan, segera kami sampaikan kepada mitra kerja terkait. (sf,sc) Foto: Iwan Armanias, Rizka, Nefuroji, Denus, Andri, Jaka/Parle/OD



DITUNTUT MENUJU MODERNISASI

Biro Persidangan, yang berada di bawah Deputi Persidangan dan KSAP Sekretariat Jenderal DPR RI, kini dituntut untuk lebih modern. Hal ini untuk mengimbangi ritme kegiatan Anggota Dewan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang bertransformasi menuju Parlemen Modern.

Kepala Biro Persidangan Setjen DPR RI, Helmizar, menyatakan, sebagai *supporting system* dari DPR, tentu pihaknya akan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Anggota Dewan dalam menjalankan kinerjanya. Dalam kurun waktu hampir 1 tahun Anggota Dewan periode 2014-2019 menjalankan tugasnya, Biro Persidangan turut ambil bagian dari suksesnya pelaksanaan proses persidangan.

“Tugas Sekretariat Jenderal DPR adalah *supporting system*. Khusus Biro Persidangan, memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat, mulai dari persiapan

rapat sampai dengan penyusunan risalahnya. Kedepannya, kami dituntut akan menjadi Parlemen yang modern, perubahan itu juga menyangkut nanti mengenai ketentuan terutama peraturan MD3 dan peraturan tata tertib yang akan mengalir menjadi perubahan di dalam proses pelaksanaan rapat-rapat,” papar Helmi, memulai perbincangan dengan Parlementaria.

Sebagai pendukung kegiatan Dewan, tentu merupakan tanggung jawab yang tak mudah. Selain dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tentu jumlah yang cukup banyak. Mengingat, jumlah Alat Kelengkapan Dewan yang juga tak sedikit.

“SDM yang ada di Biro Persidangan kurang lebih sekitar hampir 200 pegawai dengan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kalau dilihat, untuk 1 Komisi hanya 11 pegawai. Kedepannya, kita akan kekurangan pegawai karena juga pekerjaan Dewan akan lebih berat,

tentunya dituntut SDM yang lebih baik,” imbuhnya.

Helmi melihat, ada hal menarik sebagai pendukung Dewan, dengan adanya tenaga ahli, peneliti, legal drafter dan protokol dari Setjen DPR yang dimasukkan yang membantu tugas-tugasnya Kedewanan.

Terkait jadwal rapat AKD, jelas Helmi, tergantung daripada keputusan rapat Badan Musyawarah yang menentukan jadwal rapat dan masa reses. Dari keputusan rapat Bamus, Kepala Bagian di AKD harus segera membuat jadwal kerja AKD. Jadwal kerja AKD harus memuat tiga fungsi DPR, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan menjalankan dengan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja maupun rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat. Helmi menilai, ketiga fungsi ini sudah dijalankan melalui persidangan oleh Anggota Dewan dengan baik.

“Kedepannya, fungsi ini mungkin akan lebih baik lagi. Intensitas kunjungan kerja maupun kunjungan spesifik juga baik. Tentunya setiap AKD menemukan permasalahan di mitra kerjanya masing-masing,” imbuh Helmi.

Bicara kendala terkait fungsi Biro Persidangan, Helmi menilai hampir tidak ada kendala sama sekali. Jika pun ada kendala, hanya sebatas kendala di proses administrasi.

“Setiap kegiatan persidangan kadang-kadang serba mendadak, sehingga administrasinya menjadi agak terlambat. Namun itu tidak terlalu berpengaruh, dan sisi kinerja pun tidak ada perubahan sama sekali,” kata Helmi sembari menutup perbincangan. (sf) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



PEMBAHASAN ANGGARAN HARUS TEPAT WAKTU

Fungsi anggaran di DPR, menjadi salah satu fungsi yang disoroti publik. Dengan fungsi ini, DPR memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden. Tak dipungkiri, anggaran berbagai program yang menjadi kebijakan Pemerintah, harus melalui palu persetujuan DPR.

Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto, saat ditemui di Gedung Nusantara III, belum lama ini mengutarakan, setiap tahunnya pembahasan RAPBN sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang. Pos-pos mata ang-

garan juga sudah dibahas secara sistematis.

Agus menekankan, perencanaan dalam APBN yang diajukan harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Apalagi, hal ini yang menyangkut kebijakan nasional dan hajat hidup orang banyak. Tak bisa dielakkan, kadang pembahasan anggaran berjalan cukup alot dan memeras otak.

“Dalam pembahasan anggaran program pandangan dan pemikiran datang dari berbagai kalangan di DPR. DPR dari berbagai tingkatan yang membuat alot, tapi kami yakin, untuk RAPBN 2016 sudah selesai kemarin. Jika alot, namun sudah diketuk palu dan disepakati, berarti

harus diikuti dan dilaksanakan,” kata Agus.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, walaupun pembahasan cukup alot, namun harus selesai dalam jadwal yang sudah ditetapkan, dan tidak melebihi batas waktu. Walaupun tak dipungkiri, kadang masih ada kekurangan. Mengingat betapa kompleksnya pembahasan.

“Pembahasan pasti selalu ada kekurangan dan selalu ada perbaikan. Merupakan sesuatu hal yang wajar karena kompleksitasnya yang berbeda. Apalagi ini melibatkan seluruh Anggota Dewan dari berbagai komisi, kompleksitasnya berbeda dan perlu sinkronisasi. RAPBN yang sudah disetujui, dilaksanakan Pemerintah, dan pengawasan dilakukan DPR,” imbuh Agus.

Ketika Pemerintah menggunakan APBN, Agus memastikan hal itu tak luput dari pengawasan DPR. DPR mengawasi penggunaan anggaran untuk berbagai program itu melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan spesifik, hingga kunjungan kerja saat reses.

Agus menambahkan, pengawasan itu juga meliputi apakah alokasi anggaran itu sudah sesuai dengan programnya. Setiap Komisi DPR akan melihat, bagaimana alokasi anggaran dan program masing-masing mitra kerjanya. Untuk mendukung fungsi pengawasan, selain melakukan rapat kerja dengan mitra kerja, setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR juga melaksanakan kunjungan spesifik dan kunjungan kerja.

“Setiap reses, Komisi selalu melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran melalui Kunker. Pengawasan tidak hanya itu saja, tetapi sesuai tidak dengan programnya. Hasil kunspek atau kunker, akan dibahas

oleh masing-masing Komisi dengan mitra kerjanya. Namun pengawasan anggaran secara spesifik dan detail akan dilakukan oleh BPK. Pengawasan DPR sebatas bagaimana penyerapan anggaran sesuai dengan apa yang digariskan atau tidak,” papar Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Penyerapan Anggaran Melambat

Hasil pengawasan anggaran yang telah dilakukan DPR, dalam kurun waktu semester pertama 2015, Agus menarik kesimpulan, penyerapan anggaran Pemerintah banyak yang terlambat. Anggaran harus terlaksana sesuai dengan jadwal, jika tidak, maka berdampak banyak. Salah satunya berefek pada pertumbuhan ekonomi. Jika menghitung laju pertumbuhan ekonomi, maka belanja Pemerintah (*Government expenditure*) sangat diperlukan.

“Misalnya, implementasi proyek yang ada terganggu oleh proses lelang, ini termasuk penghambatan dari penyerapan. Kita harus mendorong masing-masing Kementerian untuk melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan apa yang sudah digariskan,” tegas Agus.

Agus mengapresiasi ide Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Kepres Percepatan Pembangunan, sehingga para Kepala Daerah tidak takut menggunakan anggaran. Pasalnya, selama ini ada ketakutan hingga anggaran tidak terserap. Jika program anggaran dilaksanakan secara betul, maka perlambatan penyerapan anggaran tidak akan separah ini.

“DPR menyambut dan mendukung kebijakan Presiden dalam percepatan penyerapan anggaran, tetapi para Menteri harus kerja, kerja, dan kerja seperti semboyan Presiden. Menteri jangan hanya pencitraan saja, yang pencitraan

cukup Presiden saja, menteri jangan,” tegas Agus.

Politisi yang pernah menjabat Ketua Komisi X DPR pada periode 2009-2014 ini menambahkan, Pemerintah sebaiknya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung kebijakan itu, sebaiknya dikurangi. Jika daya beli masyarakat tinggi, maka produksi masyarakat berjalan terus. Sebaliknya, jika daya beli masyarakat rendah, bisa berimbas ke PHK, UKM bangkrut, dan lainnya.

“Untuk perbaikan ekonomi, daya beli masyarakat harus dikuatkan. Caranya, jika yang tidak mempunyai uang diberikan subsidi. Contohnya seperti kebijakan Presiden SBY, yakni pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penguatan struktur, dan lainnya agar masyarakat mampu dalam membeli. Walaupun kebijakan ini tidak bisa dijalankan sampai puluhan tahun, namun dalam waktu yang pendek ini bisa dilaksanakan,” saran Agus.

Melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Agus cukup prihatin. Ia menilai, kondisi ekonomi sedang memasuki krisis, tetapi semua orang masih *happy* dan tenang. Kurs rupiah terhadap dolar AS semakin melemah, yang mengakibatkan devisa semakin tersedot.

“Saya sebenarnya sedih karena sudah lama sekali kurs rupiah masih di atas Rp 13 ribu terhadap dolar AS. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum bisa memberikan stimulan untuk meningkatkan dan mengimbangi nilai tukar rupiah untuk bisa *recovery* daripada dolar,” nilai Agus.

Kondisi ini juga dilihat Agus menjadi tolok ukur ekonomi yang paling jelas. Selama nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak bisa diendalikan, maka bisa dipastikan Indonesia berada dalam posisi krisis. (sf) Foto: Andri/Parle/HR



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto



DPR OPTIMALKAN POSTUR APBN

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Pemerintah, menjadi salah satu tugas DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran. Pembahasan APBN, dilaksanakan setiap tahunnya, ditambah dengan pembahasan APBN-Perubahan. Hampir setahun Anggota Dewan Periode 2014-2019 menjabat, DPR sudah membahas APBN-P 2015 dan RAPBN 2016 bersama Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Sekretariat Jenderal DPR RI, memiliki tugas untuk mendukung fungsi anggaran Anggota Dewan. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan fungsi anggaran, termasuk bagaimana bentuk dukungan Setjen DPR kepada Anggota Dewan, Parlementaria menemui Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, Satyanta Nugraha, atau yang akrab dipanggil Totok, di ruang kerjanya. Berikut cuplikannya;

DPR Periode 2014-2019 sudah berjalan hampir 1 tahun, bagaimana fungsi anggaran di awal periode ini?

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran. Dimana fungsi anggaran DPR dilaksanakan oleh Badan Anggaran. Saat ini Badan Anggaran beranggotakan 98 anggota yang merepresentasikan fraksi dan komisi.

Pada awal periode ini pelaksanaan fungsi anggaran telah dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Badan Anggaran DPR RI, yaitu pembahasan RUU APBN-P 2015. Dalam APBN-P 2015 itu, DPR memberikan ruang gerak bagi Pemerintahan Baru untuk dapat menjalankan visi dan misi yang telah disusun melalui program-program yang diprioritaskan dalam APBN-P 2015.

Bagaimana tahapan dalam proses pembahasan APBN di DPR?

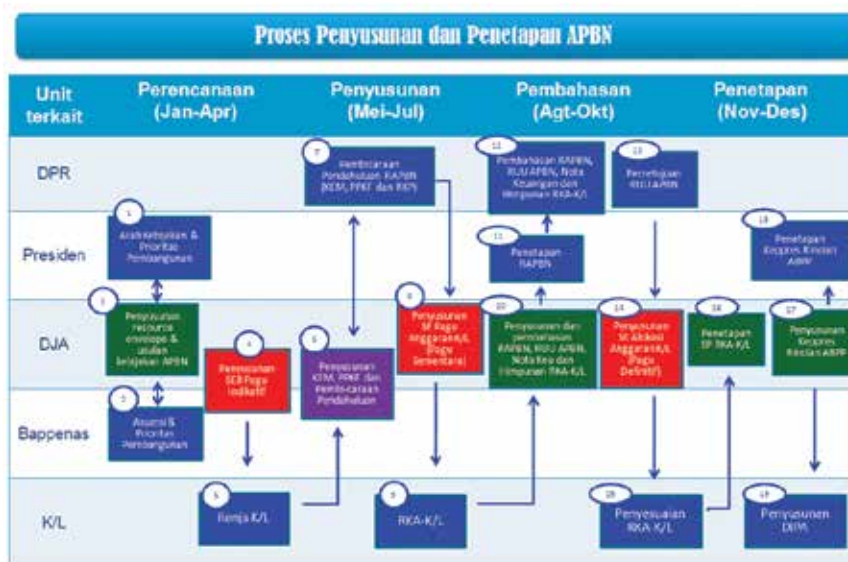
Proses pembahasan di DPR selalu berdasarkan Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Misalnya pembicaraan pendahuluan dimulai pada tanggal 20 Mei dan selesai selambat-lambatnya pada bulan Juli setiap tahunnya. Kemudian RUU APBN-P ketika perlu diajukan oleh Pemerintah karena ada faktor-faktor yang berubah, harus selesai dibahas selama satu bulan atau 30 hari sejak diajukan oleh Pemerintah.

Untuk RUU APBN sendiri diajukan pada pertengahan Agustus dan selesai dua bulan sebelum APBN dilaksanakan, artinya harus selesai paling lambat pada bulan Oktober. Dan yang terakhir RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN harus diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah BPK menyampaikan audit atas APBN tahun sebelumnya kepada DPR.

Artinya, pelaksanaan fungsi anggaran oleh Badan Anggaran (DPR) yaitu pembahasan siklus APBN (*time frame*) selalu berdasarkan UU. Yang menjadi kendala terkadang adalah jatuhnya masa sidang dan reses. Terkadang waktu pembahasan-pembahasan APBN itu terbentur oleh waktu masa sidang/masa reses sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal.

Bagaimana dinamika pembahasan APBN?

Dinamika dalam pembahasan APBN membutuhkan pemahaman untuk kepentingan bersama, dan dibutuhkan lobby khususnya di Badan Anggaran, karena materi yang besar dan banyak dengan rentan waktu yang terbatas terkait aspek kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Setjen DPR hanya *supporting system* setiap kegiatan yang dilaksanakan.



dari BAKN. Secara langsung Komisi menindak lanjuti dengan pasangan kerja. Unit *supporting system* bagian analisa hasil dari BPK DPD melakukan kajian, kutipan dari temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai bidang tugas di komisinya. Sehingga diberikan gambaran secara spesifik, apa yang terjadi dan menjadi temuan BPK. Untuk memudahkan dan membaca hasil temuan BPK.

Fungsi anggaran menjadi salah satu fungsi yang disoroti karena ada anggaran berpotensi korupsi. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini?

Postur APBN Indonesia sudah menggunakan GFS (Government Financial Statistic) yang sudah menjadi standar yang digunakan oleh banyak negara. Dalam postur ini terdiri dari Pendapatan, Belanja Negara, (above the line) dan Pembiayaan (below the line) dimana sebagai *line*-nya adalah surplus/defisit. Jika surplus artinya pendapatan lebih besar dari belanja, sedangkan defisit adalah sebaliknya.

Dalam sisi pendapatan, DPR berupaya untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan negara, misalnya seperti mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat peningkatan pendapatan negara.

Dalam sisi Belanja Negara, pernah dalam pembahasan ternyata Pemerintah memberikan subsidi listrik kepada perusahaan-perusahaan yang telah *Go-Public* yang seharusnya tidak perlu. Karena jika sudah *Go-Public* artinya perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar.

Perbedaan fungsi anggaran antara Periode 2014-2019 dengan periode-periode DPR sebelumnya seperti apa?

Periode yang baru ada perbedaan, sebelumnya ada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Namun kemudian BAKN dileburkan. Kewenangan Komisi dan BAKN sama, tetapi ketika ada hasil pemeriksaan BPK, pimpinan langsung menyampaikan kepada BAKN kemudian dilakukan telaahan. Hasil itu dilaporkan kepada komisi untuk ditindak lanjuti bersama pasangan kerja.

Berbeda dengan sekarang, hasil pemeriksaan BPK langsung diserahkan kepada komisi tidak melalui telaahan

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR selalu berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pembahasan anggaran di DPR itu selalu bersifat terbuka, jadi masyarakat atau siapapun yang ingin tahu mengenai proses pembahasan APBN dapat melihat langsung. Hasil-hasil pembahasan juga ada di *website* Pemerintah dan DPR sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi. Apalagi saat ini sudah merupakan era transparansi dan teknologi, tentu banyak cara masyarakat dapat mengawasi kinerja Dewan.

Proses pembahasan APBN terkadang tampak alot, karena banyaknya program yang perlu diakomodir. Apa saja pertimbangan Anggota Dewan menentukan program prioritas?

Setiap pembahasan RAPPN, DPR akan mengedepankan program-program utama atau prioritas Pemerintah yang tercantum dalam RKP dan RPJMN agar pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah dapat diwujudkan dan berkesinambungan selama lima tahun ke depan.

Bagaimana bentuk dukungan Deputi Anggaran dan Pengawasan, kepada kinerja Anggota Dewan?

Supporting system dalam perspektif Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran, kami memiliki unit Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. Biro ini memiliki dua bidang, yakni Bagian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara dan Bagian Analisa Hasil Pengusahaan BPK dan DPD. Biro Analisa menyediakan biro pendampingan. Jika dalam rapat kerja Komisi diperlukan data dan informasi terkait pembahasan, maka unit bisa segera menyediakan itu.

(sf) Foto: Jaka/Parle/HR



Ketua Badan Legislasi DPR RI Sarehwiyono

Dasar 1945 (UUD 1945),” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI Sarehwiyono kepada Parleментарia.

Dijelaskan Sareh, bahwa di dalam Pasal 20 huruf a UUD 1945, fungsi legislasi DPR disebutkan pertama kali sebelum fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. “Hal ini berarti fungsi legislasi merupakan fungsi yang teramat penting yang harus dikuatkan DPR,” tegasnya.

Menurut politisi dari Partai Demokrat ini, untuk meningkatkan fungsi legislasi DPR, keberadaan Badan legislasi (Baleg) menjadi cukup vital. Oleh karena itu, Baleg seharusnya diposisikan sebagai pusat pembentukan UU. Namun ironisnya, kata Sareh, kewenangan Baleg dalam Pasal 105 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) justru diamputasi dan dikurangi dalam melakukan penyusunan UU.

Saat ini sesuai UU MD3, terang Sareh, kewenangan penyusunan UU berada di masing-masing komisi. Pasal 105 ayat (1) huruf c, tugas Baleg yaitu melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep RUU yang diajukan anggota DPR, komisi atau gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Selanjutnya Pasal 105 ayat (1) huruf d, tugas Baleg yaitu memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan anggota DPR, komisi atau gabungan komisi di luar RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Artinya tugas Baleg sekarang ini benar-benar diamputasi dengan dikurangnya tugas Baleg untuk melakukan penyusunan RUU,” papar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Hal ini menyebabkan, lanjut Sareh, kinerja legislasi khususnya dalam mempersiapkan RUU tidak dapat diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas. Karena Baleg tidak dapat mengambil alih penugasan yang telah diberikan kepada masing-masing komisi yang tidak selesai dalam melakukan penyusunan RUU yang ditetapkan.

Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi DPR dalam mencapai target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 sebagaimana disampaikan Sareh kepada Parleментарia, antara lain :

Satu, Naskah Akademik (NA) dan draft RUU sebagai syarat utama suatu RUU masuk dalam Prolegnas, be-

PERAN BADAN LEGISLASI TERAMPUTASI

Rendahnya produk Undang-Undang (UU) yang dihasilkan DPR, tidak berarti serta merta kinerja dewan di bidang legislasi dapat dinilai buruk. Perlu dipahami bahwa dalam menjalankan fungsi legislasi dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu DPR dan Presiden. Dengan begitu, minimnya capaian legislasi tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan DPR semata, Presiden dalam hal ini pemerintah juga memegang peran dalam pembentukan UU pun patut bertanggungjawab.

“Dalam membentuk UU, DPR tidak sendiri sebab ada peran pemerintah yang cukup signifikan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang

lum secara riil ada saat penyusunan dan penetapan Prolegnas. “Karena setelah Prolegnas ditetapkan tidak serta merta komisi menyampaikan NA dan draft RUU ke Baleg untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi,” ungkapnya.

Kedua, Baleg yang memiliki peran signifikan dalam penyiapan RUU menjadi RUU usul DPR pada periode 2009-2014, pada periode 2014-2019 ini tidak lagi memiliki tugas dalam penyiapan RUU. Hal ini berpengaruh terhadap percepatan jumlah RUU yang penyiapannya menjadi tanggungjawab DPR.

Ketiga, jumlah hari legislasi yang ditentukan 2 (dua) hari dalam satu minggu, sering kali tidak mencukupi atau tidak dipatuhi/ditaati.

Keempat, penambahan waktu reses dari empat menjadi lima kali mengurangi/menyita waktu rapat-rapat di DPR termasuk dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU.

Kelima, kunjungan kerja yang tidak simultan ke daerah-daerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia untuk mengadakan Rapat Panja.

Keenam, penyelesaian tahap penyusunan dan penyampaian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pembahasan bersama tidak berjalan dengan baik. “Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih kurang,” jelas Sareh.

Ketujuh, dalam penyusunan RUU, Baleg kerap menunggu draft RUU dari komisi-komisi. Karena tugas Baleg adalah melakukan harmonisasi yang diajukan anggota atau komisi-komisi.

Dalam satu tahun sidang ini, ungkap Sareh, Baleg telah mengharmonisasi 5 RUU dimana 2 RUU diantaranya sudah ditetapkan menjadi UU di Rapat Paripurna DPR RI. Sementara 6 RUU masih dalam proses pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep di Baleg.

“Jika fungsi legislasi tetap diserahkan ke komisi-komisi, target legislasi akan sulit tercapai. Karena sampai saat ini, komisi-komisi lebih mengutamakan fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi,” ungkap Sareh.

Sareh mengaku, untuk meningkatkan capaian DPR di bidang legislasi ini, dirinya bersama pimpinan Baleg lainnya telah mengusulkan kepada Pimpinan DPR untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2014 khusus Pasal 105 untuk mengembalikan tugas dan fungsi Baleg

dalam penyusunan RUU, atau setidaknya segera melakukan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI Pasal 65 tentang tugas Badan Legislasi. “Revisi ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi dengan Pasal 46 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 4 dan Pasal 8.

Selanjutnya kepada Parlementaria, Sareh menyatakan, beban legislasi 39 RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 cukup berat mengingat waktu yang sudah memasuki bulan kedelapan di tahun 2015. “Namun kami harus tetap optimis, dengan dukungan semua pihak kinerja legislasi dapat mencapai target yang diharapkan. Dan sebagaimana amanat konstitusi, UU yang dihasilkan nantinya berkualitas dan pro rakyat,” tegas Sareh mengakhiri.

KEMBALIKAN POSISI BALEG SEBAGAI SENTRAL PEMBAHASAN UU

Senada dengan Sareh, Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menyatakan bahwa salah satu penyebab utama lambannya penyusunan RUU di DPR adalah karena Badan Legislasi tidak diposisikan sebagai sentralnya pembahasan RUU.



Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo

Padahal, kata Firman, Baleg merupakan ulung hatinya negara. Karena tata kelola pemerintahan, tata kelola negara berdasarkan konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. UU diproses dan dibahas dengan *output* dan cara yang salah, pelaksanaannya juga akan amburadul. Sebagai ulung hati negara, mestinya Badan Legislasi diperkuat.

Ia menjelaskan, sebetulnya pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Baleg diberikan otoritas dalam penyusunan RUU. Namun pada UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI di-anulir bahwa penyusunan RUU tidak lagi menjadi otoritas Baleg, tapi pada Komisi-komisi.

“Harusnya kita mengacu hanya pada satu UU saja. Ketika DPR juga mengatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib, dan peraturan lainnya, ini yang menjadi masalah. Hal ini menimbulkan implikasi overlapping antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain,” tegas Firman.

Penyebab lainnya, lanjut Firman, pasca reformasi RUU harus dibahas DPR bersama Presiden. Artinya UU tidak serta merta menjadi otoritas absolutnya DPR. “Sampai detik ini rakyat tidak pernah tahu, bahwa RUU juga menjadi otoritas Presiden,” ungkapinya.

“Penyebab lainnya, lanjut Firman, pasca reformasi RUU harus dibahas DPR bersama Presiden. Artinya UU tidak serta merta menjadi otoritas absolutnya DPR. “Sampai detik ini rakyat tidak pernah tahu, bahwa RUU juga menjadi otoritas Presiden,” ungkapinya.”

Kemudian tambah Firman, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan DPD RI, akhirnya DPD juga diberikan otoritas yang sama. Artinya jika diukur sistem pembahasan RUU di jaman era orde baru dengan sekarang jauh berbeda, tingkat kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Karena sekarang ini ada tiga lembaga negara yang harus bersama-sama membahas RUU menjadi sebuah UU, dan tidak hanya pembahasan tetapi termasuk didalam perencanaan prolegnasnya.

“Posisi-posisi ini semakin menambah jenjang proses yang cukup panjang, apalagi DPR sekarang harus mereformasi, artinya bagaimana meningkatkan terhadap proses pembahasan RUU agar bisa lebih cepat dan lebih baik. Namun yang terjadi, ketika DPR mere-

formasi dirinya justru yang terjadi ada regulasi yang membelenggu diri sendiri,” terang politisi dari Partai Golkar ini.

Dijelaskan Firman, jika semua penyusunan UU diserahkan kepada mekanisme di komisi, sementara komisi ini plotnya terlampau berat dalam kurun waktu yang relatif pendek. Ditambah lagi dengan masa reses yang setiap tahunnya cukup padat. Ini merupakan tugas yang tidak bisa diabaikan karena amanat konstitusi, bahwa anggota dewan juga harus menyerap aspirasi masyarakat, mewujudkan hak-hak masyarakat yang diatur UU, juga dalam sumpah jabatan, dan fungsi pengawasan yang tentunya tidak bisa dibelakangi dan harus terjun langsung ke lapangan.

Ini semua akan menyita waktu daripada komisi, apalagi komisi juga dibebani dengan penyusunan naskah akademis, itu akan menjadi problem besar. Karena menyelesaikan dua tugas pokok terkait anggaran dan pengawasan saja sudah banyak memakan waktu.

“Hampir sebagian besar anggota dewan yang duduk di komisi-komisi yang konsern terhadap masalah RUU tidak banyak, karena membahas RUU memang satu tugas yang wajib dilaksanakan, dilakukan, namun pembahasan RUU ini memang menjenuhkan karena kita bicara dengan masalah perdebatan substansi hukum, bahasa, dan sebagainya. Pembahasan memang tidak sederhana itu,” papar anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.

Untuk mempercepat penyusunan RUU di DPR, Firman menegaskan harus ada terobosan baru, antara lain :

Satu, kembalikan lagi posisi penyusunan RUU kepada Badan Legislasi. “Jika penyusunan ditarik kembali, saya rasa akan meringankan teman-teman di komisi, agar teman-teman komisi ketika membahas atau mendapat penugasan sudah ada Naskah Akademis (NA) dan draft RUU yang siap untuk dibahas.

Kedua, untuk penyusunan NA dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kerjasama ini adalah kerjasama antar lembaga dan perguruan tinggi. “Rektor bertanggungjawab di situ, karena UU menjadi satu hal penting. UU menjadi landasan operasional payung hukum tata kelola pemerintahan, ketika UU ini salah didalam penyusunan NA dan draft RUU-nya dan kemudian pembahasannya juga salah, maka tata kelola pemerintahan juga akan amburadul,” terang Firman.

Oleh karena itu, menurutnya, transparansi kerjasama dengan perguruan tinggi harus betul-betul dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena ada konsekuensi biaya yaitu APBN yang dipertanggungjawabkan secara bersama-sama.

Ketiga, didalam penyusunan NA Sekretariat jenderal DPR RI harus membuka wacana atau menerima kondisi-kondisi yang sekarang ini. “Jangan sampai penyusunan NA menjadi obyek kepentingan-kepentingan proyek tertentu di dalam internal DPR”, tegasnya.

Keempat, pemerintah akan diminta ketegasannya dan diharapkan pemerintah konsisten dalam masalah ini.

“Sejak awal kami menyusun Prolegnas, saya sebagai pimpinan panja ketika itu, dengan tegas meminta bahwa untuk RUU yang akan dibahas dan masuk dalam prolegnas baik prolegnas jangka menengah maupun prolegnas 2015-2019, NA dan draft RUUnya harus disiapkan secara matang,” terang Firman.

Namun faktanya, kata Firman lagi, sampai hari ini pemerintah juga tidak siap dan pemerintah mengatakan terakhir rapat dengan Menkumham katanya sudah siap. “Sampai sekarang untuk revisi UU KUHP saja belum siap semuanya. Penyebab ketidaksiapannya ini berbagai macam, apakah mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengajukan merevisi RUU menjadi sebuah UU atau ini hanya untuk mencoba,” imbuhnya.

Kelima, pemerintah dalam hal ini presiden diminta untuk mengkoordinasikan dengan serius terhadap sebuah RUU yang memiliki skala Prolegnas jangka menengah 2015.

“Jangan sampai hal ini terbentur dengan dua masalah yaitu waktu karena masa jabatan dan *budgeting* (anggaran). Jangan pula pemerintah tiba-tiba ditengah jalan merubah seenaknya sendiri,” paparnya.

Dijelaskan Firman, selama ini yang terjadi adalah pemerintah inkonsistensi. RUU yang masuk dalam prolegnas, karena pemerintah tidak siap tiba-tiba ditengah jalan karena ada pemikiran baru. Artinya pemerintah didalam skala persiapan untuk menyusun sebuah RUU menjadi UU dan disampaikan kepada DPR ini tidak siap dan tidak serius 100%.



Rapat Pleno Baleg DPR RI

“Tidak ada keseriusan, dan faktanya hari ini seperti itu. Yang sudah masuk juga tidak disiapkan, bahkan pemerintah mengusulkan mengajukan UU yang baru,” ungkapnya.

Keenam, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI harus bekerja lebih profesional. “P3DI harus tahu arah pembangunan kedepannya itu seperti apa, sehingga dia bisa mempersiapkan UU yang perlu dibahas sesuai visi dan misi presiden,” tukasnya.

Sebagaimana yang diungkapkan Sareh, Firman juga menyatakan pernah mengusulkan kepada Pimpinan Dewan agar UU MD3 di revisi, namun ada kekhawatiran jika UU MD3 direvisi akan melebar kemana-mana. Sebetulnya, pungkas Firman, tidak perlu khawatir. Karena kita harus melihat dan hanya berbicara untuk kepentingan kinerja dewan.

“Selama ini DPR sudah dievaluasi publik, bahwa salah satu kinerja dewan yang paling mudah terukur itu adalah legislasi. Karena legislasi di setiap pembukaan maupun penutupan sidang paripurna selalu diumumkan dan ini juga dipublik. Ini tentunya yang harus jadi perhatian kita,” papar Firman.

“Oleh karena itu kita, saya berharap secara bersama-sama untuk berfikir secara jernih kedepan kalau ini adalah kepentingan bersama bukan kepentingan kelompok dan menjadi tanggungjawab bersama termasuk masyarakat karena prinsip-prinsip dalam pembahasan RUU yang diamanatkan dalam UU ini harus transparansi, kualitas UU harus dikedepankan dan kemudian prioritas UU mana yang harus dibahas,” tambahnya mengakhiri. (sc)

Foto: Iwan Armanias, Naefuroji, Nita/Parle/HR



DIPLOMASI KELAS DUNIA PARA WAKIL RAKYAT

Sidang *Parliamentary Even on MDGs Acceleration and the Post-2015 Development Agenda* di Surabaya, Jawa Timur menjadi kesempatan pertama bagi anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Mohamad Hekal. Baginya interaksi P to P, *Parliament to Parliament* atau biasa juga dikenal sebagai *second track diplomacy* cukup ampuh sebagai upaya mendorong kerja sama antar bangsa dalam mendorong asa bersama mencapai kesejahteraan rakyat.

“Setelah menjadi anggota DPR dan mengikuti sejumlah pertemuan parlemen seperti *Even on MDGs*, Konferensi antar Anggota Parlemen

Muda Dunia saya merasa pertemuan tersebut positif. Paling tidak muncul kesepahaman yang kemudian bermuara pada rekomendasi kepada pemerintah masing-masing, bisa juga menjadi input bagi revisi UU atau bahkan inisiatif bagi pem-



Anggota BKSAP DPR Mohamad Hekal

buatan RUU,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jateng IX ini, saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Diplomasi parlemen yang dilakukan DPR adalah amanat UU MD3, pasal 69 (2) secara eksplisit menjelaskan salah satu fungsi DPR mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Amanat ini juga tersua dalam Tata Tertib DPR Bab II Pasal 4 ayat (2). Dalam menjalankan diplomasi parlemen dibentuklah Alat Kelengkapan Dewan yakni BKSAP yang mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara

DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menyebut ruang diplomasi itu tidak saja sebatas dengan sesama anggota parlemen. “Kami membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi nonpemerintah dari mancanegara. Yang terbaru misalnya saya sebagai Ketua BKSAP menerima kunjungan Universitas Guangdong Tiongkok yang dipimpin oleh Wakil Rektor Yang Aimin pada tanggal 27 Mei 2015. Dalam *courtesy call* tersebut, Universitas Guangdong meminta bantuan kepada saya untuk menjembatani kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia. Saya kira tawaran ini bagus sekali untuk membentuk dan menggembleg SDM Indonesia. Saya juga sering diundang sebagai pembicara di OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development* adalah organisasi internasional yang dibentuk pada 1960 oleh negara-negara Eropa dan Amerika, red) tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya pikir ini kepercayaan orang dan lembaga asing kepada kita sebagai representasi rakyat guna membangun jembatan kerjasama antara pelbagai pemangku kepentingan kita dan pihak luar,” tekan dia.

DPR menurutnya telah berhasil menorehkan sejumlah keberhasilan dalam konteks organisasi parlemen regional dan dunia. Nurhayati Ali Assegaf misalnya pernah menduduki *member of the Executive Committee* serta *President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians* di IPU. Begitu pula, Ketua DPR RI 2009–2014 Marzuki Alie pernah menjabat *President of SEAPAC*, *President of APA*, serta *President of AIPA*. Di IPU,



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Sekjen PBB

rekan-rekan anggota DPR pernah menduduki jabatan penting seperti Tantowi Yahya yang menjadi *Member of the Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn, and Child Health*; Arif Budimanta yang menduduki *Member of the Standing Committee on United Nations Affairs*; Herlini Amran diberi amanat sebagai *Member of the Committee on Middle East Questions*.

“Terpilihnya anggota DPR, menunjukkan bangsa Indonesia mampu menjalankan diplomasi parlemen di kancah global. Kita harus mendukung setiap upaya perjuangan anak bangsa yang ingin menduduki jabatan di pelbagai organisasi internasional. Saya perlu tekankan, ini adalah salah satu wujud kesuk-

sesan diplomasi DPR jika anggota-anggotanya sukses di forum internasional,” papar Nurhayati. Dalam peringatan KAA beberapa waktu lalu, DPR RI mengelat Konferensi Parlemen Asia-Afrika yang dihadiri 34 negara terdiri dari 31 parlemen dan 3 perwakilan. Ini menurutnya prestasi membanggakan DPR RI dan bangsa Indonesia secara keseluruhan karena konferensi parlemen Asia-Afrika baru digelar pertama kali dalam sejarah peringatan KAA.

Hasil Konkrit

Bagi Hekal politisi Fraksi Partai Gerindra ini setiap kegiatan diplomasi parlemen bisa dipastikan akan disampaikan kepada pemerintah. Sebagai contoh menurutnya dalam



President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians, IPU Nurhayati Ali Assegaf memimpin sidang

konferensi parlemen internasional yang diikuti anggota DPR biasanya akan menghasilkan dokumen yang sifatnya pernyataan, deklarasi, kesepakatan atau kesepakatan. Hasil tersebut menurutnya akan dilaporkan kepada pimpinan dewan yang kemudian meneruskannya kepada pemerintah dalam hal ini bisa saja kementerian terkait. “Bisa saja *outcome* tersebut disampaikan secara langsung dalam rapat kerja dengan kementerian terkait dan kemudian menjadi bagian dari kesimpulan rapat. Pada kondisi tertentu bisa saja DPR mendorong revisi terhadap UU atau mendorong lahirnya produk legislasi terkait,” jelas Hekal.

DPR RI, dalam diplomasinya yang terentang panjang, bekerja agar apa yang telah disepakati dalam forum internasional diratifikasi

menjadi sebuah produk peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi pokok DPR RI yakni legislasi. Beberapa diantaranya DPR RI meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan “*Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women*”(CEDAW) melalui UU Nomor 7/ 1984. Melalui UU Nomor 5/ 1998 DPR RI meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT); Melalui UU Nomor 29/ 1999, DPR RI meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD); DPR RI juga meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU Nomor 12/ 2005; Kov-

enan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pun diratifikasi oleh DPR RI melalui UU Nomor 11 /2005. Apa yang saya sebutkan di atas adalah produk ratifikasi perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan perempuan.

Di kawasan, DPR RI mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk terus memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Salah satu upaya tersebut adalah melalui ratifikasi Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir atau *the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)* melalui UU Nomor 1/ 2012; Tidak hanya itu, DPR RI meratifikasi Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau *the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* melalui UU No. 5/2012.

Pada bagian lain Nurhayati Ali Assegaf memaparkan pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang mengundangnya selaku Ketua Panja MDGs/SDGs DPR RI. Dalam rapat terbatas tersebut ia menyampaikan terdapat draf mengenai keterlibatan parlemen dalam zero-draft UN Summit 2015—agenda KTT Dunia yang akan berlangsung pada September 2015 mendatang yang akan mengadopsi Tujuan Pembangunan Baru Pasca-2015. Dalam draf awal tersebut, keterlibatan parlemen ditekankan berkali-kali di beberapa bagian hingga empat paragraf yang pada intinya agar pemerintah membangun kolaborasi bersama dengan parlemen untuk kesuksesan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Saya tekankan juga kepada Bappenas bahwa apa yang tersua dalam zero-draft secara eksplisit memberi mandat kepada parlemen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring SDGs,” ujar politisi FP Demokrat ini.

Diplomasi DPR Ke Depan

Untuk pengembangan diplomasi parlemen ke depan, BKSAP mempunyai agenda untuk mempererat dan memperluas grup kerja sama bilateral untuk mempererat hubungan,

“ Dengan jadwal yang super padat, anggota DPR yang menjalankan fungsi diplomasi perlu penguatan kapasitas dan dukungan memadai dari seluruh staf, sekretariat, dan tenaga ahli. Untuk optimalisasi diplomasi parlemen, perlu penguatan sistem pendukung parlemen untuk diplomasi parlemen yang efektif. ”

tidak saja dari parlemen ke parlemen, tapi juga membantu diplomasi pemerintah. Hubungan internasional antarparlemen dunia mempunyai *rule of the law* dan *rule of the game* tersendiri. Selain itu, agenda internasional tidak sama dengan agenda nasional DPR. Dengan jadwal yang super padat, anggota DPR yang menjalankan fungsi diplomasi perlu penguatan kapasitas dan dukungan memadai dari seluruh staf, sekretariat, dan tenaga ahli. Untuk optimalisasi diplomasi parlemen,

perlu penguatan sistem pendukung parlemen untuk diplomasi parlemen yang efektif. Penguatan kapasitas tenaga ahli dan sekretariat parlemen menjadi krusial untuk mendukung para legislator dalam pembuatan produk-produk hukum yang terkait dengan diplomasi Indonesia.

“Ketika ditetapkan sebagai Ketua BKSAP, saya bertekad akan mengembangkan diplomasi parlemen dengan rajin menjemput bola. Artinya, BKSAP harus rajin membangun kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk kepentingan nasional. Ini yang saya sebut penjabaran dari garis politik yang dianut Indonesia, yaitu bebas aktif. Saya mempunyai visi ke depan, dengan semakin terbukanya peluang DPR untuk mendukung politik luar negeri yang dilakukan pemerintah, menjadi ideal bila kemudian aktivitas internasional DPR memperoleh peran signifikan dalam konteks hubungan luar negeri. Saya kira konsep diplomasi parlemen ke depan jangan lagi hanya dipandang dalam konsep “pelengkap” semata. Idealnya, menurut saya, wakil dari DPR, baik secara proporsional atau profesional dilibatkan dalam beragam agenda-agenda internasional pemerintah,” kata Ketua BKSAP.

Satu hal menggelitik disampaikan Mohamad Hekal pada bagian akhir wawancara. Ia menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruangan pertemuan BKSAP yang menurutnya jauh dari memadai untuk menerima sejumlah tamu asing yang datang berkunjung ke DPR. “Iya ini mungkin kelihatan sederhana tetapi penting ya, kita perlu ruangan yang representatif, yang layak untuk menerima tamu asing. Karena di situ para wakil rakyat membangun komunikasi, diplomasi mewakili kepentingan bangsanya,” tutup dia. (iky/bksap) Foto: Iwan Armanias, Dok BKSAP/Parle/IKY



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota BKSAP Mohamad Hekal

Hansard dan Bill Digest

Sumber Evaluasi Kinerja DPR

Pandangan masyarakat terhadap lembaga DPR selalu negatif bila sumber data dari media massa dan sosial media. Sementara itu Anggota DPR cenderung takut dengan pandangan media. Kebebasan Pers merupakan hasil dari perubahan regime politik pada tahun 1998. Anggota DPR baik secara kelembagaan (partai politik) maupun individu menganggap bahwa media adalah partner DPR. Pandangan ini tidak tepat. Media memiliki tanggung jawab untuk menulis apa yang terjadi dalam proses politik. Media tidak bertanggung jawab harus menulis negatif atau menulis positif. Media dan DPR memiliki fungsi yang berbeda dalam demokrasi.

Berita putusan DPR tentang Dana Aspirasi menjadi bagian yang negatif dari kinerja DPR. Padahal di banyak negara dana aspirasi dapat menjadi bagian positif bagi konstituen di Dapil melalui *Constituency Development Fund*. Program ini bertujuan untuk agar ada program yang efektif di dalam pemerintah yang korup; bypass birokratisasi; memberdayakan legislatif dengan memberi kewenangan untuk mengalokasikan anggaran secara independen dari eksekutif; dan memberikan kewenangan Anggota Dewan untuk merespons kepentingan konstituen yang wilayahnya berbeda antara wilayah administrasi pemerintahan dengan Daerah Pemilihan. Namun, media dan publik langsung memberikan kritik tanpa secara jelas tanpa membaca doku-

men putusan DPR? Bagaimana kita harus menilai kinerja DPR secara lebih obyektif?

Sumber: hasil studi CEPP FISIP UI dalam media analisis untuk 7 media nasional.



Tugas dan Fungsi Anggota DPR

Tugas dan fungsi DPR adalah sangat kompleks, bahkan ada keharusan untuk sesuai dengan ekspektasi publik. Peran dan tugas DPR harus sesuai dengan yang termaktub dalam konstitusi. Untuk mengukur kinerja harus dilihat dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budget.

Anggota DPR mewakili Partai dan Dapil

Setiap Anggota DPR mewakili Daerah Pemilihan, yang harga kursinya bervariasi dari puluhan ribu atau mencapai BPP yang satu kursinya untuk daerah Jawa mencapai 230 ribuan. Sementara dilihat dari penduduk yang diwakili sangat bervariasi. Untuk Provinsi hasil peme-

karan langsung wakilnya minimum 3 kursi walaupun sesungguhnya secara penduduk dan jumlah pemilihnya kurang dari 3 kursi. Sementara untuk Papua yang jumlah penduduk relatif sedikit (2 jutaan), namun wakil di DPRnya cukup besar yaitu 13 kursi. Keterwakilan DPR dengan model daerah pemilihan yang dirancang sesuai dengan UU no 12 tahun 2003 oleh KPU pada pemilu 2004 ini, menggunakan prinsip *one vote one person one value*. Dengan menggunakan prinsip ini maka daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak akan memiliki wakil di DPR lebih banyak pula. Namun, masih ada tindakan khusus untuk daerah provinsi baru dan daerah Papua, walaupun penduduknya sedikit namun tetap memiliki wakil yang cukup banyak. Anggota DPR dipilih melalui pemilu yang mewakili partai politik dari Daerah Pemilihan dengan sistem proporsional multi member district dengan jumlah kursi 3-10 kursi pada Pemilu 2014.

Wilayah keterwakilan ini adalah Provinsi, atau gabungan Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap wakil dari dapil tersebut berkonsultasi ketika pembuatan kebijakan politik yang berpengaruh terhadap rakyat di dapil itu. Anggota DPR harus responsif terhadap kepentingan dapil, memberikan pelayanan kepada konstituen dalam tugas-tugas legislasi, pengawasan dan budget.

Mengevaluasi kinerja Anggota Dewan tidak dapat dilihat secara

umum saja. Ada 10 Fraksi atau Partai Politik, ada 560 Anggota DPR. Tanggung jawab ke Dapil merupakan tanggung jawab individu dan tanggung jawab Partai Politik. Bahkan Pimpinan DPR sesungguhnya tidak memiliki kewenangan penuh menentukan hasil akhir dari musyawarah para Anggota DPR.

Untuk dapat mengevaluasi kinerja DPR harus pula dilihat sejauh mana dukungan birokrasi agar proses pekerjaan DPR dapat diakses oleh publik secara meluas. Sejauh mana Sekretariat jendral DPR RI sebagai birokrasi pendukung kinerja DPR dapat bekerja? Konsep Parlemen modern mensyaratkan penggunaan teknologi agar publik dapat mengakses proses kebijakan DPR dengan mudah dan rekam jejak yang juga dapat diakses melalui Hansard dan Bill Digest. Dengan menggunakan sumber dokumen tersebut, maka publik akan dengan mudah mengukur kinerja DPR secara lebih obyektif. Sayangnya DPR dan Sekjen tidak memiliki *hansard* dan *bill digest* seperti yang ada di Parlemen modern.

Fungsi Legislasi

Salah satu ukuran yang sering digunakan oleh publik adalah berapa jumlah UU yang dihasilkan oleh DPR. Bagi ilmuwan politik, jumlah UU yang berhasil diselesaikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlahnya saja, namun Undang-undang apa? Ideologinya bagaimana? Pro rakyat atau pro kapitalis, memikirkan ke-

pentingan nasionalis atau menjadi broker kepentingan negara asing, pro perempuan atau diskriminasi terhadap perempuan atau terjadi transaksi bahkan pasal satu dengan pasal lainnya saling bertabrakan dan pada akhirnya melanggar konstitusi.

Dalam satu tahun jabatan menjadi Anggota DPR, publik dapat mengevaluasi bagaimana para Anggota DPR bekerja pada tahun pertama. Menentukan prolegnas pada tanggal 9 Februari 2015, dengan prioritas 37 RUU yang akan dibahas pada tahun 2015. Dari informasi yang ada, masih terdapat 2 yang belum ada naskah akademik dan Draft UU, yaitu RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan revisi atas UU no 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam 6 bulan setelah diputuskan Prolegnas tersebut, dari ke 37 RUU tersebut belum ada satu pun yang diselesaikan oleh DPR RI.

Apakah kemudian dapat disimpulkan bahwa kinerja DPR buruk? Media komersial akan menulis negatif dari kesimpulan tersebut. Bagaimana publik dapat menyatakan positif terhadap kinerja DPR bila publik tidak dapat mengakses tentang apa yang sudah, sedang dan akan dikerjakan oleh DPR? Sementara yang dilakukan oleh DPR adalah revisi terhadap UU.

Ada dua model keterwakilan yaitu delegasi (*delegate style*, merespons kepentingan dapilnya sebagai kon-

stituen) dan *trustee style* (bertindak sebagai wali dari dapilnya). Dalam praktiknya seringkali para anggota Dewan tidak terlalu memperhatikan kepentingan Dapilnya, namun tergantung kepada kekuatan politik lain seperti tuntutan LSM, Ormas dan tekanan melalui media yang seringkali kontradiksi dengan kepentingan konstituen.

Sumber penilaian kinerja DPR

Untuk dapat menilai kinerja DPR secara obyektif menggunakan kaidah ilmiah, harus didasarkan kepada rujukan dokumen yang ada. Ada dua dokumen yang dijadikan sebagai rujukan untuk menilai kinerja Anggota DPR yaitu *Bill Digest* dan *Hansard*.

Bill Digest

Dokumen proses pembuatan UU ini menjadi dokumen penting bagi lembaga DPR, mencatat seluruh proses pembahasan Undang-undang oleh DPR baik dalam perdebatan internal dan partisipasi publik. *Bill Digest* ini merupakan indikator utama bukan jumlah UU yang diselesaikan, namun didasarkan lebih kepada bagaimana proses Undang-Undang tersebut dibuat. RUU yang sangat ideologis, memiliki kontradiksi kepentingan antar kelompok baik ideologi partai maupun kelompok pendukungnya, diasumsikan akan terjadi proses perdebatan yang lama.

Melalui proses *Bill Digest* dapat

diakses di Website, terlihat bahwa terdapat perdebatan pro-kontra antar anggota dari masing-masing fraksi. Proses tersebut memasukkan partisipasi publik dalam proses pembuatan UU tersebut. Kesemuanya terekam secara verbatim dalam bill digest tersebut. Dengan demikian publik dapat melihat dan menganalisa bagaimana kinerja atau rekam jejak Lembaga dan Anggota DPR tersebut.

Bill Digest dari Parlemen Afrika Selatan

Hansard

Dokumen kedua yang dapat digunakan untuk rujukan dari kinerja Anggota DPR dengan apa yang disebut sebagai *hansard* – yang merupakan nama yang diberikan untuk transkrip tentang debat di parlemen. *Hansard* ini dipublikasikan tidak lama setelah perdebatan tersebut selesai. Di Parlemen Australia *Hansard* dengan menggunakan teknologi IT ini hanya membutuhkan 3 (tiga) jam selesai sidang-sidang yang ada, maka *Hansard* sudah dapat diakses melalui website parlemen Australia <http://www.aph.gov.au> publik Australia dapat mengakses proses politik.

Apabila DPR memiliki *hansard* maka publik dapat mengakses untuk mengetahui apa yang diperjuangkan oleh 560 Anggota Dewan dan 10 Partai Politik dalam setiap sidang. Siapa yang hadir, apa yang diperjuangkan melalui pernyataan dan pertanyaan yang diajukan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan budget. DPR dapat secara transparan menyampaikan kepada publik apa yang telah, sedang dilakukan sebagai wakil rakyat.

Dengan tidak adanya *Bill Digest* dan *Hansard* yang dimiliki DPR RI yang dapat diakses melalui teknologi website <http://www.dpr.go.id/>, maka DPR baik sebagai lembaga

Dengan tidak adanya Bill Digest dan Hansard yang dimiliki DPR RI yang dapat diakses melalui teknologi website <http://www.dpr.go.id/>, maka DPR baik sebagai lembaga maupun sebagai Anggota tidak akan pernah dilihat bekerja dengan baik.

maupun sebagai Anggota tidak akan pernah dilihat bekerja dengan baik. Ukuran persepsi masyarakat melalui kaca mata wartawan akan selalu dilihat dengan perspektif yang negatif, baik karena ideologi media maupun karena untuk kepentingan bisnis semata.

Penutup: DPR Modern

DPR membutuhkan Sekretariat Jendral yang memahami fungsi lembaga legislatif dengan ukuran yang bisa dilihat melalui *hansard* dan *bill digest*, agar kinerja DPR dilihat secara komprehensif dan dievaluasi dengan obyektif. Seorang Anggota Dewan pernah menyatakan *bill digest* dan *hansard* hanya untuk kepentingan kelompok akademisi saja. Akademisi akan sangat mudah memberikan analisa dengan rujukan yang tepat bila *hansard* dan *Bill digest* tersebut tersedia. Publik juga berkepentingan untuk mengevaluasi Anggota Dewan melalui rekam jejaknya selama 5 tahun. Apakah terekam di dalam *hansard* dan *bill digest*, sehingga tidak pantas dipilih kembali atau Anggota Dewan tersebut konsisten dengan janji kampanye? *Hansard* dan *Bill Digest* adalah bukti nyata dari rekam jejak Anggota Dewan dan rekam jejak lembaga DPR sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitasnya kepada seluruh rakyat yang diwakili dalam negara demokratis dan modern.

DPR periode 2014-2019 telah menetapkan untuk membangun DPR

modern dengan dukungan teknologi IT agar publik dapat mengakses proses yang terjadi di DPR. Sayangnya program untuk *Hansard* dan *Bill Digest* yang sudah dirancang sejak tahun 2012 dirancang oleh CEPP UI sampai saat ini belum terlaksana. Transparansi Kinerja Dewan juga tergantung kepada sistem pendukung kesekretariatan dan kepemimpinan DPR. Misal pembangunan gedung DPR hanya sekedar gedung atau dalam kerangka pembangunan *collective memory* bangsa? Tentu sekretariat jendral akan mengatakan bahwa rekam tersebut ada dan dapat diakses secara manual belum menggunakan IT modern.

Melalui *hansard* dan *bill digest* yang dipublikasikan melalui website DPR, maka publik dapat menilai apakah wakilnya telah menyuarakan kepentingan daerah pemilihannya, ataukah wakilnya tidak pernah sekalipun menyuarakan kepentingan dapilnya dan kepentingan negaranya. Sementara itu publik seringkali menyatakan bahwa Anggota DPR hanya mementingkan kepentingan Partai Politik. Dalam praktik demokrasi tidak langsung Anggota DPR mewakili kepentingan partai. Kepentingan Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Pilihan kebijakan yang diambil pada akhirnya adalah pilihan parpol. Partai politik dibangun dalam kerangka untuk mengimplementasikan cita-cita negara yang tertuang dalam konstitusi melalui jalan sesuai ideologi partai yang diyakini. DPR tidak boleh lemah, agar DPR tidak menjadi cap legitimasi dari Presiden. Seperti kata Lord Acton: *Power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*. Mengembalikan peran partai politik di ranah legislatif sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan eksekutif merupakan tanggung jawab bersama bangsa Indonesia.

Ketika “Sang Wakil” Kembali Ke Rakyat

Reses merupakan masa dimana anggota DPR RI (secara perorangan maupun kelompok) kembali ke daerah pemilihan (Dapil) nya masing-masing. Tujuannya tak lain untuk bertemu dan mendengar langsung aspirasi,

keluhan dan uneg-uneg yang selama ini dialami dan dirasakan oleh masyarakat yang menjadi konstituennya masing-masing. Berikut kegiatan yang dilakukan beberapa anggota DPR RI di masa reses nya.

Saleh P Daulay - Fraksi PAN Dapil Sumut II LENERA DI WAKTU GELAP, TONGKAT DI KALA LICIN

Sulu di nagolap, Tukkot di nalamdit, Pribahasa Batak yang artinya Lentera di waktu gelap, tongkat di kala licin ini tidak hanya sekedar menjadi slogan Saleh Partaonan Daulay saat berkampanye dalam Pemilihan Legislatif 2014

pebukitan, wilayah di Dapil ini kondisi jalannya relatif tidak rata alias berlubang. Untuk sampai di Tapanuli tengah lewat jalan darat misalnya, membutuhkan

waktu sekitar 12 jam dari kota Medan. Namun hal itu tak sedikit pun menyurutkan pria kelahiran Sibuhuan, Ibukota Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara 4 Mei 1974 ini.

Saat berada di Dapilnya, Saleh tidak hanya menampung berbagai aspirasi dari konstituennya. Namun ia juga melihat langsung berbagai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Sebut saja ketika ia melihat masih banyaknya masyarakat di Dapilnya yang berada di garis kemiskinan, padahal pemerintah pusat, khususnya Kementerian sosial yang menjadi mitra kerja Komisi VIII memiliki berbagai program sosial

yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Dapilnya.

“Saya membawa program-program pemerintah pusat yang telah disetujui DPR ke daerah-daerah, termasuk Sumatera Utara khususnya ke Dapil saya Alhamdulillah, semua program Kementerian sosial yang menjadi mitra Komisi delapan dimana saya ditugaskan saat ini, sudah dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat di dapil saya. Begitu juga dengan penanggulangan bencana yang terjadi di dapil saya sangat cepat ditanggapi oleh BNPB (Badan Nasional Pen-



Menyerap aspirasi warga sambil minum kopi di salah satu kedai kopi Kecamatan Binanga

anggulangan Bencana),” papar alumni Colorado State University, Amerika Serikat ini.

Salah satu bukti nyata yang juga turut dirasakan masyarakat Sumatera Utara dari keberadaan Saleh sebagai wakil rakyat di DPR RI ini adalah dengan keberhasilannya memperjuangkan rumah bagi korban erupsi Gunung Sinabung. Bersama dengan Kepala BNPB, Syamsul Maarif, Mei 2015 lalu, Saleh ikut menyerahkan 103 unit rumah dari 370 unit yang direncanakan untuk tahap pertama bagi korban erupsi Gunung Sinabung yang direlokasi dari desa Bakerah di Siosar, Kecamatan Merk, Kabupaten Karo.



Menandatangani prasasti gerakan anti narkoba dalam rangka pembinaan generasi muda dari unsur pelajar, karang taruna, dan pramuka di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

lalu. Namun, hal itu seolah menjadi prinsip hidup yang akan selalu dipegangnya selama ia menjadi wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Tak mudah untuk menjangkau Dapil Sumut II yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Selain wilayahnya yang sangat luas, medan yang dijangkaunya pun cukup sulit. Sebut saja ketika Parlementaria ikut mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kota Sibolga beberapa waktu lalu. Selain mayoritas berada di daerah



Saat mengunjungi Program CSR Tambang Emas Martabe, Batang Toru, Sumut

Tidak hanya itu, bersama dengan seluruh anggota Komisi VIII lainnya, Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Periode 2010-2014 ini juga ikut memperjuangkan agar TPG (tunjangan profesi guru) yang menunggak beberapa tahun terakhir dan akhirnya mayoritas sudah terbayarkan. Termasuk upaya Komisi VIII menurunkan ongkos haji. (Ayu)

Jazuli Juwaini - Fraksi PKS Dapil Banten III **MENAMPUNG DAN MENYALURKAN SEMUA JENIS ASPIRASI**



Memberikan bantuan sembako kepada korban banjir di desa Tanjung Burung, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang pada banjir tahun 2013 lalu



Saat RDP dengan Mitra Kerja Komisi III DPR

Bagi Jazuli Juwaini kepercayaan merupakan amanah yang harus dijalkannya. Sementara dunia politik menjadi kendaraannya dalam menjalankan amanah tersebut. Oleh karena itu tidak banyak janji yang diberikan Politisi Fraksi PKS ini. Ia lebih berjanji untuk menampung dan menyalurkan aspirasi.

"Janji perbaikan dan fasilitas umum sejatinya hanya milik esksekutif yang memiliki wewenang mengeksekusi. Namun legislatif, hanya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian dijalankan oleh pihak eksekutif yakni pemerintah pusat hingga pemerintah

daerah," jelas pria kelahiran Bekasi 2 Maret 1965.

Dalam menjaring aspirasi masyarakat di Dapilnya, Banten III, pria yang biasa disapa Ustad ini selalu menyisipkannya dengan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dapilnya. Sebut saja *fogging* atau pengasapan untuk membunuh segala jenis nyamuk. Tidak hanya itu, tidak jarang Ustad juga menggelar pengobatan gratis.

Meski saat ini berada di Komisi III DPR RI yang menangani bidang hukum, HAM (Hak asasi Manusia) dan keamanan, namun Jazuli tak menutup jenis aspirasi yang datang kepadanya.

Sebut saja ketika ia mendatangi Kecamatan Kronjo dan kecamatan Kresek yang mayoritas kondisi jalannya rusak parah.

Saat bertemu dengannya, masyarakat di dua wilayah itu menyampaikan aspirasinya untuk perbaikan infrastruktur. Terlebih lagi saat musim hujan, wilayah tersebut kerap terendam banjir yang tidak hanya memasuki area rumah warga, melainkan juga menenggelamkan sebagian sawah dan ladang yang notabene menjadi mata pencahariannya. Belum lagi keluhan dari para petani di Dapilnya akan menurunnya harga gabah saat musim panen tiba, sementara harga pupuk yang dibeli meningkat tajam.

Ustad memang tidak dapat langsung bergerak memperbaiki keluhan masyarakat Dapilnya tersebut, namun ia akan selalu menampung aspirasi dan keluhan tersebut untuk di bawa ke lembaga legislatif yang ia naungi saat ini.

"Di Partai kami, PKS kebetulan saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Fraksi, satu pekan setelah reses, setiap anggota Fraksi PKS di DPR wajib membuat laporan kunjungan ke Dapil masing-masing. Oleh sekertaris fraksi segala aspirasi masyarakat tersebut dikelola berdasarkan bidangnya masing-masing. Dari sanalah fraksi yang kemudian memperjuangkannya dengan komisi-komisi terkait. Misalnya infrastruktur jalan akan diberikan kepada teman-teman PKS di Komisi V, begitupun dengan keluhan petani akan harga gabah dan pupuk, akan dilanjutkan kepada komisi IV," pungkasnya. (Ayu)



Memberikan nasi bungkus bagi warga Kecamatan Kresek, Kab Tangerang

Okky Asokawati - Fraksi PPP Dapil DKI II

MEMBANTU DARI MASALAH SEKOLAH, KESEHATAN SAMPAI PERNIKAHAN



Saat memberikan penyuluhan kesehatan di masyarakat dapilnya

Pengalaman Okky Asokawati sebagai legislatif pada periode sebelumnya, khususnya ketika ia bersama rekan-rekannya dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) berhasil menggolkan RUU tersebut menjadi Undang-undang yang akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia itu, menjadi modal bagi Okky dalam “mendekati” konstituennya pada pemilihan legislative 2014 lalu.

Dalam menjangkau konstituen di Dapilnya, medan yang dilalui mantan peragawati papan atas ini memang tidak “sedahsyat” anggota DPR lainnya, karena memang kondisi jalan di wilayah DKI Jakarta relatif lebih mulus, dan berdekatan. Namun karakter masyarakat Jakarta yang heterogen dinilai Okky menjadi “tantangan” tersendiri baginya dalam memberikan edukasi, informasi dan sosialisasi tentang berbagai hal.



Okky menjangking aspirasi masyarakat Dapilnya

Untuk mengatasi “tantangan” yang lebih bersifat psikis itu Okky lebih memilih cara *personal touch*. Misalnya dengan menjangking aspirasi dan memberikan sejumlah bantuan kebutuhan yang diperlukan yayasan tertentu. Tidak hanya itu, Okky juga kerap membantu masyarakat yang masih kesulitan bersekolah, bahkan Okky juga kerap diminta bantuan masyarakat yang ingin menikah.

“Tidak seperti anggota lainnya, saya tinggal di Dapil saya sendiri, jadi



Okky saat sosialisasi tentang Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika



Saat memberikan penyuluhan dan tips-tips kesehatan dan kepribadian kepada ibu-ibu di Dapil DKI II

dari bangun tidur sampai mau tidur harus siap menampung aspirasi dan dimintai bantuan oleh masyarakat sekitar yang notabene menjadi konstituen saya. Bantuannya pun macam-macam, dari sunat, sekolah, sampai permintaan bantuan pernikahan. Insya Allah saya tidak merasa terbebani, ini merupakan tanggung jawab saya dan kita semua,” ungkap Politisi dari Fraksi PPP ini.

Sementara ketika menjangkau konstituen yang berada di luar negeri, Okky lebih mengandalkan komunikasi lewat media sosial. Media sosial dirasa Okky sangat efektif untuk bisa menjangking aspirasi warga negara Indonesia di luar negeri. Meski demikian sesekali Okky juga mengunjungi negara-negara lain, khusus untuk bertemu dengan konstituennya di luar negeri. Sebut saja ketika ia sengaja pergi ke Hongkong untuk mendatangi kantong-kantong buruh migrant disana, begitupun dengan di Sydney, Australia.

“Selain bertemu fisik, saya juga menjangking aspirasi konstituen saya di luar negeri lewat media sosial. Dan itu sangat efektif dan efisien menurut saya,” ujar wanita kelahiran 6 Maret 1961 ini. (Ayu)

**Muhammad Suryo Alam,
Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur VIII**

**DISKUSI DENGAN MASYARAKAT SAMBIL
HADIRKAN PARA AHLI DI BIDANGNYA**

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Suryo Alam mengatikan selama dirinya ke dapil memberikan sosialisasi tentang fungsi-



M. Suryo Alam berdialog dengan Pemda dalam rangka sinergi program pembangunan



M. Suryo Alam meninjau program distribusi traktor untuk para petani di Jombang



Penyerahan cinderamata dari UMKM Bangkit Dinas Koperasi UKM Kab. Jombang



M. Suryo Alam berdialog dengan pengurus UMKM binaan PT. PNM Mojokerto Jatim

fungsi DPR. Ia menekankan agar masyarakat memahami

tentang fungsi DPR yang sebenarnya. Kalau anggota DPR mendatangi masyarakat dianggapnya semua persoalan di Dapil dapat diselesaikan. Dan ia akan meneruskannya pada pihak yang berkompeten yakni pemerintah sebagai eksekutornya.

“Jika Anggota Dewan datang ke Dapilnya, jangan melihat lagi mereka dari Partai apa, Fraksi mana, dan Komisi berapa itu tidak lagi seperti itu, karena Anggota Dewan sudah pasti akan mendapat keluhan dari masyarakat seperti masalah pendidikan, kesehatan, prasarana jalan yang sudah rusak atau masalah lain yang kurang memuaskan, itu harus ditampung semua tidak boleh mengatakan kalau itu bukan Komisi saya atau bidang



Buka bersama dengan tokoh masyarakat di Kab. Nganjuk, Kediri Jawa Timur saya, harus ditampung semua,” tegas Suryo.

Maka dari itu menurutnya, sesama Anggota Dewan harus mempunyai hubungan, karena dengan hubungan baik semua permasalahan yang ada di dapil dapat diselesaikan dengan baik juga.

Dia mengemukakan, kalau datang ke dapil tentunya bertemu dengan konstituen dengan melakukan komunikasi dan diskusi dengan kelompok petani maupun para pedagang kecil. Pada kesempatan itu Suryo juga menghadirkan narasumber yang betul-betul ahli di bidangnya yang akan memberikan pengetahuan tentang kebutuhan mereka masing-masing, seperti pedagang diberi wawasan bagaimana cara berdagang, petani diberi penyuluhan tentang tata cara bertani. Serta juga disiapkan buku-buku agar dapat menambah wawasan tentang bercocok tanam.

“Saat Ramadan kemarin, saya datang ke sebuah Yayasan Yatim Piatu dan Pondok Pesantren. Saya memberikan motivasi, mendorong tentang bagaimana memajukan Koperasinya, termasuk UKM. Saya juga memberi dorongan bantuan agar bisa membantu permodalan atau membantu manajemennya. Alhamdulillah kedatangan saya kesana mendapat respon positif. Mereka juga berharap agar semua keluhan serta keinginannya dapat disampaikan kepada eksekutif untuk ditindak lanjutinya. (Spy)

Itet Tridjati Sumarijanto, Fraksi PDI Perjuangan Dapil Lampung II MENDIRIKAN RUMAH ASPIRASI DI DAPILNYA

Secara khusus setiap akan melaksanakan kunjungan kerja reses Anggota DPR RI, Itet Tridjati Sumarijanto selalu membuat rencana kegiatan yang berbasis pada hasil sidang-sidang di DPR RI bersama Pemerintah. Setelah itu ia akan sampaikan pada konstituen di Dapilnya, Lampung II. Dari sana ia akan menjaring aspirasi masyarakat Dapilnya, untuk kemudian dibawa dan diperjuangkan di DPR RI.

Dia juga memiliki Rumah Aspirasi Itet Sumarijanto Center yang berdiri sejak tahun 2009 di Lampung. Itet sadar ketika sedang masa sidang di DPR maka ia tidak bisa intensif menerima aspirasi dari masyarakat. Rumah Aspirasi yang antara lain gunanya untuk menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat, juga ketika ada bantuan dari Pemerintah Pusat rumah Aspirasi inilah yang bergerak mencari orang yang tepat untuk menerima bantuan.

Saat ini ia bertugas di Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan) yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Disabilitas. Ketika melakukan kunjungan Dapil saat reses, dia bertanya jumlah disabilitas, kendala yang dirasakan, dan masukan-masukan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah saat bersidang di Komisi VIII.

Tidak hanya itu, Itet juga membangun minat baca di lapangan terbuka dengan memanfaatkan kearifan lokal. Dilakukan dilapangan terbuka untuk

membangun *awareness*. Peserta dikelompokan ibu-ibu untuk keterampilan membuat olahan makanan, peserta kelompok bapak-bapak untuk membuat pupuk organik, dan anak-anak. Semua kegiatan memanfaatkan perpustakaan mini dengan buku yang disediakan.

Kegiatan ini sangat mendapat apresiasi dari peserta dan masyarakat. Dengan kegiatan yang didapat dari bacaan, mereka mengetahui cara membuat olahan makan dan cara membuat pupuk organik yang baik. Dari sana anak-anak pun terlihat ceria dan ketertarikannya pada buku-buku pun bertambah.

Itet juga menampung aspirasi masyarakat yang membutuhkan jembatan untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain, karena jembatan yang ada banyak yang rusak berat. Sehingga menghambat anak-anak untuk bersekolah serta menghambat perekonomian.

Sayangnya meski hal itu sudah disampaikan pada pemerintah, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Mereka beralih dan saling lempar tanggung jawab antara kabupaten, provinsi, dan pusat.

"Saya prihatin koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tidak terjalin dengan baik," kata Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan. (as)



Acara di desa Nabang Baru Lampung Timur 13 Juli 2015



Wayangan Sosialisasi 4 Pilar Ds Dono Arum Kec MargaTiga Lampung Tengah



Yanuar Prihatin - Fraksi PKB Dapil Jawa Barat X SODORKAN TIGA KOMPONEN PADA KONSTITUEN

Berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar), kini bertugas di Komisi II (bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.)

Sebagai anggota DPR dalam menjalin hubungan dengan konstituennya menyodorkan tiga komponen, yaitu Serap Aspirasi, Traning Motivasi, dan Zikir Akbar, tergantung audien yang di temui. Kalau dengan petani, tentu bicara tentang kebijakan yang mampu memberikan kemudahan dan kesejahteraan petani.

Kalau di lingkungan pesantren lain lagi, mereka meminta agar pemerintah berpihak kepada pesantren. Keberpihakan sudah ada, tetapi perlu ditingkatkan. Banyak pesantren masih merasa dianaktirikan, meskipun sebagian pesantren sudah mulai bisa beradaptasi dengan kebijakan negara. Maka kita perlu memberikan perhatian lebih kepada pesantren.



Berdiskusi dengan warga pesisir Pantai Pangandaran



Rapat dengar pendapat pada 29 Juli 2015 bersama Guru Honorer se Kab. Kuningan di restoran Lembah Ciremai, Kuningan

Belum lagi yang berkaitan dengan infrastruktur, di hampir semua dapil di Indonesia termasuk Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar, infrastruktur masih menjadi kendala. Khusus wisata Pangandaran- sebagai wisata kelas dunia, dia berharap bisa dicari jalan untuk bisa menjadi kelas dunia, karena potensi yang lumayan besar dan cukup hebat tapi perhatian dari berbagai pihak masih kurang.

Dan yang terakhir di sektor pendidikan, Yanuar berharap Pemerintah juga memperhatikan lebih mengenai sarana prasarana pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan para pengajar. (as)



Silaturahmi bersama warga Ciamis pada 28 Februari 2015 di aula desa Sukadana



Training motivasi bersama ustad di aula Kec. Clbingbin, Kuningan pada 28 Juli 2015

M. Ali Umri, Fraksi-Nasdem Dapil Sumut III

ASPIRASI RAKYAT, DARI MASALAH NARKOBA HINGGA PENGANGGURAN



Sosialisasi Pancasila dan UUD1945 di sekolah

Ali Umri menuturkan ia sempat menerima pengaduan tentang maraknya peredaran narkoba di daerah di Pematang Siantar. Pada kesempatan itu ia meminta agar masyarakat jangan takut untuk melaporkan ketika ada anggota keluarga mereka yang menjadi pecandu dan jangan meminta agar keluarga atau anak mereka dibebaskan dan diberikan kesempatan rehabilitasi ketika ditangkap dalam kasus narkoba.

“Saat turun ke Binjai, ia menerima keluhan banyaknya rakyat yang masih menjadi pengangguran karena sulitnya lapangan pekerjaan. Ada yang sudah tamat sekolah kebidanan tidak tahu harus bekerja dimana karena tidak ada lowongan di bidang kebidanan. Banyak juga rakyat yang menjadi pengangguran karena sebelumnya bekerja di pertambangan pasir dan pertambangan krikil yang tidak mempunyai izin dan dihentikan kepolisian. Solusinya kami minta agar mereka mengurus izinnya,” papar Ali.

Ali menambahkan di Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan Aceh, kerap terjadi penyelundupan narkoba, ganja, heroin, dan shabu-shabu dari Malaysia. Sayangnya sarana yang ada masih sangat minim. Kapal atau peralatan lain sangat kurang, sehingga upaya memberantasan penyelundupan narkoba tidak berjalan dengan baik. Karena itu ia



Di Kel. Jatinegara Binjai Utara, Kota Binjai

menyarankan agar mereka bekerjasama dengan marinir untuk menjaga pinggir lautan. Disamping itu rakyat yang berada di Pangkalan Berandan mengeluhkan banyaknya hutan mangrove sudah habis dengan ditanami sawit.

“Meskipun itu bukan bidang kita, tetapi pengaduan tetap kami catat dan akan disampaikan kepada fraksi dan disampaikan lagi kepada komisi yang membidangnya agar dapat segera disikapi dan akan kita sampaikan kembali kepada rakyat tentang bagaimana sikap dari komisi terkait,” terang Ali.

Meskipun dana aspirasi tidak ada, namun dalam kunjungan ke dapil tersebut tidak jarang Ali Umri memberikan bantuan untuk membuat menara masjid.

Ali menambahkan untuk membahas semua aspirasi tersebut, setiap hari Jum'at diadakan rapat fraksi. “Berbagai aspirasinya itu ditanggapi oleh fraksi dan kemudian disampaikan kepada anggota-anggota komisi yang ada di fraksinya,” imbuhnya. (Skr)



Di Akademi Kebidanan Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun



Serap aspirasi masyarakat



Di Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun

Moh. Arief S. Suditomo, Fraksi Partai Hanura Dapil Jawa Barat I

MANFAATKAN RESES UNTUK BAHAS MASALAH BANGSA BERSAMA RAKYAT



Pemberian santunan pada anak yatim dan dhuafa

Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pameo itu kerap kita dengar namun kerap kali terabaikan saat kita membahas berbagai permasalahan bangsa. Rakyat kerap terpinggirkan suaranya. Melalui reses itulah, anggota Dewan berusaha menghimpun suara rakyat dalam menyoal berbagai permasalahan bangsa.

Salah satunya yang dilakukan anggota Komisi I, Arief Suditomo saat melakukan Kunjungan Kerja (kunker) di dapilnya Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) pada Masa Reses IV ini dari tanggal 8 – 16 Juli 2015 dengan menggelar pertemuan, tatap muka dan dialog dengan para pemuda dan pelajar di Kecamatan Ngamprah, gedung Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia mendiskusikan tentang peran intelektual muda



Berbuka puasa bersama anak yatim dan dhuafa



Arief Suditomo memberikan sambutan pada buka puasa bersama

dalam membangun kesiapan masyarakat menghadapi MEA. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 300 orang turut serta memberikan pendapat dan sumbang pemikiran melalui diskusi panel yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Bandung Barat (IMSBAR).

Selain itu, dalam rangkaian kunker, Arief juga berupaya turun langsung dalam upaya mendorong regenerasi kepemimpinan pemuda sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa dengan mengawal dan mengikuti pelantikan pengurus IMSBAR. Menggali berbagai pandangan rakyat tentang berbagai peran yang dapat dilaksanakan anggota Dewan. Arief juga melakukan pertemuan dan *talk show* dengan pendengar di Radio Lita Cimahi untuk membahas topik tentang Peran Anggota DPR dalam membangun Bandung *techno police* bertempat di jalan Budi Cimahi.



Foto bersama anak yatim dan dhuafa

Terkait dengan bidang tugas Komisi I, yang merupakan alat kelengkapan dewan dimana ia ditugaskan, dilaksanakan pertemuan, tatap muka dan dialog interaktif tentang manfaat dan problematika Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (*UP2DP*) dengan insan Pers di kantor media massa Pikiran Rakyat, jalan terusan Braga Bandung. Dalam diskusi tersebut ia menjelaskan tentang dana aspirasi DPR. Dari sana diharapkan kesalahpahaman Pers tentang bentuk pelaksanaan *UP2DP* dapat diurai.

“Dengan komunikasi yang baik diharapkan berbagai masalah yang pemaknaan berbeda dapat ditemukan titik persamaan, dan pemahamannya,” ujar Arief.

Tak hanya itu, saat kunker Arief tidak hanya menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Arief juga melakukan pertemuan sekaligus memberikan santunan serta bingkisan kepada anak-anak yatim dan dhuafa sebanyak 500 anak, yang terdiri dari 300 anak di Bandung dan 200 anak di Cimahi. Dengan adanya kegiatan sosial dalam rangkaian kegiatan kunker anggota Dewan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian wakil kepada rakyatnya sehingga diharapkan mampu tercipta hubungan yang erat antara wakil dan rakyat yang diwakilinya.

“Hasil temuan dan aspirasi di daerah pemilihan akan di buat laporan dan dilaporkan kepada Fraksi untuk ditindaklanjuti di Alat Kelengkapan Dewan yang terkait,” tegas Arief. (skr)

Amin Santono- Fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa Barat X

PANTAU DAN DISKUSIKAN SOLUSI INFLASI DI DAERAH SAAT RESES



Menjadi narasumber pada Focus Group Discussion dengan Mitra Kerja Komisi XI di Tasikmalaya

Pengendalian inflasi di daerah sangat penting karena inflasi di daerah yang berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan meningkatkan angka kemiskinan. Tak hanya itu, inflasi di daerah yang berlangsung terus menerus juga dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam dunia usaha.

Karenanya Amin Santono, anggota Komisi XI ini memanfaatkan masa reses untuk memantau sekaligus mendiskusikan berbagai solusi yang dimungkinkan guna menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar diskusi dimana ia menjadi salah satu narasumbernya dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Universitas Padjajaran, Perwakilan BI Bandung, BI Cabang Tasikmalaya, BI Cabang Cirebon, BSBI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab/Kota Tasikmalaya.

Selain itu ia juga mengunjungi 20 tempat untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat yang ditemui, seperti Kepala Daerah, perangkat Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Tokoh pemuda untuk menyerap berbagai aspirasi terkait dengan beragam permasalahan yang ada.

Amin juga melakukan peninjauan langsung ke berbagai lokasi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR diantaranya meninjau Desa Cisayong, Kampung Naga Kab. Tasikmalaya, yang sudah menjadi komo-

ditas ekspor andalan ke Eropa, Amerika, dan Asia, Serta penggemukan sapi yang kotorannya dijadikan sebagai bahan baku pupuk organik.

Terkait berbagai permasalahan dan aspirasi rakyat, Amin Santono memberikan masukan kepada pemerintah terkait Dapilnya, Jabar X seperti masih minimnya Infrastruktur jalan yang ada di dapil Jabar, Sosialisasi Dana Desa, Badan Pertimbangan Desa (BPD) meminta dicantumkannya honor BPD dalam Anggaran Dana Desa, serta masih adanya daerah yang belum teraliri Listrik Di Desa Sidaharja Kec. Lakbok Kabupaten Ciamis yang memiliki Jumlah penduduk lebih dari 6000 (enam ribu) orang, yang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.



Dialog dengan warga desa Sidaharja Kec. Lakbok Kab. Ciamis



Dialog dengan Warga Desa Ciniru Kec. Ciniru Kab. Kuningan

Dalam rangka mengantisipasi musim kemarau yang berdampak terhadap kekeringan dilahan petani ± 30 ha, diperlukan adanya mesin sedot air untuk daerah Desa Ciniru Kec. Ciniru Kab. Kuningan dan sekitarnya, dikhawatirkan keringnya area pertanian bisa mengakibatkan para petani tidak bisa bercocok tanam.

Amin berharap penyampaian aspirasi tidak hanya disampaikan saat reses semata tapi bisa dititipkan lewat rumah aspirasi yang sampai saat ini belum ada. "Dengan adanya rumah aspirasi, masyarakat dapat menyampaikan sewaktu-waktu permasalahan itu ada, tidak perlu menunggu anggota Dewan datang," tandasnya. (Skr)



Dialog Dengan Warga Desa Ciawilor Kec. Ciawi Gebang Kab. Kuningan

Roberth Rouw- Fraksi Partai Gerinda Dapil Papua

PROGRAM PEMERINTAH HARUS MENYENTUH MASYARAKAT PAPUA



Roberth Rouw sedang berdialog bersama masyarakat

Anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw dari Fraksi Gerindra mengatakan dalam kunjungannya ke Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, yaitu daerah-daerah pesisir dan daerah aliran sungai. Setelah melihat langsung kelokasi didaerah kepulauan dari Yapen terus menyeberang menuju ke Waropen, dari Waropen menyisir melalui sungai sampai ke Kabupaten Membramo Raya.

Disana Roberth menemukan banyak masalah-masalah yang ada di Dapil seperti, masalah pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, Pendidikan, dan kebutuhan pokok masyarakat itu sangat-sangat minim sekali.

Pada umumnya masyarakat disana tidak

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, selain kesehatan kebutuhan air bersih juga tidak ada, dan listrik disana juga belum teraliri.

Masalah pendidikan terlihat dalam satu wilayah hanya ada satu bangunan sekolah dasar yang terbagi menjadi enam lokal. Ironisnya disana hanya ada dua orang guru SD yang mengajar anak sekolah itupun suami istri, jadi mereka membagi dua, sang suami mengajar 3 kelas dan sang istri mengajar 3 kelas. Belum lagi transportasi yang juga masih menjadi kendala. Karena kendaraan yang ada hanya perahu kecil sebagai alat transportasi untuk masyarakat setempat.



Foto bersama masyarakat setempat

“Dari pengamatan langsung saya ke Dapil tersebut, saya mendorong dan mendesak pemerintah untuk segera menyalurkan berbagai program yang telah disusunnya untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua yang menjadi Dapil saya,” ungkap Roberth.

Program yang dimaksud Roberth tentu saja melingkupi berbagai bidang, baik itu program pendidikan dengan Bantuan Operasional Sekolahnya, bidang kesehatan dan sosial dengan berbagai program Jaminan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah.

Roberth mengatakan sejatinya dari pemerintah sudah membangun rumah tinggal untuk guru, namun pembangunannya terbengkalai. Bangunannya tidak diselesaikan, dibiarkan begitu saja dan ditinggalkan oleh pemborongnya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.

“Harus ada satu kontrol yang serius dari pemerintah, agar dana yang sudah digelontorkan kedaerah, tetapi tidak ada hasilnya, ini harus ada pertanggungjawabannya dari pemerintah, jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya mengakhiri. (Spy)



Meninjau Poliklinik Waropen Papua



KEPUASAN PUBLIK MENURUN

Karyono Wibowo, Pengamat Politik



Jelang satu tahun ini, kinerja DPR RI periode 2014–2019 masih belum maksimal jika diukur dari target capaian pengesahan rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).

Seingat saya, DPR RI periode 2014–2019 menargetkan 37 RUU untuk diselesaikan menjadi UU pada tahun 2015 ini. Selain 37 RUU yang sudah ditargetkan tersebut, DPR RI periode sekarang juga akan membahas RUU Kumulatif Terbuka.

Dari 37 RUU yang akan dijadikan prioritas dan akan diselesaikan menjadi UU selama tahun 2015 antara lain; RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan lain-lain.

Kinerja DPR di bidang legislasi ini sangat memprihatinkan karena hanya satu dari 37 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Waktu satu tahun memang relatif singkat, tetapi jika dilihat dari sisi target pengesahan RUU hanya satu dari 37 RUU yang berhasil ditetapkan menjadi UU, maka dapat dinilai kinerja DPR ini jauh dari harapan rakyat. Karenanya, tidak berlebihan bila publik merasa pesimis dan kurang menaruh harapan yang terlalu besar terhadap DPR. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah survei yang menunjukkan data tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR menurun.

Dalam satu tahun ini, performa DPR yang menonjol justru polemik antar kekuatan politik di parlemen yang mengedepankan kepentingan kelompok. Atmosfir di gedung parlemen dalam suasana panas karena diwarnai konflik kepentingan individu, dan golongan, sehingga kepentingan rakyat, bangsa, dan negara terabaikan. Konflik ini terjadi sejak DPR periode 2014–2019 dilantik.

Sejak awal, gedung parlemen menampilkan wajah antagonis karena DPR terbelah antara kubu Koalisi

Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Situasi ini diperkeruh oleh adanya konflik partai politik yang menimpa Partai Golkar dan PPP. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya agenda-agenda penting yang semestinya dilakukan DPR. Tentu saja, situasi ini menjadi salah satu faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan partai politik.

Maka ke depan, DPR perlu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan golongan. Kepentingan rakyat harus menjadi *mainstream* dari semua kekuatan politik untuk membangun bangsa ini. Sebab, tantangan kita sejatinya bukan perbedaan kepentingan antar kelompok atau golongan bangsa sendiri tetapi tantangan yang datang dari luar. Tantangan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, globalisasi, *free trade agreement* dan *free figh liberalism*. foto: naefuroji/parle/hr

KINERJA BAGUS

Rahmat, Kepala Desa Dete, Kec Tomiang Timur, Kab Wakatobi



Saya sering melihat di televisi kinerja DPR, saya menilai bagus, terlebih kinerja terkait dengan pengawasan, tentang anggaran juga bagus, dengan DPR periode ini anggaran bisa masuk ke desa, untuk legislasi juga sama bagus.



BELA KEPENTINGAN RAKYAT

Maria Stella

Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Saat ini masyarakat menilai DPR hanya cenderung mencari citra daripada kualitas kerja. Hal ini karena kinerja DPR yang belum dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Persepsi tersebut yang harus diubah di masyarakat dengan menunjukkan kerja nyata.

Anggota DPR seharusnya lebih membela kepentingan rakyat daripada kepentingan partai dan golongannya. Hal ini dapat diwujudkan jika ada kontrol baik dari masyarakat maupun presiden. Kita harus objektif dalam menilai DPR, jika memang kinerjanya bagus, ya diapresiasi, jika kinerjanya buruk, ya dikritisi, kalau perlu diregulasi. Semoga para anggota DPR selalu ingat dengan visi dan misi yang dibawa saat kampanye dulu dan juga lebih mendekatkan diri kepada rakyat, sehingga kinerja DPR akan



totalitas untuk rakyat dan rakyat dapat mengerti kinerja DPR seobjektif mungkin.

LEGISLASI BELUM TERLIHAT

Eka Suaib

Dosen Universitas Haluoleo



Sepanjang sepengetahuan saya, karena DPR RI awalnya terbelah karena friksi, sehingga kinerja anggota dewan belum bisa optimal, meskipun sudah ada upaya baik menyelesaikan permasalahan tersebut. Kinerja anggota DPR RI belum bisa dirasakan sampai pada level masyarakat secara langsung. Kinerja legislasi belum terlihat, masih banyak target prolegnas yang perlu diselesaikan.



LEGISLASI MASIH MINIM

Eko Indrayadi Dapunta

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Masih banyak yang perlu dimaksimalkan oleh DPR periode ini. Sampai saat ini produk legislasi yang dihasilkan masih minim. Sebetulnya menilai produk legislasi hanya berdasarkan kuantitas saja kurang tepat, namun itulah ukuran yang bisa dilihat secara kasat mata oleh masyarakat, dan DPR tidak boleh mengabaikan hal tersebut.

Bila dinilai secara keseluruhan, langkah awal DPR periode ini patut untuk diapresiasi, 1. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik, dilihat dari respon yang bagus ter-

kait dengan isu-isu sedang dihadapi masyarakat. 2. Berita negatif tentang anggota DPR mulai jarang terdengar seperti tidur saat sidang, ditangkap karena kasus korupsi, jalan-jalan keluar negeri, meskipun masih sering berita anggota DPR bolos saat sidang paripurna. 3. Tekad DPR untuk mewujudkan Parlemen Modern sangat bagus dan harus didukung, semoga semangat parlemen modern tidak hanya konsep saja, namun bisa segera diwujudkan.

Maju terus perlemen Indonesia!!!

Perlu Kunjungi Sekolah

M. Farras Dirgantara, Siswa SMAN 8 Tangerang

Berita DPR yang saya dengar dan lihat di televisi, memang, selalu negatif. Sebagai pelajar, saya hanya berharap wakil rakyat kita yang duduk di DPR RI itu bisa memperbaiki kinerjanya jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Apa yang disorot di media massa mungkin tidak ada salahnya untuk jadi perhatian DPR. Saat yang sama, kita juga ingin melihat hasil kerja positif yang sudah dicapai DPR. Jadi, tidak terus-terusan memberitakan yang negatif saja.

Mungkin para wakil rakyat yang sekarang duduk di Senayan, perlu kunjungi sekolah-sekolah untuk memberi penjelasan kepada para siswa dan guru, agar memberi in-



formasi yang benar tentang apa saja yang sudah dilakukan para wakil rakyat kita selama ini. Jadi, sebagai pelajar saya mendapat informasi yang utuh tentang DPR.

Mengeritik dan Mengawasi

Achmad Hilmy Azizi, Siswa SMAN 10 Tangerang

Terus terang saya kurang mengikuti perkembangan DPR yang ada sekarang. Dunia politik masih asing buat saya. Tapi, sebagai pelajar saya berharap wakil rakyat kita bisa lebih sering turun ke lapangan, menemui rakyat kecil, seperti pedagang, supir, petani, dan nelayan.

Saya hanya tahu bahwa DPR itu sebagai pengawas pemerintah. Fungsi ini sepertinya paling menonjol daripada fungsi lainnya yang saya lihat. DPR selalu mengeritik dan mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah.

Lalu soal ribut-ribut di DPR yang kadang jadi tontonan di televisi, mestinya sudah tidak ada lagi. Ka-



lalu terlalu sering ribut, nanti fungsi pengawasannya yang tak terlihat. Saya berharap, DPR kali ini jadi lebih hebat.

Banyak Artis

Hana Fakhirah

Siswi SMAN 8 Tangerang



Ada tiga fungsi DPR yang saya baca di buku pelajaran, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Saya tidak tahu mana yang lebih menonjol dari tiga fungsi yang dimiliki DPR itu. Pelajaran tentang ini di sekolah masih minim. Ya, tidak ada salahnya kalau sekali-kali anggota DPR sendiri yang datang ke sekolah saya untuk memberi penjelasan.

Yang saya tahu, di DPR sekarang banyak artis. Gimana kiprah mereka selama jadi wakil rakyat, itu yang mungkin jadi sorotan di media sosial. Ternyata artis juga bisa terjun ke dunia politik. Itu hebat dan mengagumkan. Tinggal sekarang gimana mereka bisa membantu negara ini jadi lebih baik.

Harapan saya untuk DPR, semoga bisa membantu mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan tak ada lagi anggotanya yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.



Tetap Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Yana (43), sopir pribadi

Saya mengharapkan, lembaga DPR yang memasuki usia 70 tahun pada 29 Agustus 2015, tetap memperjuangkan aspirasi rakyat. Namanya DPR- dewan perwakilan rakyat- kalau seorang sudah duduk menjadi anggota Dewan meski diusung oleh partai-partai politik, maka orientasi perjuangannya adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan hanya memperjuangkan untuk kepentingan golongan tertentu saja.

Lembaga perwakilan rakyat yang akan memasuki usia 70 tahun pada 29 Agustus mendatang, ibarat manusia, sudah lebih dari dewasa-sangat matang. Selama kurun waktu itu DPR memang penuh dinamika, pasang surut, banyak catatan sejarah yang ditorehkan, namun juga tak sedikit yang mengeritik



keras dan caci maki.

Sebagai pengemudi mobil pribadi yang sehari-hari mengantar majikannya ke DPR sedikit banyak mendengar bagaimana kiprah wakil-wakil rakyat. Bahkan, kinerja DPR jika diprosentase 50% berjalan baik, 50% belum berjalan dengan baik. Sepengetahuan saya, sebagian yang diperjuangkan DPR hanya wacana saja.

Saya belum memahami apa tugas DPR secara mendetail terkait tiga tugas pokok di bidang pengawasan, penyusunan APBN, dan pembuatan undang-undang. Saya orang kecil, buat saya yang penting kesejahteraan rakyat terjamin, beras dan BBM murah. foto: jaka/parle/od

DPR Harus Kritis

Citra Ayu Ningtias, Mahasiswi Universitas Nasional, Jakarta

Hari-hari terakhir ini, saya mencermati perkembangan di DPR. Yang menarik bagi saya, Presiden Jokowi mengirimkan 33 nama calon Dubes ke DPR. Dari sejumlah nama itu, tak ada yang berlatar diplomat. Kebanyakan berlatar politisi, seniman, artis, atau purnawirawan TNI. DPR perlu kritis terhadap usulan pemerintah ini. Di sinilah fungsi pengawasan DPR berperan.

Adalah lumrah dalam dunia politik, ketika presiden terpilih mengusulkan sejumlah nama itu dari para relawan pendukungnya sendiri. Tapi kapasitas dan integritasnya menjadi

hal penting untuk diteliti oleh DPR.

Jika mempunyai kapasitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang hubungan luar negeri maka calon itu bisa diangkat sebagai Dubes. Indonesia perlu membangun hubungan yang harmonis dengan negara-negara sahabat lewat peran para Dubesnya.

Sisi lain DPR yang saya amati adalah tingkat kehadiran di setiap rapat paripurna selalu minim. Padahal, banyak agenda penting menyangkut kesejahteraan masyarakat yang harus dibicarakan dalam rapat terse-



but. Ini mengindikasikan tingkat keseriusan para anggota DPR juga minim. Jadi, bagaimana partisipasi publik akan berjalan dengan efektif? (mp,jk)



Dokter Dito Anurogo

heksakarbon, trikloroetilen), herediter (diturunkan).

Penyebab yang bermula dari sistem saraf pusat, misalnya: iske-mi (kekurangan suplai oksigen), obstruksi (halangan), kompresi (penekanan), infeksi, inflamasi (pe-radangan), degeneratif (penuaan).

Fenomena “Buka – Tutup”

Dari perspektif neurosains, ada teori “ectopic discharges” di balik kesemutan. Teori ini menjelaskan terjadinya loncatan konduksi elek-trik/perubahan di tingkat mem-bran sel saraf, di waktu dan tempat yang terkadang tidak diharapkan.

Normalnya, membran sel saraf memiliki potensial aksi. Ini seperti pintu masuk di bank, yang secara otomatis dapat membuka-menutup. Siklus “membuka-menutup” ini ada empat fase. Saat fase depolarisasi, saluran ion Natrium (Na) membuka, sedangkan saluran ion Kalium (K) masih tertutup. Saat fase repolari-sasi, saluran ion Na menutup, se-dangkan saluran ion K membuka. Saat fase hiperpolarisasi, saluran ion Na tertutup, saluran ion K masih terbuka. Terakhir, kembali ke po-tensial membran istirahat, dimana saluran ion K menutup. Hal ini ter-jadi bila pompa Na-K berfungsi nor-mal. Terganggunya fenomena “bu-ka-tutup” ini berakibat kesemutan.

Saat seseorang kesemutan, “pompa” Na-K ini terhambat, dan berlanjut depolarisasi (perubahan sel karena perubahan elektrik yang dramatis). Penyebabnya kekurangan energi yang diperlukan sehingga pompa

INI DIA SOLUSI KESEMUTAN

Kesemutan dapat diderita siapa saja. Seolah sederhana, hilang dengan sendirinya.

Namun kita tetap perlu waspada. Benarkah gangguan saraf biang ke-ladinya?

Kesemutan adalah sensasi geli, perasaan seperti ditusuk, terbakar, tergelitik di kulit seseorang. Umumnya dirasakan sesaat, tidak berefek fisik jangka panjang. Meskipun jar-rang, kesemutan dapat menahun. Bila sesaat, terjadi karena hiperven-tilasi (napas cepat-dalam, terutama akibat cemas) dan serangan panik. Bila menahun, muncul karena kom-plikasi obat-obat kemoterapi, kencing manis (DM), gangguan sirkulasi tubuh, iritasi saraf, neuropati, dsb. Salah satu bentuk spesifik kesemu-tan adalah formikasi, yaitu: sensasi yang muncul saat serangga seolah merayap di permukaan/bawah kul-it, dapat dirasakan di tangan, len-gan, kaki. Umumnya kesemutan dirasakan setelah duduk dalam posisi yang tidak ergonomis (misal: duduk dengan kaki bersilang); po-sisi tidur dengan lengan tertindih kepala; duduk, bersila, berdiri, ber-jongkok (terlalu) lama. Kesemutan bukan penyakit, melainkan gejala

yang mengindikasikan ke arah pe-nyakit tertentu, atau akibat obat dokter dan kemoterapi.

Penyebab

Kesemutan disebabkan peruba-han fungsi jalur (sistem) saraf. Te-patnya, terjadi ketidaknormalan di sepanjang jalur sensoris, dari saraf perifer menuju ke korteks senso-ris. Ketidaknormalan juga ter-jadi di sistem saraf perifer atau di sistem saraf pusat. Neuropati peri-fer (problematika sistem saraf tepi) disebabkan oleh gangguan meta-bolisme-nutrisi (misal: alkoholisme, DM, defisiensi vitamin B12, uremia, hipotiroidisme), sindrom jebakan saraf (misal: sindrom terowongan karpal), gangguan jaringan konek-tif (misal: artritis rematoid, lupus eritematosus sistemik), toksin dari logam berat (misal: arsen, air raksa, timah), kemoterapi dan obat yang diresepkan dokter (misal: didano-sine, zalcitabine, stavudine, iso-niazid, nitrofurantoin, hydralazine, overdosis piridoksin menahun), ke-ganasan (misal: kanker payudara, paru-paru, ovarium), infeksi (misal: HIV, lepra), kecelakaan/jatuh, pe-radangan, terpapar produk hasil industri (akrilamid, karbondisulfid,

tidak dapat bekerja. Penyebab lainnya, peningkatan akumulasi sisa metabolisme iskemi, yaitu ion-ion Hidrogen (H), yang pada gilirannya memengaruhi pH (kadar keasaman). Proses ini dinamakan depolarisasi iskemik.

Diagnosis

Untuk memastikan diagnosis kesemutan, dokter bertanya riwayat perjalanan penyakit, melakukan pemeriksaan fisik (neurologis), pemeriksaan penunjang (sesuai indikasi). Pemeriksaan laboratorium membantu penegakan diagnosis. Anamnesis (pertanyaan terperinci) adalah kuncinya. Penderita hendaklah jujur, tidak perlu malu menjawab pertanyaan dokter, seperti: kapan kesemutan pertama kali dirasakan, menunjukkan organ tubuh yang kesemutan, apakah disertai nyeri, gangguan fungsi motorik, riwayat penyakit terdahulu, gangguan kesehatan saat ini, obat-obatan yang sedang/pernah dikonsumsi, pernahkah terpapar zat toksik atau mengalami kecelakaan, dsb. Pengetahuan dokter tentang distribusi sistem persarafan mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis kesemutan.

Pemeriksaan Penunjang

Untuk pemeriksaan laboratorium, perlu dilakukan evaluasi awal, meliputi: hitung sel darah lengkap, profil

kimia, urinalisis, TSH (*Thyrotropin-stimulating hormone*), rerata sedimentasi.

Berbagai pemeriksaan, seperti: folat, vitamin B12, tes VDRL (*Venereal Disease Research Laboratory*), antibodi antinuclear, serum imunoelektroforesis, kecepatan konduksi saraf, radiografi (roentgen, EMG/elektromiografi, MRI/Magnetic Resonance Imaging, mielografi, CT scan), pungsi lumbal, tuberkulin purified protein derivative (PPD), analisis logam berat, biopsi (saraf/otot) diperlukan untuk riset terpadu.

Solusi

Dokter memberikan terapi sesuai indikasi atau penyebab yang mendasarinya. Bila seseorang mengalami kesemutan, maka restorasi (pemulihan) sirkulasi peredaran darah dan oksigen melalui olahraga, peregangan, pemijatan mampu meredakan kesemutan. Obat golongan anti-inflamasi (seperti: ibuprofen, aspirin) direkomendasikan jika gejala kesemutannya masih ringan. Jika kesemutannya sudah memberat, maka golongan anti-depresan (seperti: amitriptilin) dapat direkomendasikan dokter. Tentunya dosis lebih rendah daripada yang diberikan dokter untuk penderita depresi. Pada kasus kesemutan yang membandel/parah, maka obat golongan opium (seperti:

kodein) dapat diresepkan dokter.

Terapi nutrisi, seperti: suplementasi vitamin B kompleks (terutama B12). Pemberian suplementasi vitamin B6 perlu diwaspadai, sebab malah dapat menyebabkan kesemutan. Penderita kesemutan disarankan menghindari alkohol, melonggarkan busana dan sepatunya.

Akupunktur, pijat dengan minyak aromatik, pemberian salep/balsem meskipun dipercaya sebagian kalangan mampu meredakan kesemutan, namun khasiatnya hanya sesaat. Setelah beberapa hari, kesemutan berpotensi muncul kembali.

Ada “solusi” efektif yang terbukti secara empiris. Solusi ini dipakai untuk mengatasi masalah kesemutan di kaki. Caranya sederhana, yaitu: dengan mengikat erat-erat jempol kaki dengan karet. Setelah 3-5 menit karet dilepaskan. Selama diikat karet, kaki diluruskan sesaat, lalu digerak-gerakkan. Mudah sekali, bukan?

Dengan penatalaksanaan komprehensif dan paripurna, maka kesemutan tak lagi menjadi masalah.

Dito Anurogo, dokter pembelajar neurosains, pemerhati neurologi, penulis buku “45 Penyakit dan Gangguan Saraf”, konsultan kesehatan, tinggal di Semarang, email: ditoanurogo@gmail.com



Heri Gunawan

POLITISI YANG PEMBELAJAR

Tuturnya lugas, apa adanya. Tekun mempelajari sesuatu yang dianggapnya baru. Dia sosok pembelajar. Kesabaran dan ketekunan telah mengantarnya ke puncak karir profesional dan politik. Inilah Heri Gunawan, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Kini, ia Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, BUMN, koperasi, dan UKM.

Bicara soal pengelolaan keuangan, Heri adalah sosok yang tepat untuk diajak berbin-cang. Ia telah puluhan tahun berge-lut dengan dunia finansial. Sore itu, Parlementaria menemui pria berdarah sunda ini untuk wawan-cara eksklusif. Heri sangat senang berbagi cerita tentang kenangan masa kecil di kampung, romantika masa muda, dan suka dukanya di-percaya membangun usaha jasa keuangan.

Siswa Berprestasi

Pelabuhan Ratu, Sukabumi, 1969. Daerah pesisir di Selatan Pulau Jawa. Pantainya indah. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Ketika pagi menyingsing, semua sibuk dengan pencahariannya. Para nelayan berlayar ke tengah laut, menebar jala dan pancing untuk menangkap ikan. Para petani bergegas ke sawah, merawat tanaman padinya.

Adalah H. Maman Suparman petani sederhana asli Suka-bumi yang tekun menghidupi keluarganya dengan bertani dan berdagang. Malam itu, bersama istri tercinta Hj. Lilis Aisyah di Kota Sukabumi, sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Jarum jam menun-jukkan pukul 02.00 dini hari. Tangis bayi seketika memecah kesunyian di ruang persalinan RS. Bunut, Kota Sukabumi. Tahmid tiada henti terucap sebagai tanda syukur. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 11 April 1969.

Kini, di kediaman H. Maman dan Hj. Aisyah hadir jagoan kecil yang menceriakan suasana. Bayi kecil itu diberi nama Heri Gunawan. Heri kecil tumbuh di tengah keluarga petani yang religius. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Setelah kelahiran Heri masih ada empat adiknya yang lahir ke-mudian. Jadi Heri adalah sulung dari lima bersaudara. Keempat adiknya semua perempuan.

Ayah dan ibunya sempat membuka warung kelontong di Pelabuhan Ratu dengan bantuan kakeknya. Kakek Heri dari garis ibu bernama H. Surya Soemantri, dia adalah tokoh masyarakat di Pelabuhan Ratu yang terpandang. Semasa

tinggal di Pelabuhan Ratu, orang-tuanya selain berdagang kelontong juga pernah berdagang beras dan pisang untuk dikirim ke pasar induk di Jakarta. Usaha berdagang beras sempat mengalami kebangkrutan, lantaran beras dagangannya kehu-janan, sehingga tak laik jual. Masa-masa sulit dialami ayahnya. Sang ayah kemudian memutuskan hijrah ke Cibadak,

Dengan memboyong keluarganya ke Cibadak, Sukabumi, ayahnya kemudian ikut mengurus pabrik kapur dan penggilingan padi serta jasa angkutan milik sang kakek. Kakek Heri dari garis ayah bernama H. Achmad Sukarta Raharja. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, sang kakek adalah tokoh masyarakat Sukabumi yang terpandang. Sang ibu turut mengurus pabrik kapur dan penggilingan padi itu. Ayahnya mengurus jasa angkutan di pabrik tersebut.

Kenangan masa kecil Heri banyak dihabiskan di Cibadak. Cibadak sendiri dahulu adalah daerah yang dirimbuni pepohonan. Sawah-sawah menghampar luas begitu hijaunya. Kebun-kebun pertanian tumbuh subur di sini. Dan air sun-gai mengalir begitu jernihnya. Kampung yang permai, tempat Heri mengawali pendidikan formal. Heri kecil bersekolah di SDN Cipanas, Cibadak. Setiap hari bersama sa-habat-sahabat kecilnya ia pergi dan pulang sekolah dengan berja-lan kaki melewati pematang sawah yang indah.

Bila bersekolah, Heri tak pernah mengenakan seragam. Ia adalah salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Heri selalu menempati rangking teratas. Pelajaran matematika sangat digemarinya. Pak Karnani adalah guru yang di-ingatnya saat di kelas III SD. Dia guru matematika yang sangat baik dan perhatian. Sepulang sekolah,



Foto kenangan tahun 1991. Heri bersama 4 adik dan kedua orangtua



Heri Gunawan berdasi, di Cibadak bersama adik perempuan, ibu, nenek, dan tante

Heri belajar agama bersama teman-teman di kampungnya.

Soal permainan favorit masa kecil, Heri senang bermain kelereng, gatrik, gasing, dan tak ketinggalan bermain bola di areal sawah yang sudah dipanen padinya. Bolanya dari buah jeruk bali ataupun karet yang digulung. Kegemaran lainnya yang tak pernah ia lupakan adalah *ngurek* alias mancing belut di sawah dan mandi di sungai. Sepulang sekolah, Heri juga kerap berjualan es mambo milik seorang Tionghoa. Hasilnya bisa untuk menambah uang saku. *Wah*, senangnya mengingat masa kecil di kampung.

Saat Heri duduk di kelas III SD, usaha ayahnya di Cibadak mengalami pasang surut. Saat keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, sang ayah menitipkan Heri kecil pada adik ibundanya di Bandung. Heri pun melanjutkan kelas IV di SDN 2, Lengkung Besar 105, Bandung dan sempat menjadi pelajar teladan. Setamat SD di Bandung, tahun 1982, Heri kembali ke kampung halamannya di Sukabumi. Ia melanjutkan ke SMP Mardi Yuana, salah satu sekolah favorit di Sukabumi.

Sekolah ini dikenal juga dengan SMP bruder. Banyak pengajar katolik dan siswa Tionghoa di dalamnya. SMP ini juga merupakan tempat ibunda Heri dahulu menuntut ilmu. Bahkan, para guru ibunya juga menjadi guru Heri. Usia gurunya pun sudah sepuh. Sebut saja Pak Rahmat, Pak Satibi, Pak Damanik, dan Ibu Irma. Itulah sederet nama yang dikenang Heri, karena telah mengajari dirinya dan ibunya di SMP yang sama. Dan Heri tetap menjadi siswa berprestasi di SMP ini.

Gagal Jadi Tentara

Setamat SMP, tahun 1985, Heri melanjutkan ke SMA swasta yang sama, Mardi Yuana, Sukabumi. Ia

terus berprestasi sepanjang mengikuti pendidikan dari SD sampai SMA. Bersamaan dengan prestasinya itu, kenakalan masa remaja juga mulai sering dilakukan. Berkelahi dan ribut dengan teman sekolah maupun di luar sekolah pernah dilakoninya. Di SMA, Heri termasuk siswa yang berpengaruh di lingkungan teman-temannya.

“Di SMA saya mulai nakal. Suka berkelahi dan dikenal di sekolah karena nakalnya,” aku Heri, seraya tertawa mengenang masa sekolah dahulu. Karena sering berkelahi itu, ibundanya sering pula dipanggil ke sekolah untuk dimintai keterangan dan teguran. Setelah dipanggil ke sekolah, ibunya pun sering memarahi sekaligus menasihati Heri.

Di SMA, Heri masuk kelas A1 (jurusan fisika), kelas favorit dan bergengsi. Di kelas ini hanya ada dua siswi perempuan, selebihnya laki-laki. Ia juga mulai aktif berorganisasi dan berkegiatan ekstrakurikuler. Heri dipercaya sebagai Ketua II OSIS. Selain itu, aktif pula dalam Aranya Giri Sakta (AGS), organisasi pencinta alam sekolahnya. Sabtu dan Minggu selalu dimanfaatkan untuk berwisata alam ke gunung dan menelusuri hutan.

“Nyaris hampir tiap minggu nongkrong di Cinumpang, tempat perkemahan di kaki Gunung Gede, bahkan sekaligus mendaki Gunung Gede dan Gunung Salak, Bogor. Sempat juga menjelajahi gua, menyusuri sungai dan mendaki Gunung Semeru serta Rinjani,” kenang Heri semasa aktif di AGS. Akhir pekan merupakan waktu yang tak pernah terlewatkan untuk menikmati alam bersama teman-teman



Heri Gunawan bersama teman-teman SMA di Gunung Gede

sekolah. Heri juga aktif berlatih beladiri sejak SMP hingga SMA, seperti Taekwondo dan Bangau Putih.

Memasuki kelas III SMA, kegiatan mulai dikurangi dan Heri pun terlihat makin matang dan dewasa. Ia tak senakal lagi seperti semasa kelas I dan II. Heri ingin mengejar impiannya menjadi seorang tentara. Setamat SMA, 1988, Heri muda sempat mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipenmaru) di perguruan tinggi negeri. Waktu itu yang dipilih adalah ITB dengan jurusan planologi. Selain ITB, ia juga mendaftar di kampus swasta, Universitas Parahyangan (UNPAR), jurusan arsitektur.

Saat yang sama, dia juga mendaftar sebagai taruna Akademi Militer di Bandung. Ia ikuti semua proses seleksi awal taruna di Ajendam III Siliwangi, Bandung. Heri pun dinyatakan lulus dan dikirim ke Magelang, Jawa Tengah, pusat pendidikan taruna AD, untuk mengikuti seleksi lanjutan. Bahagia rasanya bisa dikirim ke Magelang. Dengan menaiki bus Kodam Siliwangi, Heri merasa impiannya segera menjadi kenyataan. “Saya suka melihat ten-



Heri Gunawan diapit kedua orangtua usai wisuda

tara, karena kedisiplinannya. Apalagi dari kecil saya diajarkan untuk disiplin dan mandiri,” ujar Heri.

Saat mengikuti seleksi taruna di Magelang, hasil Sipenmaru diumumkan. Dan Heri dinyatakan lulus masuk ITB. Begitu juga di UNPAR. Bahkan, banyak kampus lain menawarkan Heri untuk masuk menjadi mahasiswanya, lantaran hasil tes di UNPAR sangat baik. Karena sedang mengikuti seleksi taruna di Magelang, Heri pun tak menghiraukan pengumuman Sipenmaru itu. Ia sedang fokus mengejar cita-citanya menjadi tentara. Hanya pasukan infantri yang terbayang dibenaknya.

Apalagi, kedua orangtuanya sudah memberi restu. Sang ayah sebelumnya membekali uang Rp2 juta untuk kebutuhan selama mengikuti seleksi. Jumlah uang yang sangat besar pada tahun 1988. Pemuda Heri mampu melewati semua tahapan seleksi taruna di Magelang dengan baik. Sampailah tiba hari terakhir pengumuman. Semua calon taruna menerima surat keputusan. Isi surat itu hanya mencantumkan kata “Kembali” dan “Tidak Kembali”.

Heri membuka surat itu dengan perlahan, seraya agak cemas. Tegun dan terkejut. Bagaimana tidak terkejut, kata “Tidak Kembali” dalam surat yang dibaca Heri dicoret dan mengosongkan kata “Kembali”. Itu berarti diperintahkan pulang, karena tidak diterima sebagai taruna AKMIL. Padahal, esoknya tinggal menyisakan hari pelantikan bagi para taruna yang dinyatakan lulus seleksi.

Bersama Heri, ada empat teman lainnya yang bernasib sama. Tak ada penjelasan apa pun mengapa Heri dipulangkan. Padahal, semua tahapan seleksi dirasa sudah sangat baik ia lalui sampai akhir. Semangat hidup seakan runtuh. “Waktu itu, saya putus asa,” katanya, singkat. Heri masih bingung ke mana ia akan pergi dan bagaimana menjelaskan semua ini pada kedua orangtuanya.

Menjadi Politisi

Heri masih menggenggam surat keputusan yang mengecewakan itu. Bersama surat tersebut, ada pula amplop coklat. Isinya uang Rp5.000 sebagai bekal ongkos pulang dari AKMIL. Hati masih terasa hampa. Impian yang sejak SMA dicanangkan, sirna sudah. Berlima dari AKMIL, Heri memutuskan ke Yogyakarta dan singgah di Pasar Kembang. Seminggu pertama di Kota Gudeg, hidup Heri tak terarah. Kehidupan malam dan mabuk nyaris menjadi kesehariannya.

“Saya berlima stres. Sempat tak karuan hidup di Jogja. Saya bingung mau ke mana lagi setelah itu,” cerita Heri penuh tawa. Hari terus berganti, perubahan pun perlahan menghampiri. Seperti sedang dituntun takdirnya, Heri teringat pada kawan ayahnya yang tinggal di Yogyakarta bernama Kuspandi. Bersama Yusuf, kawan dari AKMIL yang juga tak lulus, menemui Pak

Kuspandi pemilik Koran Bernas di Jl. Mangkubumi.

Kuspandi sendiri adalah kolega ayahnya di sebuah organisasi sosial bernama Rotary Club. Ada Bimo, anak Pak Kuspandi yang dikenal Heri saat aktif di Rotaract Club Sukabumi. Heri bercerita lika likunya hingga “terdampar” di Yogyakarta. Kepada Pak Kuspandi, Heri menyampaikan keinginannya untuk kuliah. Pak Kuspandi dan Bimo menyarankan Heri kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana. Namun, hanya jurusan manajemen yang tersisa. Hampir semua kampus di Yogyakarta sudah menutup pendaftaran.

Heri pun mendaftar saat hari terakhir pendaftaran segera ditutup. Setelah diterima masuk di kampus tersebut, Heri dan Yusuf tinggal di rumah kos yang tarifnya hanya Rp100 ribu per tiga bulan. Bayar kuliah pun cuma Rp600 ribu per semester pertama yang sudah termasuk dengan uang sumbangan sukarela. Semuanya menggunakan uang yang pernah dibekali ayahnya.

Setelah resmi memulai perkuliahan, barulah Heri mengabarkan kedua orangtuanya di Sukabumi. Terkejut menerima kabar dari Heri, ayah dan ibunya segera bergegas menemui putra tercintanya itu di Yogyakarta. Air mata tak kuasa berlinang membasahi pelupuk mata ibundanya. Sedih mendengar cerita kegagalan sang anak yang mendambakan menjadi tentara. Heri pun merasakan kesedihan yang sama, seraya tertunduk lesu.

Tapi kehadiran orangtuanya hari itu justru menguatkan tekad pemuda Heri untuk segera bangkit dari keterpurukan. Masa lalu kecewaan sudah ia tinggalkan. Kini, pemuda Heri manatap jalan baru, menata hidupnya kembali yang sempat terserak. Ia bertekad bisa

menyelesaikan kuliah lebih cepat. Materi perkuliahan ekonomi sebenarnya dunia baru yang belum pernah ia sentuh. Tapi, ia mau belajar sampai akhirnya menguasai bidang ekonomi. Di kampusnya, pernah dipercaya menjadi Ketua II Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Tahun 1991, Heri menyelesaikan perkuliahannya, setelah sebelumnya dipercaya menjadi asisten dosen di almamaternya itu. Ia sempat mengajar dua mata kuliah, Sistem Informasi Manajemen dan Pengolahan Data Elektronik. Gajinya masih bersifat honor berkisar antara Rp200-250 ribu per bulan. Setelah itu, sejak tahun 1992 ia hijrah ke Jakarta dan memulai karir profesionalnya di bidang keuangan. Mantan Dewan Panasihat ICMI Sukabumi ini, pernah bekerja di PT Olympindo Cemerlang, sebuah perusahaan jasa sewa beli kendaraan bermotor, yang pada tahun 1994 berubah menjadi lembaga keuangan non bank alias *multifinance*.

Heri manapak karir dari bawah di perusahaan tersebut. Ia mengawalinya sebagai *marketing officer*, *marketing supervisor*, *asisten marketing manager*, lalu *marketing manager*, hingga menjadi kepala kantor cabang perusahaannya di Bogor dan kepala kantor pusat operasional di kantor pusat Jakarta. Kinerja yang baik dan penguasaan bidang keuangan yang mumpuni, membuat banyak perusahaan sejenis melamar mantan Bendahara DPP Partai Gerindra itu, untuk bergabung.

Tercatat, mulai tahun 2002 hingga awal 2015, Bendahara Dewan Pimpinan Nasional HKTI tersebut, pernah bekerja di PT. Mandala Multifinance sebagai kepala kantor cabang. Heri juga dipercaya mengelola *holding* perusahaan Kembang 88 Group dan Draya Group (satu *owner*) yang membawahi beberapa anak

perusahaan dengan berbagai sektor bidang usaha, antara lain; lembaga keuangan, dealer, jasa rental, trading, modal ventura, sampai pertambangan.

Malang melintang di dunia finansial, sampailah Anggota Dewan Pembina Pimpinan Pusat Satuan Relawan Indonesia (Satria) ini, pada pertimbangan untuk terjun ke panggung politik. Adalah sang ayah yang berkali-kali memengaruhinya menjadi politisi. Cerita menjadi politisi berawal dari kebun milik keluarganya di Sukabumi. Syahdan, suatu pagi di tahun 2008, ketika matahari belum terlalu tinggi, Heri beserta istri dan orangtuanya tiba di sebuah sudut kampung di Sukabumi Jawa Barat.

Ketiganya hendak melihat kebun dan ladang mereka yang ada di tempat tersebut. Namun, baru saja mereka hendak melangkah, menjauh dari kendaraan yang ditumpangi, tiba-tiba melihat seorang bocah tiga tahun bertelanjang dada, hanya mengenakan *cawet*, menangis tersedu. Ia mengaku lapar dan meminta makan.

Seketika Heri pun tertegun, hanyut dalam pikirannya yang tidak menentu. Ia terdiam menyaksikan pemandangan yang buat ukurannya sangat memilukan. Seorang anak yang seusia dengan anaknya sendiri itu, membuat Heri mengelus dada.

Di negeri yang kaya ini, di kampung yang masih banyak tumbuhan bisa ditanam, ternyata masih ada bocah yang kelaparan. Padahal, baru tadi malam, Heri menghabiskan uang jutaan rupiah, sekadar untuk jamu makan malam kolega bisnisnya.

Sambil memberi bantuan untuk bocah itu, ia merenung bagaimana realitas ini bisa terjadi. Setelah diketahui, ternyata bocah itu seorang yatim. Ia ditinggal bapaknya yang diserang penyakit kronis hingga menghabiskan sawah untuk membiayai pengobatan. Harta benda habis terjual, bapak sang bocah meninggal dunia. Ibunya kemudian menjadi buruh tani untuk membiayai hidup yang serba kekurangan.

Ayah Heri bertutur, “Kalau kamu terjun berpolitik, kamu bisa turut membenahi sistem dan turut berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dengan kekuasaan yang kamu miliki, lebih dari sekadar memberi bantuan untuk bocah itu.”

Seruan sang ayah masuk ke relung hati dan pikiran seorang Heri. Dan kisah bocah kelaparan membawanya pada renungan bahwa ia harus berada di jantung kebijakan untuk ikut berpartisipasi memberi sumbangsih terbaik bagi negeri ini. Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Umum Rotaract Club Yogyakarta itu, sering menolak ajakan sang



Heri Gunawan saat berada di tengah-tengah anak yatim



Foto kenangan pernikahan tahun 1991



Heri Gunawan berpose bersama keluarga tercinta

ayah. Baginya, politik masih dipandang sebagai dunia abu-abu. Panggung politik waktu itu dinilainya penuh kemunafikan.

Kini, pandangan Heri telah berubah. Ia tak ragu lagi berpolitik. Idealisme tetap dipegang teguh. Ia ingin menjadi pejuang politik bukan hanya sekadar menjadi politisi. Tahun 2008, Heri resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Kebetulan sang ayah H. Maman Suparman, petani dan tokoh tani daerah yang menasional serta aktif di organisasi pertanian, adalah rekan Prabowo Subianto, yang sama sama turut mendirikan partai berlambang kepala burung garuda itu.

Pada Pemilu 2014, Heri mendaftar menjadi caleg dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi. Ia berhasil melenggang ke Senayan dan resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI. Heri ingin membawa kesuksesan di perusahaan ke langkah lebih nyata di tengah masyarakat. Menjadi wakil rakyat tentunya akan lebih memudahkan Heri dalam mewu-

judkan aspirasi masyarakat dan menyalurkan ideologi agar benar-benar mendukung kepentingan rakyat. Bagi Heri menjadi wakil rakyat adalah pengabdian.

Setelah resmi menjadi anggota dewan, Ketua Bidang Perdagangan DPP Partai Gerindra ini, dipercaya menempati kursi Wakil Ketua Komisi VI. Baginya, jabatan adalah amanah. Banyak pandangan kritis disuarakan Heri sejak berada di Komisi VI. Kebijakan pemerintah dan pengelolaan BUMN yang sarat kepentingan selalu dikritisi. Belum ada jiwa nasionalisme pada diri para direksi BUMN. UU BUMN yang ada sekarang pun hanya mengurus BU (badan usaha) belum menyentuh MN (milik negara). Untuk itu, UU ini perlu segera direvisi bahkan diganti. Komisi VI sudah mengajukan draf dan agenda perubahan tersebut.

Suka Ikan Asin

Menjadi profesional dan pengusaha serta legislator sama sibuknya. Kesibukan itu telah menyita waktu kebersamaannya dengan istri dan

anak-anak tercinta. Saat berada di rumah, Heri tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Di rumahnya ada Dea Diani Ramadhania Gunawan, putri sulung yang cantik dan baru saja menyelesaikan studi ekonomi bisnisnya di Fakultas Ekonomi, UNPAD, Bandung.

Ada pula Arsyad Daiva Gunawan, anak kedua yang tampak gagah. Dan satu lagi, si bungsu yang imut dan jelita Sabita Maheswari Gunawan. Kepada putra putrinya, Heri tak memaksakan kehendak untuk memilih jalan hidupnya. "Biarkan mereka mencari jati dirinya masing-masing. Kita serahkan kepada mereka sesuai kemauannya. Saya hanya memberikan motivasi dan mengawasi," imbuh Heri.

Tak lupa di rumahnya ada Kartini istri tercinta. Wanita berdarah suku mandar dari Sulawesi Barat yang dinikahinya pada 1991 ini, merupakan alumni Akademi Pariwisata Trisakti, Jakarta. Perkenalannya dengan Kartini terjadi ketika Kartini sedang melakukan praktik kerja lapangan di Yogyakarta selama tiga bulan.

Ketika ditanya soal lagu dan warna musik kesukaannya, Heri menjawab tak menyukai dunia musik dan lagu. Satu-satunya lagu yang dia kenal adalah *Wind of Change* yang dilantunkan *Scorpions*. Lagu itu sering didengarnya ketika masih menjadi mahasiswa di Yogyakarta yang melatari peristiwa runtuhnya tembok Berlin.

Tapi kalau soal makanan favorit, Heri sangat suka ikan asin. Kalau dipadu dengan lalapan dan sambal, *wah* rasanya mengalahkan semua kenikmatan duniawi. "Makanan favorit saya ikan asin plus lalap sambal. Itu paling favorit buat saya sebagai orang kampung," tuturnya penuh derai tawa. (mh) Foto: Dok. Pribadi/Parle/od



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menerima cinderamata dari Wagub DIY

DPR HARAPKAN PENERIMAAN PAJAK DIOPTIMALKAN

Pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah dalam rangka menjalankan roda pembangunan. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun menjadi salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara. Untuk itu, Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Demikian salah satu pembahasan yang mengemuka dalam pertemuan Komisi XI DPR dengan jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja

Komisi XI DPR, di Yogyakarta, belum lama ini. Pertemuan ini menjadi salah satu rangkaian Kunjungan Kerja Tim Komisi XI DPR.

Tim Kunker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan (F-PD), dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI, diantaranya dari F-PDI Perjuangan ada I.G.A Rai Wirajaya, Henky Kurniadi, dan Hendrawan Supratikno. Edison Betaubun mewakili F-PG. Amin Santono dari F-PD. Berikutnya Muhammad Hatta (F-PAN), Donny Ahmad Munir (F-PPP), Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), Ana Muawanah (F-PKB), dan Sumail Abdullah (F-Gerindra).

“Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yogyakarta harus optimalkan lagi penerimaan pajaknya.

Mereka harus lebih intens melakukan pendekatan, komunikasi, dan sosialisasi terhadap masyarakat Yogyakarta yang sudah patuh menyampaikan SPT Tahunannya, juga patuh dalam mengisi kontennya, yakni ada nilai pajak yang dibayarkan,” kata Marwan, usai pertemuan.

Pasalnya, tambah Marwan, jika wajib pajak hanya melaporkan SPT Tahunan saja, namun tidak ada konten pajak yang dibayarkan, DJP hanya mendapatkan data wajib pajak saja, tidak mendapat pendapatan untuk negara. Politisi F-Demokrat itu mengakui, SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak di Yogyakarta memang cukup baik. Bahkan, ia melihat setidaknya 98 persen wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan.

Namun, tambah Marwan, jika persoalan kurang maksimalnya penerimaan pajak diakibatkan karena kurangnya jumlah Sumber Daya Masyarakat, ia menegaskan, penambahan jumlah SDM tak menjamin peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Justru, penambahan SDM malah menambah beban biaya negara.

“Persoalan SDM itu selalu begitu, selalu dikeluhkan kurang. Tapi apakah jadi jaminan bahwa SDM yang banyak akan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan? Yang sudah pasti, pengeluaran biaya tetap akan meningkat, karena akan ada biaya tetap yang dikeluarkan oleh negara untuk menggaji dan membiayai SDM itu,” tegas Marwan.

Tetapi, menurut Marwan, jika memang dengan penambahan SDM secara kualitas dan kuantitas dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak, tentu pihaknya akan mendukung. Karena biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan sebagainya akan terkompensasi dengan penerimaan negara yang didapatkan.

Kondisi Global Pengaruhi Penerimaan Negara

Kondisi ekonomi global yang mengalami pelambatan, tak dipungkiri mempengaruhi kondisi ekonomi internal Indonesia. Bahkan, turut memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan pertumbuhan investasi. Hal ini ditengarai menjadi salah satu penyebab target penerimaan negara sulit tercapai.

“Para pelaku pasar itu mungkin tertekan dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena kondisi global atau faktor eksternal itu lebih rentan daripada faktor internal. Walaupun kebijakan fiskal dan moneter Indonesia semuanya sudah benar dan on *the track*, namun hal itu belum cukup menghadapi tantangan eksternal yang luar biasa,” kata Anggota Komisi XI DPR Henky Kurniadi.

Politisi F-PDI Perjuangan itu melihat sebenarnya Indonesia masih mampu bertahan dengan perlambatan ekonomi global, namun siklus ini harus dilalui. Ramalan The Fed menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang akan tumbuh lebih baik. Namun Henky mengingatkan Pemerintah agar tetap berhati-hati di tahun mendatang.

“Tapi kita harus optimis, pasar harus dikembangkan dengan optimisme, sehingga arus investasi masuk. Kalau tidak ada investasi, penerimaan negara akan semakin berat. Kalau tidak ada *income* yang bagus, bagaimana masyarakat mempunyai konsumsi yang tinggi dan menarik pajak,” kata Politisi asal Dapil Jawa Timur itu, seolah bertanya.

Terkait kondisi global ini Anggota Komisi XI DPR Dony Ahmad Munir meminta negara untuk hadir dalam permasalahan ekonomi ini. “Negara harus hadir untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Bagaimana

pelambatan ekonomi bisa dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Misalnya kebijakan seperti mempercepat belanja pemerintah (*government expenditure*) dan dipercepat daya serap anggarannya,” kata Dony.

Politisi F-PPP ini yakin, dengan penyerapan anggaran yang baik oleh Pemerintah, hal ini dapat menimbulkan *multiplier effect* dan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dampak dari percepatan belanja negara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun hal ini harus dilakukan serentak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan memimpin rapat dengan BUMN dan BUMD Bidang Perbankan

Pemerintah Kabupaten dan Kota. Tentu juga dengan didorong sektor investasi yang lebih banyak lagi,” ingat Dony.

Selain itu, tambah Dony, perlu ada sinergitas antara seluruh komponen negara. Yakni Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, tak terkecuali DPR untuk sama-sama berkomitmen mengatasi pelambatan ekonomi yang terjadi.

“Sehingga kita tidak terus menerus menyalahkan faktor eksternal. Kalau fundamental ekonomi kita kuat,

sebesar apapun faktor eksternal akan bisa kita hadapi. Kita akan tangguh menghadapi berbagai gelombang apapun,” yakin Politisi asal Dapil Jawa Barat itu sembari menutup wawancara.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kemenkeu Provinsi DI Yogyakarta, Rudi Bastari mengatakan, selama kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2014, penerimaan Kanwil DJP DIY selalu mengalami pertumbuhan. Walaupun sedikit ada penurunan di tahun 2014, diakibatkan salah satunya oleh adanya penurunan setoran dari wajib pajak besar di sektor Industri Pengolahan, yaitu PPh Badan Impor dan PPN Impor.

Untuk tahun 2015, Rudi melaporkan, sampai dengan 6 Juli 2015, capaian penerimaan pajak sudah mencapai angka 32,72 persen atau Rp 1,476 triliun, dari target sebesar Rp 4,514 triliun. Dengan angka pertumbuhan dicatat sebesar 16,33 persen.

Selain pertemuan dengan Kanwil DJP Provinsi DI Yogyakarta, Tim Kunker Komisi XI DPR juga melakukan pertemuan dengan Perbankan, baik BUMN maupun BUMD. Dilanjutkan pertemuan dengan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dan jajarannya. (sf) Foto: Sofyan/Parle/HR



Tim Kunker Komisi II DPR dipimpin Wakil Ketua Lukman Edy di Kantor Gubernur Papua

DPR DUKUNG EVALUASI OTSUS PAPUA

Komisi II DPR mendukung perlu adanya evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pasalnya, Otsus Papua sudah berjalan lebih dari 15 tahun, sehingga pantas untuk dievaluasi. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy (F-PKB) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR di Kantor Gubernur Provinsi Papua, beberapa waktu lalu.

“Saya kira sudah saatnya dilakukan evaluasi Otsus Papua, karena sudah 15 tahun pelaksanaan Otsus ini, supaya objektif dan pelaksanaan Otsus yang sudah 15 tahun itu seperti apa. Terkait soal pemekaran, evaluasi Otsus, dan revisi UU Otsus serta aspirasi-aspirasi lain tentang Papua,” kata Edy, saat pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan jajaran.

Politisi asal Dapil Riau ini menyatakan, Komisi II sudah menindaklanjuti serta membicarakan dengan pemerintah terkait hal ini, namun belum ada sikap dari pemerintah.

Antisipasi Potensi Konflik

Dalam kunker ini juga dibahas masalah mengenai persiapan Pilkada Serentak yang akan digelar tahun ini. Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro (F-PG) mendukung dan mendorong pihak keamanan TNI dan Polri untuk antisipasi potensi konflik yang mengganggu keamanan pelaksanaan pilkada.

“Tak hanya itu, perlunya sosialisasi pemahaman pilkada serentak 2015 dan juga disepakati tentang usulan dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua tentang pedoman peradilan pelanggaran pidana umum pada pilkada,” kata Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Terkait masukan dari Kajati itu, Edy menyatakan bahwa ini menjadi tugas Komisi II untuk mendorong agar pemangku kepentingan segera membuat pedoman peradilan pelanggaran pidana umum pada pilkada.

“Kajati bilang belum ada pedomannya. Kami di Komisi II juga belum membahas pedoman penanganan

pidana pada pilkada ini. kita akan bicarakan dengan Bawaslu pusat dan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung, dan akan kita lakukan dalam rangka menyusun mekanisme pedoman peradilan umum,” jelas Edy.

Sebelumnya, Karo Ops Polda Papua, Kombes Tatang menyebut jumlah anggaran yang disetujui untuk pengamanan Pilkada serentak sebesar Rp29,9 miliar dan melibatkan 5.000 personel.

SDM Jadi Kendala

Tim Kunker Komisi II juga menemukan, permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), dinilai menjadi salah satu kendala Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Papua dalam menjalankan kinerjanya. Kurangnya jumlah SDM mengakibatkan permasalahan pertanahan tak kunjung selesai.

“Masalah SDM menjadi pemicu terkendalanya kerja BPN secara kuantitas maupun kualitas, dan kompetensi dalam penyelesaian sengketa, konflik dan perkara,” tandas Anggota Komisi II Arteria Dahlan.

Sebelumnya, Kepala BPN Kanwil Provinsi Papua, Nikolas Wanenda, mengatakan bahwa saat ini BPN Kanwil Papua memiliki SDM sebanyak 249 orang yang mencakup wilayah kerja seluas 29 kabupaten atau kota.

Dalam kunjungan ini ikut serta anggota Komisi II, Komarudin Watabun, Arteria Dahlan, dan Diah Pitaloka dari F-PDIP, Agung Widyantoro, Ani Maulani Saragih dari F-PG, Endro Hermono, dan Subarna, dan Bambang Riyanto dari F-Gerindra, Fandi Utomo, dan Libert Kristo Ibo (F-PD), Amran (F-PAN), Muhammad Yudi Koutoky (F-PKS), Mohammad Arwani Thomafi (F-PPP) dan Muchtar Luthfi A. Mutthy (F-Nasdem). (hr/sf)

foto; eka hindra/parle/hr



Komisi VI DPR saat mengunjungi Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulteng

KOMISI VI MEMUJI PERTUMBUHAN SULTENG MENSINERGIKAN BUMN

Menempati daratan paling luas di pulau Sulawesi, provinsi yang satu ini memiliki sumber daya alam melimpah dengan angka pertumbuhan mencapai dua digit. Inilah Sulawesi Tengah (Sulteng) yang pada awal Agustus lalu dikunjungi Komisi VI DPR RI.

Bertempat di Kantor Gubernur, Provinsi Sulteng, tim kunjungan kerja (Kunker) Komisi VI yang dipimpin Heri Gunawan bertemu dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola beserta para kepala dinas setempat. Banyak informasi yang digali seputar perdagangan, industri, dan investasi di sini. Dan yang paling membanggakan

adalah capaian angka pertumbuhan Sulteng yang mencapai 17,76, tertinggi se-Indonesia.

Angka pertumbuhan tersebut didukung dengan nilai investasi yang masuk ke Sulteng, yaitu Rp1,7 triliun, tertinggi keenam di Indonesia. Saat yang sama masih ada PR besar yang dihadapi Sulteng. Misalnya angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 13 persen. Angka kemiskinan itu bahkan tertinggi di Indonesia. Gubernur Sulteng mengungkapkan, angka kemiskinan Sulteng dari tahun ke tahun terus menurun. Kini, tinggal 11 persen. Lima tahun ke depan angkanya terus ditekan hingga 1 digit.

Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan mengapresiasi capaian pertumbuhan Sulteng yang jauh melebihi pertumbuhan nasional. Ia berharap pertumbuhan ekonomi Sulteng terus meningkat seiring investasi yang masuk. Sulteng sendiri terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan luas daratan 61.841,29 km² dan jumlah penduduk mencapai 2.785.488 jiwa.

Dalam sambutannya di hadapan Gubernur Sulteng, Heri mengatakan, “Angka kemiskinan terus mengalami penurunan, namun masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional yang dipengaruhi oleh terjadinya kemiskinan struktural pada kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Indikator kemajuan pendidikan maupun kesehatan yang direfleksikan sebagai keberhasilan pembangunan sosial menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.”

Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra (F-PG) yang ikut dalam pertemuan tersebut berpendapat, capaian pertumbuhan Sulteng pada triwulan I 2015 memang tertinggi di Indonesia. Kontribusi terbesarnya pada tahun ini adalah investasi minyak di Luwuk, Banggai dan investasi smelter di Morowali.

“Itulah yang mendorong tingginya tingkat pertumbuhan. Namun problemanya, angka kemiskinan tinggi meskipun terus menurun. Kami mendorong agar pemerintah Sulteng mendorong industri yang lebih melibatkan masyarakat luas terkait dengan pengolahan komoditas masyarakat,” ungkap Eka.

Dan komoditas yang berpotensi di Sulteng, lanjut Eka, adalah agrobisnis seperti kakao, jagung, kelapa, dan sapi. Dengan pengelolaan komoditas unggulan ini, masyarakat pun akan menikmati manfaat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Pemerintah Provinsi Sulteng. Data dari Pemprov Sulteng menyebutkan, produksi kakao mencapai 195.845 ton pada 2014. Ke-

lapa pada 2013 mencapai 189.572 ton. Sementara sapi populasinya mencapai 249.990 ekor.

Di tengah angka pertumbuhan dan kemiskinan Sulteng, Komisi VI DPR juga menyorot kinerja BUMN Sulteng yang masih minim sinergitas. Kinerja BUMN yang beroperasi di Sulteng belum menunjukkan tren positif. Ada banyak BUMN yang diundang saat melakukan kunjungan kerja ke Palu, Ibu Kota Sulteng. PLN, Pupuk Kaltim, Petrokomia Gresik, PTPN III dan XIV, Bulog, PT. Pertani, Perum Perikanan Indonesia, dan PT. PNM, itulah sederet BUMN yang menggelar pertemuan.

Selain itu, BUMN bidang transportasi, konstruksi, dan perbankan juga diundang ke Palu. Komisi VI sengaja mengundang BUMN berdasarkan bidang usahanya agar saling mendengar kemajuan dan kesulitan yang disampaikan. Dengan begitu, antarperusahaan plat merah bisa saling bersinergi untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Pertemuan tersebut kian memperkaya informasi dan data yang didapat Komisi VI DPR. Di akhir kunjungan, Komisi VI menyempatkan diri meninjau pasar tradisional Talise dan Pelabuhan Pantoloan, di Kota Palu, Sulteng. Tim Komisi VI ingin melihat dari dekat aktivitas ekonomi rakyat di pasar dan aktivitas bisnis pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia IV.

BUMN bidang transportasi disorot karena pemerintah sedang giat membangun infrastruktur jalan dan tol laut. Saat pertemuan dengan PT. Adhi Karya dan PT. Nindya Karya terungkap bahwa di Sulawesi akan ada pembangunan jalur kereta api yang selama ini tak pernah ada di Indonesia bagian timur. PT. Semen Tonasa yang ikut dalam pertemuan itu, bahkan menawarkan harga yang murah bila ada kerja sama pembangunan infrastruktur jalan, terutama rel kereta di Sulawesi.

Sementara sebelumnya dalam pertemuan dengan kalangan perbankan, kredit untuk UKM mengalami kenaikan secara nasional. Namun, di Sulteng Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kalangan pelaku UKM, menurut

Gubernur Sulteng, masih belum sepenuhnya disalurkan oleh perbankan plat merah. “Perbankan belum berpihak kepada rakyat kecil. Terbukti penyaluran KUR masih rendah,” kata gubernur.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulteng Purjoko me-

nyatakan, penyaluran kredit untuk UMKM segera akan mengalami kenaikan. Selama ini Kota Palu merupakan yang terbesar di Sulteng dalam penyaluran KUR hingga 25 persen. Heri yang memimpin pertemuan berharap, perekonomian Sulteng bisa segera tumbuh dengan menghidupkan UKM.

Anggota Komisi VI Melani Leimena Suharli (F-PD) kepada parlementaria di Palu mengatakan, banyak potensi yang bisa dikembangkan Pemprov Sulteng lewat pemberdayaan UKM setempat. Melani mencontohkan bawang goreng khas Palu sangat menarik dan disukai pasar. Ini perlu perhatian serius Pemprov. Apalagi bawang ini sangat khas, tidak bisa ditanam di tempat lain.

Hasil olahannya pun tak perlu mengejar target ekspor, cukup dipasarkan antarpulau atau dijual ke pulau Jawa, itu sudah cukup bagus. “Bawang goreng sangat terkenal di sini. Saya termasuk yang menyukai bawang goreng khas Palu, karena sangat enak. Di meja makan saya selalu tersedia bawang goreng dari Palu,” akunya.

Tim Komisi VI DPR RI yang turut serta berkunjung ke Sulsel adalah Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Eka Sastira (F-PG), Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG), Nurzahedi (F-Gerindra), Melani Leimena Suharli (F-PD), M. Nasim Khan (F-PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Refrizal (F-PKS), dan Mukhlisin (F-PPP). (mh) Foto: Husen/Parle/HR



Tim Kunker Komisi VI DPR bersama para karyawan PT. PNM, Palu, Sulteng



Dalam ruang kelas rusak SDN Kelapa Tinggi, Kupang Tengah, NTT, Tim Kunker Komisi X berpose bersama murid-murid sekolah tersebut

KOMISI X MINTA ANGGARAN PENDIDIKAN DIDISTRIBUSIKAN ADIL DAN MERATA

Kupang Timur, 10 Agustus 2015.

Cuaca panas terik, ketika rombongan Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Nuroji mengunjungi beberapa sekolah rusak di provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Meski demikian, tidak menyurutkan tekad para anggota DPR untuk berdialog dan memberi semangat para pelajar di SMA N I dan SMP N I Kupang Timur.

Begitu pula saat mengunjungi SDN Kelapa Tinggi Kecamatan Kupang Tengah, meski melewati pematang sawah, para anggota Dewan tetap antusias menemui siswa-siswi SDN

kelas 1-3 di tengah bangunan sekolah yang sudah tua, bahkan untuk menopang bangunan sekolah harus ditopang kayu supaya tidak roboh.

Itulah sedikit gambaran saat para anggota Komisi X DPR melaksanakan tugas konstitusionalnya. Berbeda dengan kunjungan kerja sebelumnya, Komisi X DPR dalam masa reses persidangan IV tahun 2014/2015 pekan kedua Agustus lalu lebih fokus pada peninjauan sekolah-sekolah rusak.

“Reses kali ini ada pengalaman lain dibawa ke sekolah-sekolah rusak. Melewati pematang sawah sekitar 3 km dari jalan raya, kami salut kepada para siswa yang tetap semangat

belajar. Karena itu, kami juga bersemangat untuk memperjuangkan anggaran pendidikan khususnya di daerah tertinggal,” ujar Nuroji di sela-sela kunker tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, mengaku sengaja membawa Tim Kunker Komisi X DPR ke sekolah yang rusak, supaya ada perhatian pemerintah pusat sehingga dana cepat digulirkan.

“Apalagi, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor leste perlu berbagai fasilitas pendukung yang memadai sebagai wilayah penjaga perbatasan NKRI,” tandasnya.

Sekitar 70 persen kondisi prasarana penunjang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Untuk itu diperlukan alokasi dana untuk menambah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta bengkel.

Di tingkat sekolah dasar (SD), terdapat 36.916 ruang belajar dan yang harus direhabilitasi sebanyak 29.430 ruang. Untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), terdapat 10.930 unit dan yang harus direhabilitasi 8.422 ruang kelas.

Selain membutuhkan rehabilitasi, kata Sinun, NTT juga membutuhkan ruang kelas baru. Kebutuhan ruang kelas baru untuk pendidikan dasar sebanyak 1.313 ruang, terdiri atas 936 ruang untuk SD dan 377 ruang buat SMP.

Selanjutnya, sebanyak 1.576 dari 5.125 ruang kelas SMA dan 645 dari 2.459 ruang kelas SMK yang memerlukan rehabilitasi. Untuk ruang kelas baru, SMA membutuhkan 846 ruang dan SMK 606 ruang.

Dana Rehabilitasi

Ketua Tim Nuroji yang didampingi Asdi Narang, Isma Yatun, dan Yunico Siahaan (FPDI Perjuangan), Dito Ganindito (FPG), Jamal Mirdad (F Gerindra), Jefirtson Riwu Kore dan Vena Melinda (FPD) dan Sy. Anas Tahir (FPP) menyatakan akan memperjuangkan adanya dana rehabilitasi dalam RAPBN 2016 bagi sekolah-sekolah rusak di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga diminta untuk terjun langsung meninjau sekolah yang rusak. "Saran saya, Kemendikbud turun langsung ke lapangan sehingga dapat cepat bertindak," tambahnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan prihatin dengan kondisi

sekolah-sekolah di NTT. Sekolah-sekolah tersebut mengalami kerusakan yang cukup berat, diantaranya plafon hancur, kaca jendela pecah sehingga diganti dengan potongan bambu.

Ia bertekad untuk mengubah alokasi dana pendidikan bagi daerah tertinggal yang mestinya lebih besar dibanding daerah yang sudah maju. Pemberian dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) berdasar pertimbangan memiliki sumber daya alam (SDA) perlu ditinjau kembali. Sebagai contoh NTT yang APBD dan PAD kecil, jika berdasarkan aturan itu akan tetap memperoleh dana yang kecil.

"Ini harus diubah. Kita harus berpihak pada daerah yang membutuhkan. Harus melihat kebutuhan dan ketertinggalan masing-masing provinsi. Dewan inginkan anggaran pendidikan yang merata dan berkeadilan," kata Nuroji menambahkan.

Angka Putus Sekolah

Selain mengunjungi Provinsi NTT, dua tim kunker Komisi X juga mengunjungi Provinsi Riau dan Su-

lawesi Barat. DPR menyatakan prihatin dengan kondisi sektor pendidikan di Provinsi Riau, lantaran angka putus sekolah masih tinggi. Selain itu, dari seluruh guru di Provinsi Riau masih ada sekitar 50 persen guru honorer yang harus jadi perhatian pusat maupun daerah.

Terdapat sekitar 135 ribu anak di Provinsi Riau yang mengalami putus sekolah, angka ini sangat miris, artinya Riau masih belum berhasil memperbaiki sistem pendidikan di Bumi Lancang Kuning tersebut.

"Saya sangat prihatin di Provinsi Riau angka putus sekolah masih tinggi, selain itu, fasilitas pendidikan juga masih kurang. Seharusnya dengan semakin meningkatnya devisa daerah, Pemprov harus memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran untuk sektor tersebut," papar anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati.

Menurutnya, Riau termasuk provinsi yang memiliki potensi alam dan memiliki kekuatan besar di bidang pariwisata dan alamnya. "Riau juga memiliki program wisata dan menacanakan sebagai pusat *home land*



Tim Kunker Komisi X DPR berdialog dengan Kadisdikbud Provinsi Riau



Tim Kunker Komisi X meninjau SDN I Mamuju

of Melayu, harus fokus sehingga dapat menjadi andalan bukan hanya untuk Riau tetapi Indonesia,” harapnya.

Ketua Komisi X DPR Teuky Riefky Harsya mengatakan, Komisi X DPR mendukung penuh program Pemerintah daerah Riau, terkait visi 2020 Riau. “Kita mengharapkan Riau juga dapat memberikan masukan terkait UU Kebudayaan karena Riau ini merupakan salah satu pusat kebudayaan Melayu.

Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani dari Fraksi PDIP menyoroiti kinerja Pemprov Riau yang kurang optimal dalam menggolkan visi dan misi Pemerintah Riau yang ingin menjadi pusat budaya Melayu. Selama ini, pemerintah Malaysia mengklaim sebagai salah satu pusat budaya Melayu.

“Pemerintah daerah harus rajin menyelenggarakan berbagai atraksi wisata seperti lomba baca pantun maupun promosi pariwisata yang gencar ke berbagai negara,”ujarnya saat mengikuti Kunker Komisi X DPR ke Pemprov Riau yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsyah baru-baru ini.

Menurutnya, Riau memiliki tujuan wisata yang menarik seperti wisata *surfing* yang terletak di sungai

Bono. “Ini merupakan satu-satunya *surfing* di sungai namun dengan banyak lumpurnya,”paparnya.

Selain itu, pemerintah Daerah harus menangkap potensi pariwisata yang cukup besar di negara perbatasan. Ada sekitar 67 juta jiwa turis berkeliaran di Singapura yang tujuannya memang ingin wisata sekaligus berolahraga. “Perlu ditingkatkan atraksi seperti jazz festival dan kunjungan religi apakah sudah ada event seperti itu,” tandasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah perlu juga mewajibkan siswa atau siswi darmawisata, karya wisata dan melakukan kampanye secara nasional agar menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa Indonesia.

Tambahan Guru

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan, perlu ada perhatian khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa memberikan tambahan PNS Guru dan memberikan keleluasaan untuk mengangkat guru-guru *outsourcing* atau guru-guru bantu. Ia berharap,dengan tambahan guru akan mempercepat peningkatan sumber daya manusia di Sulawesi Barat.

Selain itu perlu ada pengembangan sumber daya manusianya baik untuk dosen maupun guru-gurunya, guna mengembangkan dan memajukan pendidikan muatan lokal.

Pada reses ini Tim Komisi X DPR-RI ke Provinsi Sulawesi berkesempatan meninjau ke sejumlah sekolah di Mamuju, ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Komisi X berharap Pemda memperhatikan kondisi-kondisi sekolah yang ada, baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK, termasuk masih banyaknya sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru.

Indonesia memang di mana-mana masih mengalami kekurangan guru, tapi mungkin di daerah-daerah yang baru seperti ini, harus mendapatkan perhatian, Kalau di Jawa misalnya, kekurangan guru bisa di *handle* oleh tenaga yang diperbantukan. Tapi kalau untuk daerah-daerah seperti ini rekrutmen guru itu tidak gampang” ungkap Mujib usai kunjungan ke SD I Mamuju, SMP 2 Mamuju dan SMU I Mamuju.

Menyinggung tentang kearifan lokal, Sulbar adalah daerah yang spesifik, yaitu penghasil kakao, ikan dan lain sebagainya, sehingga sekolah-sekolah kejuruan menjadi satu hal yang penting.

Tahun 2007 sudah ada Sekolah Kejuruan Kakao, tapi kabarnya tidak berjalan baik. Maka dari itu perlu penanganan serius untuk pengadaan tenaga pengajar yang memang benar ahli kakao dan sosialisasi pada masyarakat supaya lebih sadar akan daerahnya, sehingga sekolah maju menjadi sekolah unggulan dengan khas muatan lokal.” ujar Mujib. (mp,si,ray) Foto: mp,si, ray/parle/od



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: Denus



Ketua DPR RI berdialog dengan pedagang bawang merah dan sayuran di Pasar Induk Kramat Jati



Foto: Iwan Armanias



Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberi bantuan seragam ke SD, SMP dan Aliyah Yayasan Al Ihsan Desa Karacak, Kec. Leuwiliang Kab Bogor



Berdialog dengan pedagang batu akik di Pasar Batu Jl. Air Port Sentani, Jayapura



Buka puasa dengan buruh

Foto: Andi M Ilham



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan pidato dalam acara Pelantikan Ketua Parlemen Sudan



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah disambut tarian adat saat berkunjung ke Provinsi Papua Barat



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menemui Pimpinan MUI



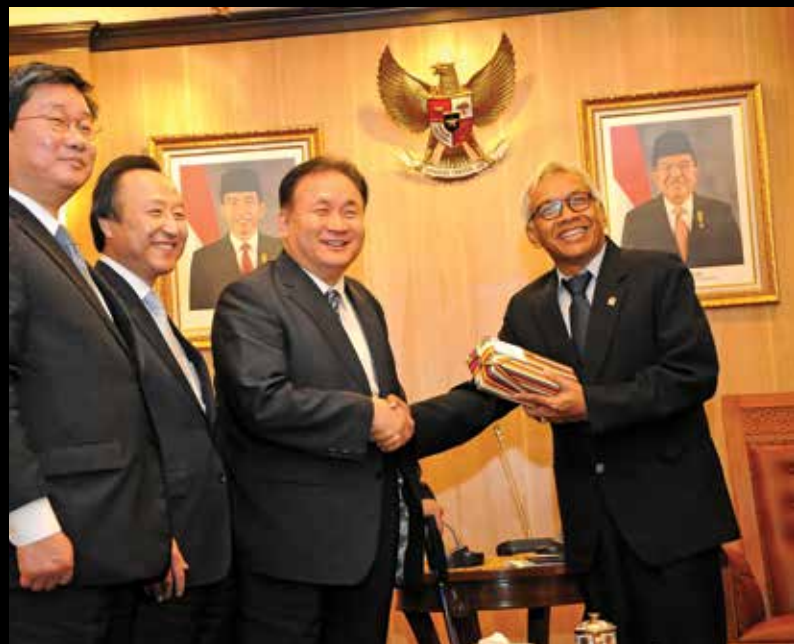
Acara Leadership BI di Bogor (Gadag),
15 Juni 2015
Foto: Djajat Sudrajat



Acara Pelantikan FKPD
Banjarnegara 12 - 13 Juni 2015



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima
delegasi Taipei Economic Trading Office
Foto: Andri



Saat bertukar cendera mata dengan delegasi
Parlemen Korea
Foto: Iwan Armanias



Widyawati, Prihatin dengan Bangsa ini

Prihatin. Itulah kata pertama yang keluar dari bibir aktris senior, Widyawati saat ditanya penilaiannya tentang bangsa ini yang sudah memasuki usia 70 tahun.

Bersama Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlemen-taria, Peraih Piala Citra sebagai Aktris Terbaik di film *Arini, Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat* pada tahun 1987 ini menjelaskan ikhwal penilainnya itu.

“Bagaimana saya tidak prihatin melihat kondisi bangsa ini, perekonomian kian menurun yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sementara itu tidak sedikit pejabat yang terlibat korupsi,” jelas isteri dari Alm, Sophan Sopian ini saat ditemui usai Konferensi Pers Film *Surat dari Praha*.

Wid, begitu panggilan akrabnya, menilai banyaknya pejabat dan pemimpin negeri yang terlibat korupsi ini dikarenakan lunturnya rasa nasionalisme atau kecintaan mereka terhadap tanah air.

“Mereka lebih mengutamakan ego pribadi dan kelompoknya saja. Kalau bicara ego susah juga ya...,” ujarnya.



Meski demikian, dilanjutkan Wid, sebagai bangsa besar, seluruh masyarakat harus optimis bahwa Indonesia dapat keluar dari berbagai permasalahan yang ada. Untuk itu diperlukan kesungguhan dari semua elemen bangsa untuk berbuat lebih baik lagi.

Salah satunya menurut pemeran Yuli dalam Film *Pengantin Remaja* adalah dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai sebuah simbol yang selalu dibacakan setiap upacara.

Apakah dengan begitu Wid juga akan menggantikan mendiang sang suami untuk terjun ke panggung politik tanah air? Tidak. Dikisahkan wanita kelahiran 12 Juli 1950 ini, jauh sebelum para artis berbondong-bondong menjadi kader partai dan terjun ke panggung politik, dirinya pun sudah ditawarkan hal yang sama belasan tahun silam.

Ia sempat ditawarkan untuk menjadi

calon anggota legislatif (caleg) di Jawa Timur. Sementara di jajaran eksekutif, tawaran untuk menjadi calon wakil Bupati Tangerang dan wakil Gubernur Banten pun sempat menghampirinya. Namun ia menampik semua tawaran itu. Ia merasa tidak memiliki potensi untuk terjun ke panggung politik, terlebih lagi menjadi pemimpin sebuah daerah.

“Saya tahu kapasitas saya, dan saya tahu sekali potensi yang ada di diri saya sendiri. Dan saya tidak mau sok tau tapi ternyata saya tidak bisa apa-apa. Bagi saya, lebih baik mengerjakan sesuatu yang saya mampu,” akunya.

Meski tidak ingin terjun dalam politik praktis, namun sebagai warga negara ia harus tau tentang politik dalam negeri sendiri. Karena baginya politik itu berkaitan dengan sebuah sistem Negara dimana dirinya tinggal.

Masih diingatnya, saat mendiang sang suami terjun ke panggung politik tanah air di awal tahun 90-an. Ia melihat sang suami selalu memegang teguh prinsip hidupnya. Bagi Sophan ketika itu, hitam adalah hitam, dan putih adalah putih, tidak ada abu-abu. Dan ketika belaka-



ist.

ngan Sophan melihat munculnya politik abu-abu, diceritakan Widyasang suami pun memilih keluar dari panggung politiknya ketika itu.

Hal itu pun menjadi pelajaran tersendiri bagi dirinya. Dengan begitu ketika tawaran untuk terjun ke politik praktis datang, ia pun langsung menampiknya. Baginya seni peran merupakan dunia yang menjadi pilihan hidupnya sejak lama, dunia yang sesuai dengan kemampuannya, hingga telah menyatu dengan darah dagingnya. Tak berlebihan jika sampai di usianya yang ke-enam puluh lima tahun ibu dari Romi dan Romi ini pun lebih memilih beraktivitas di dunia seni.

Romi dan Juli

Meski tergolong senior di bidang akting dan seni peran, namun tak sedikitpun terlihat sikap angkuh atau sombong dari diri Widyawati. Ia malah merangkul bahkan tak jarang menjadi contoh dan teladan

bagi para juniornya. Salah satunya dengan sikap profesional yang ditunjukkannya saat syuting, dengan datang tepat waktu bahkan tak jarang ia pun tak segan membagi ilmu aktingnya kepada para juniornya.

Berbicara tentang akting, karir di dunia seninya di mulai sejak tahun 60-an, namun namanya baru meroket saat ia membintangi film *Pengantin Remaja* dimana ia berperan sebagai Juli. Film itu tidak hanya melambungkan namanya, namun juga telah mempertemukannya dengan sang belahan jiwanya. Ya, di film yang melejit di tahun 1971 itu, ia berpasangan dengan Sophan Sophiana yang berperan sebagai Romi. Siapa sangka jika kebersamaan yang terus menerus itu kemudian menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya.

Jika saat ini para pecinta infotaimen kerap menyebut istilah *cinlok* alias cinta lokasi untuk artis yang terlibat asmara sesaat dengan teman

seprofesinya di lokasi syuting, tentu hal itu tak berlaku bagi “Romi dan Juli” ini. Widyawati dan Sophan membuktikannya. Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan 9 Juli 1972 menjadi saksi keduanya mengikrarkan cinta abadinya dalam biduk pernikahan hingga maut memisahkan keduanya.

Menikah tidak mengurangi eksistensi keduanya di dunia seni peran. Bahkan lewat film yang disutradarai suaminya sendiri, putri dari Adisura bin Soeradibrata ini mampu meraih Piala Citra dalam Festival Film Indonesia Tahun 1987 lewat film *Arini, Masih Ada Kereta yang Akan Lewat*.

Lesunya industri perfilman tanah air yang kemudian berganti era layar kaca, hal itu pun sempat membuat Wid ikut arus berlakon dalam sinetron layar kaca, sementara sang suami mulai “berlakon” di panggung politik tanah air. Beberapa judul sinetron yang sempat diperankan Wid, diantaranya *Bawang Merah Bawang Putih*, *Sangkuriang*, *Abad 21*, *Kemuning*, dan *Ketika Cinta Harus Memilih*.

Tahun 2008, kerindungan publik akan pasangan “Romi dan Yuli” terobati lewat aktingnya dalam film layar lebar bertajuk *Love*. Film ini tentu menjadi satu film yang sangat berkesan bagi Widyawati selain film *Pengantin Remaja*. Pasalnya, beberapa bulan setelah film tersebut rilis di pasaran, publik dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan motor yang merenggut nyawa Sophan Sophian.

Dengan begitu, bisa dikatakan *Love* menjadi film terakhir keduanya beradu akting dalam film layar lebar. “*Love* atau *Cinta*” itu juga menjadi sebuah simbol keabadian dan kesetiaan dua Insan, diharapkan juga menjadi simbol kesetiaan kita pada bangsa dan negara ini. (Ayu) Foto: Rizka/Parle/HR





MUSEUM DPR PERKUAT SEJARAH KOLEKTIF DPR RI

Museum memang merupakan tempat koleksi benda-benda terdahulu, tapi keberadaannya tak harus selalu identik dengan fosil, patung-patung, atau benda purbakala. Museum adalah rekaman sejarah kebudayaan dan peradaban manusia. Di sana bisa disimpan berbagai karya manusia. Di negara-negara maju, Inggris misalnya, museum terspesialisasi untuk berbagai karya budaya.

Belajar dari London, hampir semua wilayah di London dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang mumpuni, ada museum transportasi yang khusus mengoleksi berbagai perkembangan transportasi di negeri itu. Selain itu kita juga bisa menyaksikan museum perang, medis, musik, astronomi, ilmu pengeta-

huan, bahkan museum sungai. Inggris, di kota-kota besar dan kecil, kita bisa mendapati museum yang mengoleksi benda atau dokumen mengenai masing-masing kota atau wilayah. Bahkan di wilayah kota, kerap fungsi museum dipadukan dengan perpustakaan.

Museum di London sering dipadukan dengan perpustakaan yang lengkap, yang selalu difungsikan sebagai pusat dokumen sejarah wilayahnya. Foto-foto atau arsip kuno bisa dijumpai di perpustakaan di sana. Menyoroti konsep Museum di London, memiliki makna bahwa kita harus memperbaiki dan memperluas makna dan fungsinya. Artinya bahwa Museum harus didefinisikan secara lebih modern. Ia bukan hanya tempat mengoleksi benda-benda kuno purbakala, tapi juga karya tradisional yang berte-

baran di negeri ini, serta karya modern yang mengandung nilai sejarah kebudayaan dan peradaban manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya dan tradisinya mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan budaya kita tidak kalah dibandingkan dengan luar negeri, karena itu harus dipelihara dan dipertahankan. Untuk itu, perlu dibangun “budaya” museum, sehingga masing-masing daerah punya museum yang mengoleksi kekayaan budaya mereka, museum yang kukuh dan punya karakter. Tanpa hal itu, dikhawatirkan kekayaan itu akan musnah terlempar oleh industrialisasi modern yang hampir seluruhnya produk impor.

Sayang sekali, banyak karya lama bangsa kita hilang selama masa pen-

jajahan. Sebagian dilarikan ke Belanda atau negara asing lain. Akibatnya, ilmuwan kita yang akan mengadakan penelitian, naskah sastra kuno misalnya, mereka harus ke Belanda, Inggris, atau Jerman. Periode pasca-kolonialisme telah berlalu setengah abad lebih. Banyak karya bangsa kita yang muncul selama itu. Semuanya harus direkam, disimpan secara bagus agar tak hilang.

Tidak terkecuali Museum DPR, penampilan Museum DPR yang terletak di lantai II Gedung Kura-kura, dan berlokasi agak memojok tersebut dahulu memang terkesan gelap dan sedikit terabaikan. Namun saat ini setelah dimulai proses revitalisasi Museum, kondisi museum terlihat lebih rapih dibandingkan masa lalu.

Berjalan menyusuri Museum, terlebih dahulu kita akan diarahkan untuk menaiki eskalator yang menuju lantai II, kemudian di sebelah kanan akan tiba di sebuah pintu yang menampilkan poster bertuliskan “Museum DPR-RI Menuju Parlemen Modern”.

Saat masuk ke dalam, pajangan yang pertama dilihat adalah beberapa kursi, meja, podium dan jam dinding yang menurut sejarahnya digunakan dalam sidang KNIP pada 7-12 Desember 1949 di Keraton Yogyakarta. Sidang itu membicarakan hasil Konferensi Meja Bundar yang menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Turut dipajang di antara kursi-kursi itu sebuah mesin tik yang digunakan dalam sidang konstituan di Bandung, mesin tik jadul itu digunakan oleh sekretaris sidang DPR periode 1956-1959.

Selain itu, jika berjalan lagi ada benda lain yang kali ini dipajang di dalam kotak kaca, yaitu ‘kerat’ atau tempat air minum anggota MPRS tahun 1960-1965 dan pesawat tele-

pon yang digunakan pada sidang umum MPRS 1960-1965 di Gedung Sociëteit Concordia Bandung (Gedung Merdeka).

Termasuk ditampilkan sebuah patung pakaian Pimpinan MPRS berwarna putih-putih tahun 1960-1961. Pakaian itu sudah dikenal oleh para pejuang bangsa Indonesia sejak 1940an. Benda lain yang dipajang adalah tempat duduk Presiden dan Wakil Presiden juga Pimpinan DPR RI tahun 1968. Sementara pada dinding-dinding museum ditampilkan foto-foto pimpinan DPR era 1950-1956, DPR hasil pemilu ke-1 1955-1959, dan seterusnya hingga pimpinan DPR hasil Pemilu 2014 yang saat ini diketuai Setya Novanto.



Lukisan Volksraad karya S Sudjojono

Selain itu, foto-foto kegiatan DPR dari masa ke masa yang juga dipajang sebagai poster dinding museum. Salah satunya foto Ketua DPR Mr Sartono saat menyambut kunjungan Menteri Kebudayaan Cekoslovakia, Mr Pavel Dubovsky pada 8 Januari 1957. Ada juga naskah UUD Sementara yang dibuat tahun 1950 sebagai UU pengganti RIS. Pasal di dalamnya berisi keinginan rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan dan melepas diri dari federasi Belanda (pembubaran negara RIS). Tidak ketinggalan juga ada sedikit foto dan informasi tentang sejarah Gedung Nusantara yang di-

mulai dari upacara di lokasi proyek Conefo 31 Mei 1966.

“Museum itu merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai memori kolektif perjalanan sebuah institusi DPR, bahwa DPR sampai usia 70 tahun telah mengukir sejarah dalam berbagai jamannya,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon ketika diminta tanggapannya soal Museum DPR RI, baru-baru ini.

Setiap terjadi perubahan kekuasaan, lanjut Fadli, selalu melibatkan peran parlemen karena itu, semuanya harus terdokumentasi dengan baik. “Cerita tentang Volksraad, dan sejarah parlemen yang terdapat di Museum diharapkan generasi penerus tahu peran DPR

ini. Karena itu peran museum cukup dominan, memang sudah dikumpulkan barang-barang artefak itu sementara ini kita gunakan Museum yang ada sebagai tempat transisi,” jelasnya.

Sejak jaman Volksraad, lanjutnya, DPR juga sebenarnya sudah memiliki Museum namun tempat dan lokasi belum ada bahkan artefak atau barang bersejarah masih dibundel karena belum ada tempat untuk menyimpan koleksi tersebut. “Kondisi ini memang sangat menyedihkan karena perpustakaan maupun museum di luar negeri

dikerjakan secara serius, bahkan perpustakaan terbesar itu ada-nya di Congress Amerika,” paparnya. Nantinya, Museum dan perpustakaan tidak hanya diperuntukkan buat anggota DPR tetapi juga untuk publik atau masyarakat umum.

Dia menambahkan, kondisi Museum DPR saat ini sangat menyedihkan karena memang banyak yang kurang menghargai sejarah. Pasalnya, jika berbicara *nation building* itu kita berbicara tentang sejarah hingga muncul kesadaran sejarah. “Museum salah satu sarana membangun kesadaran sejarah dan mengapresiasi kesadaran sejarah kita,” jelasnya.

Dirinya mengharapkan, Museum nantinya akan memuat suatu periodisasi parlemen dari Pra kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini. Ada kronologi tonggak penting seperti memuat artefak yang menarik, kursi, jubah, kopiah, palu dan hal menarik yang perlu diketahui masyarakat serta memuat cerita terkait benda tersebut.

Parlemen kita banyak menghasilkan tulisan, maupun legislasi atau UUD, konstitusi, dan lain-lain. Jika



Salah satu sudut Museum DPR

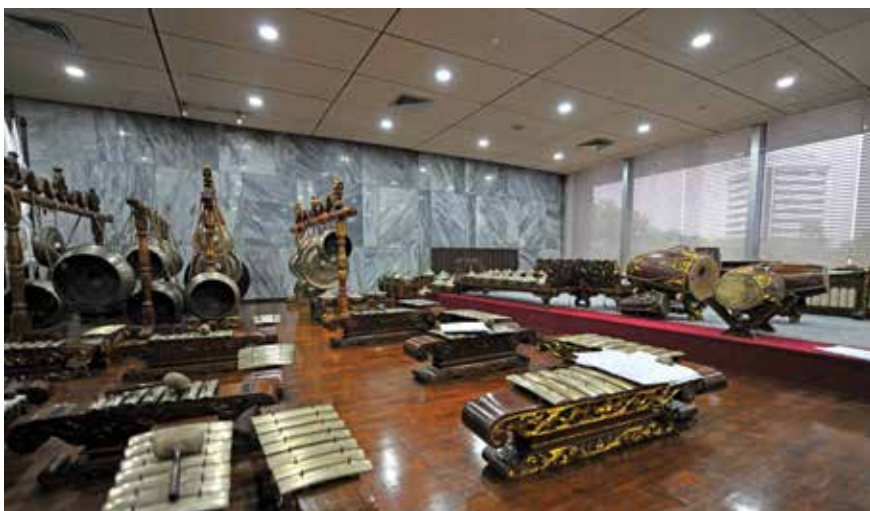
membandingkan AS, mereka sangat menghargai sejarah mereka memiliki *bill of rights* (amandemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat), sementara negara kita, naskah Supersemar saja tidak diketahui keberadaannya. “Kita tidak jelas, naskah UUD 1945 tidak tahu kemana, begitu juga Pancasila dan UUD 1945, bahkan seharusnya naskah pelantikan Presiden itu harusnya ada di Museum DPR ini nantinya,” jelasnya.

Pembangunan Museum itu merupakan salah satu bagian menuju Parlemen Modern, seperti sistem IT, gedung yang representatif,

tenaga ahli yang dapat menunjang kinerja Dewan. “Memang dulu cukup memadai sesuai kebutuhan memang dibutuhkan tenaga ahli, untuk bangunan juga tidak memadai, karena fasilitas ruangan anggota Dewan itu sama dengan eselon I, harusnya 120 meter persegi untuk satu ruang anggota, jadi kalau konsekuen harus diikuti itu peraturan UU,” jelasnya.

Saat ini, akunya, memang tidak ada *blueprint* untuk pembangunan Gedung DPR. Karena gedung saat ini bukan untuk gedung parlemen. Gedung parlemen saat itu berada di Lapangan Banteng. Gedung DPR sekarang ini untuk Conefo. “Kita tidak punya *blueprint* penataan legislatif, kita mau mulai ini penataan legislatif, supaya *follow function*,” jelasnya.

Menurutnya, biaya pembangunan gedung DPR RI itu cukup realistis karena memang banyak kementerian atau lembaga seperti KPK, MA, MK dan BPK membuat gedung baru untuk meningkatkan kinerjanya. Ini anggarannya sama seperti membeli pesawat kepresidenan,” paparnya. (si/nt) Foto: Sugeng, Denus, Andi/Parle/OD





PARLEMEN KOREA SELATAN DAN LEGISLASI NASIONAL



Oleh Peneliti CEPP FISIP UI:

Danny Satya Brata, Larissa Amanda Siahaan & M. Adinda Rizki

Korea Selatan merupakan negara Asia dari kawasan Asia Timur. Negara ini merupakan bagian dari Korea yang terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara sebagai dampak perang saudara yang terjadi pada tahun 1950an. Korea Selatan mampu bangkit dari salah satu negara yang paling miskin pada dekade 1950-an di dunia, menjadi salah satu dari sedikit negara yang berkembang dan terkaya pada dekade 1990-an dan berhasil memasuki jenjang elite negara industri dunia.¹ Politik ekonomi bebas yang dianutnya menyebabkan keadaan ekonominya berkembang dengan cepat.

Disamping peningkatan positif di sektor ekonomi, negara yang

1. Michael P.Todaro & Stephen C.Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 2. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. Hlm. 108

beribukota di Seoul ini juga menjadi salah satu negara di Asia yang kinerja parlemennya menjadi sorotan. Kinerja parlemen Korea Selatan ini bukan dalam arti negatif melainkan arti positif. Baik buruknya parlemen dalam suatu negara dapat dilihat dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan menjadi Undang-Undang. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Parlemen Korea Selatan dapat secara efektif menghasilkan Undang-Undang dalam satu periode.

Parlemen Korea dan Perumusan UU

Korea Selatan menggunakan sistem unikameral atau sistem satu kamar dalam parlemen Korea yang biasa disebut dengan “Kukhoe” atau Korean National Assembly (KNA). Sistem ini berarti

KNA merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan. KNA yang sedang berjalan saat ini terdiri dari 300 kursi dan diadakan setiap empat (4) tahun sekali di seluruh 246 daerah pemilihan, ditambah dengan 54 kursi tambahan yang dibagikan kepada partai politik dengan proporsi suara yang diperoleh. Korea selatan juga menganut sistem multi-partai. Ada 9 partai di Korea Selatan, diantaranya adalah Grand National Party, Democratic Party, The Liberty Forward Party, Future Hope Alliance, Democratic Labor Party, dan lain sebagainya. Namun secara tidak langsung sistem kepartaian di Korea Selatan adalah 2 partai besar, yaitu Partai Besar Nasional (57,3) dan partai Demokrasi Baru Bersatu (29.10%). Dua partai inilah yang berkuasa di parlemen.



Sistem satu kamar ini seringkali diterapkan oleh negara republik yang homogen, kecil, dan menganggap sebuah majelis tinggi tidak perlu. Argumen lainnya adalah terkait pemikiran apabila majelis tingginya demokratis, maka sejalan dengan majelis rendah yang juga demokratis. Kelemahan sistem unikameral adalah wilayah-wilayah urban yang memiliki penduduk yang lebih besar akan mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada wilayah-wilayah pedesaan yang penduduknya lebih sedikit.

Layaknya semua negara hukum yang diatur dan dijalankan menurut hukum, kekuatan yang paling penting dari KNA adalah untuk memberlakukan, mengubah, dan menghapus undang-undang.² Salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah fungsi legislasi disamping fungsi pengawasan dan anggaran. Legislasi disini dapat dilihat dari UU yang dihasilkan oleh parlemen.

Pencapaian

Peran parlemen adalah untuk membuat undang-undang dan mengubah atau memperbaiki sistem hukum. Parlemen adalah tempat di mana keputusan berlangsung atas dasar preferensi masyarakat dan diubah ke dalam bentuk kebijakan dan program. Konstitusi di Korea Selatan sebagai hukum yang terpenting, mengatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat, struktur fundamental Pemerintah, tatanan ekonomi, manajemen pemilu, dan lain sebagainya. Konstitusi merupakan sebuah standar untuk undang-undang. Korean National Assembly (KNA) menggunakan metode e-parlemen (parlemen elektronik/online), sehingga para anggota Dewan dapat melakukan

2. The National Assembly of The Republic of Korea, "On Legislation," http://korea.assembly.go.kr/int/act_01.jsp (diakses tanggal 15 Juli 2015 pukul 01.15).

“ Korean National Assembly (KNA) menggunakan metode e-parlemen (parlemen elektronik/online), sehingga para anggota Dewan dapat melakukan permintaan pembuatan RUU secara online dan dapat segera diproses, difollow-up, dan diserahkan kepada komisi/anggota yang melakukan permintaan ”

permintaan pembuatan RUU secara online dan dapat segera diproses, difollow-up, dan diserahkan kepada komisi/anggota yang melakukan permintaan. Dokumentasi dan data yang terintegrasi dalam sistem parlemen elektronik ini mendukung kinerja anggota Dewan sehingga dapat mempercepat pekerjaan mereka.

Di Korea Selatan terdapat Legislative Counseling Office (LCO) sebagai sistem analisis dan pengumpulan informasi mengenai fungsi legislasi dan Parlemen Korea Selatan. LCO ini mencakup berbagai praktik di bidang perundang-undangan untuk mendukung aktifitas legislasi dan anggota Parlemen Korsel, seperti permintaan Draft RUU (Rancangan Undang-Undang) dari Anggota Parlemen, perancangan/penyusunan Draft RUU, penyerahan Draft RUU ke Komisi, pembahasan internal Komisi, pembahasan di Komisi Legislasi dan Hukum, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, serta pengambilan keputusan dari

Presiden (pengesahan atau veto).³ Secara struktur organisasi, LCO setingkat dengan Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang Director General dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Parlemen Korea, lebih tepatnya dibawah Deputi bidang perundang-undangan, jika dibandingkan dengan DPR di Indonesia sama dengan Setjen DPR dan Deputinya. Beberapa fungsi dan tugas dari LCO, seperti merancang pembuatan RUU serta memberikan support terkait aktifitas legislasi dari anggota parlemen Korsel termasuk menguji suatu RUU yang diminta oleh anggota komisi.

Terdapat beberapa macam tahapan sebelum akhirnya RUU dapat disahkan menjadi UU. Tahap pertama yaitu dengan penyusunan undang-undang, di mana lembaga administrasi pusat menyusun draft RUU sesuai dengan ranah yurisdiksinya, kemudian dikonsultasikan dengan kementerian yang relevan. RUU pada tahap awal dipublikasikan ke legislatif dan tidak kurang dari 20 hari.

KNA juga melakukan pemeriksaan peraturan bagi setiap UU dan pemeriksaan departemen pemerintah legislasi, termasuk hal-hal yang membatasi hak-hak rakyat, termasuk dalam aspek praktis, seperti apakah mereka realistis, apakah mereka sesuai dengan tujuan negara, apakah mereka bertentangan dengan UU sebelumnya, atau pun ketetapan dibawahnya. Setelah pemeriksaan tersebut, dilakukan musyawarah oleh wakil Menteri serta musyawarah di Dewan Negara, untuk membahas RUU yang dianggap memuat hal-hal penting dan dibahas dalam agenda Dewan Negara. Kemudian, hasil musyawarah tersebut ditandatangani oleh Pre-

3. "Association of Secretaries General of Parliaments" dalam "Open National Assembly: A legislative support system designed to enhance communication with citizens, and to facilitate the identification of legislative needs"



siden yang sudah disertai dengan pertimbangan dari komite atau komisi.

Ketika RUU diusulkan ke Majelis Nasional, ketua melaporkan ke sidang pleno. Setelah menyelesaikan pemeriksaan komite, kemudian diagendakan sesi pleno. Jika perlu, setiap komite juga dapat memeriksa RUU tertentu dengan sub-komite. Kemudian dilakukan pemeriksaan legislasi dan hukum komite oleh komite Legislasi dan Kehakiman yang harus dibahas dan diselesaikan dalam sidang paripurna oleh Majelis Nasional hingga RUU tersebut diajukan kepada Dewan Negara. Jika keberatan, Presiden dapat meminta Majelis Nasional untuk membicarakan lagi RUU tersebut dengan melampirkan pernyataan keberatan dalam waktu 15 hari dari hari ketika RUU tersebut diberikan ke pemerintah. Akhirnya, RUU diselesaikan di Dewan Negara dan ditandatangani Presiden. Kemudian UU tersebut diumumkan dan dipublikasikan dalam berita resmi di Korea Selatan.

Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, menjalankan hak vetonya untuk menghentikan proses revisi RUU parlemen yang sudah lolos di lembaga legislatif. Penolakan tersebut dilakukan karena dianggap mempunyai unsur pelanggaran konstitusi. Presiden meminta parlemen kembali mempertimbangkan revisi yang memberikan parlemen hak mengubah tata aturan pemerintahan. Revisi UU parlemen yang ditolak Presiden Park Geun-hye tersebut, berbenturan dengan otoritas kabinet pada pembuatan UU administrasi, memperkuat kontrol pihak yuridis, dan juga merusak tatanan pemisahan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi. Selama ini sudah ada sekitar 73 kasus penolakan presiden atas revisi UU parlemen, akan tetapi penolakan ini merupakan yang pertama kali dalam pemerintahan Park Geun-hye. Permintaan presiden agar revisi itu ditinjau ulang, berdasarkan konstitusi, harus dibawa ke meja persidangan parlemen dan harus mendapatkan mayoritas suara sebanyak dua pertiga.

Proses pembuatan kebijakan KNA tidak terlepas dari dukungan layanan informasi dan riset. Di Korea Selatan itu sendiri; baik legislator secara individu maupun komisi-komisi yang ada, meminta pendapat kepada akademisi maupun lembaga penelitian adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Tentu saja mereka yang dimintai pendapatnya adalah lembaga atau individu yang kredibel.

Ada dua kategori lembaga penyedia informasi yang bekerja sama dengan KNA, yakni internal dan eksternal parlemen. Untuk lembaga internal, KNA memiliki tiga lembaga yang berperan memberikan informasi untuk mendukung kinerja mereka. Keberadaan mereka diatur dalam National Assembly Act bab ketiga tentang alat kelengkapan dan fungsinya. Tiga lembaga tersebut adalah: National Assembly Budget Office, National Assembly Library, dan National Assembly Research Services(NARS).

Ketiga lembaga diatas masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 304 orang, National Assembly Library siap untuk menyediakan layanan informasi dan data kepustakaan secara *up to date* dan akurat kepada anggota legislatif atau organisasi pendukungnya. Semenjak tahun 1998, layanan National Assembly Library diperluas untuk publik dan tidak lagi hanya anggota KNA saja.⁴ National Assembly Budget Office yang didirikan pada Oktober 2003 memiliki tugas untuk memperkuat fungsi penganggaran KNA menjadi semakin efisien dan juga mengawasi keuangan negara.⁵ National Assembly Research

4. National Assembly Library, "Function & Organization," http://www.nanet.go.kr/english/01_about/03/function.jsp (diakses tanggal 15 Juli 2015 pukul 01.15).

5. The National Assembly Budget Office, "Establishment & Objective," http://korea.nabo.go.kr/eng/01_about/establishment.page (diakses tanggal 15 Juli 2015 pukul 01.15).



“ Semenjak tahun 1998, layanan National Assembly Library diperluas untuk publik dan tidak lagi hanya anggota KNA saja. National Assembly Budget Office yang didirikan pada Oktober 2003 memiliki tugas untuk memperkuat fungsi penganggaran KNA menjadi semakin efisien dan juga mengawasi keuangan negara. National Assembly Research Services (NARS) memiliki tugas membantu proses legislasi dengan membuat riset dan analisis. ”

Services(NARS) memiliki tugas membantu proses legislasi dengan membuat riset dan analisis. NARS menurut data tahun 2013 memiliki 119 staff pendukung.

NARS dan NAL sekilas memiliki tugas yang hampir mirip, namun terdapat perbedaan tentang bagaimana kedua lembaga ini memberikan informasi kepada KNA. NAL memberikan dukungan proses legislasi sebatas fakta dan informasi saja, sedangkan NARS membedah isu lebih dalam melalui bingkai riset dan analisis. NARS sendiri jika dibandingkan dengan NABO ataupun NAL merupakan lembaga yang umurnya jauh lebih muda, yakni didirikan pada tahun 2007.

Salah satu bentuk kerjasama eksternal adalah seperti apa yang dilakukan oleh pihak partai politik dengan universitas terkemuka. Profesor dari universitas terkemuka seringkali diundang untuk presentasi makalah atau juga sebagai komentator yang diselenggarakan oleh partai politik. Konsultasi ilmiah yang dilakukan oleh partai politik yang didanai dengan dana publik juga didasari oleh peraturan yang menyebutkan bahwa 30% dana yang mereka miliki harus dipakai untuk riset dalam rangka

rea Selatan hanya terkait dengan norma-norma atau pasal-pasal perubahannya saja dan yang paling penting mereka menggunakan sistem *online* (e-parlemen) dalam proses perancangan RUU tersebut. Hal itu yang membedakan sistem perundang-undangan di Korea Selatan dengan di Indonesia, sehingga Korea Selatan dapat menghasilkan/mengesahkan hingga ribuan RUU dalam satu periode.

Undang-Undang yang mendapat perhatian luas akhir-akhir ini adalah



mendukung kinerja anggota legislatif mereka.⁶

Melalui cara perumusan suatu peraturan berdasarkan data dan analisis, para anggota legislatif setidaknya memiliki cukup informasi yang akan memudahkan kerja mereka dalam penyusunan UU sehingga kerja para anggota dewan ini bisa lebih cepat. Selama periode Mei 2008 hingga Mei 2012, NAL berhasil meloloskan sekitar 2.931 UU. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan NAL periode sebelumnya yang “hanya” berhasil meloloskan 2.546 UU.⁷ Perubahan RUU di Ko-

Penghapusan UU Perzinahan dan juga. Pengadilan Korea Selatan telah melegalkan perselingkuhan dan menganggap hal tersebut bukanlah urusan konstitusional lagi. Meski sebelumnya perselingkuhan dianggap kejahatan yang akan mendapat ganjaran hukuman penjara selama 2 tahun, namun hukum yang telah berjalan selama 62 tahun tersebut kini resmi dihapuskan. Argumen yang diberikan adalah hukum tersebut melanggar privasi seksual masyarakat. Dalam hal ini KNA melakukan evaluasi terhadap suatu undang-undang yang telah berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Korea Selatan.

6. Ajoy Datta dan Nicola Jones, “Linkages between researchers and legislators in developing countries: A Scoping Study,” Working Paper 332 (London, Overseas Development Institute, 2011): Halaman 7.

7. The National Assembly of The Republic of

Korea, “Bill Statistics,” http://korea.assembly.go.kr/int/past_04.jsp diakses tanggal 15 Juli 2015 pukul 01.15).



Antara Surga dan Komodo

Salah satu keajaiban dunia dan hanya satu-satunya di dunia adalah reptile terbesar binatang komodo. Binatang melata raksasa ini hanya ada di Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu tidak heran apabila pemerintah setempat selalu mempromosikan salah satu wisata andalan tersebut dalam berbagai even.

Pada saat kunjungan kerja Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Nuroji pekan kedua Agustus baru-baru ini, Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga mempromosikan wisata komodo ini. “Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apabila datang ke NTT jangan dilewatkan untuk mengunjungi Pulau Komodo sekaligus menyaksikan hewan langka tersebut. Komodo hanya satu-satunya di dunia hanya di NTT,” ungkapnya penuh semangat dan sedikit bercanda.

Karena itu lanjutnya, apabila meninggal namun belum pernah ke Pulau Komodo, maka akan ditanya malaikat sudah melihat komodo belum. Kalau belum disuruh kembali ke dunia lagi supaya melihat komodo. Yang sudah melihat, silahkan masuk surga. “Jadi silahkan

yang belum melihat langsung binatang komodo, sempatkanlah supaya tidak menyesal dan masuk surga,” ujarnya disambut tawa para anggota Komisi X dan tamu undangan lainnya.

Tiba giliran Ketua Tim Kunker Nuroji menyampaikan sambutannya. Dia mengaku sudah dua kali berkunjung ke Provinsi NTT dan sekarang ini yang kedua kalinya. “Alhamdulillah saya dalam kunjungan pertama ke NTT sudah ke Pulau Komodo dan menyaksikan binatang langka tersebut. Berarti saya bersyukur sudah lihat komodo dan bisa masuk surga,” ungkap Nuroji yang juga disambut gelak tawa hadirin.

Sektor pariwisata memang menjadi unggulan di Provinsi ini dengan dicanangkannya NTT sebagai Provinsi Pariwisata. Destinasi wisata kelas dunia di wilayah yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, selain komodo juga ada Taman Laut terindah di dunia Alor, danau tiga warna Kelimutu, wisata surfing Rote dan Labuhan Bajo. Pokoknya hebat dan mengagumkan. (mp) Foto: ist/Parle/HR

Bung PARLE

